



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



kfr

kajian fiskal
regional

Tahunan 2023



Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Selatan



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DJPb
Indonesian Treasury

kajian fiskal regional

Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Selatan

Tahunan 2023

Foto cover

Lokasi **Jembatan Ampera, Palembang**

Foto **Hadi Utama (Unsplash)**



Penanggung Jawab :

**Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II
Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan**

Gedung Keuangan Negara Palembang Lt.2
Jl.Kapten A. Rivai No.2 Palembang, Sumatera Selatan
Telp. : (0711) 356534, 353526
Faks. : (0711) 310891
Surel : ppa2djpbsumsel@kemenkeu.go.id

Untuk peningkatan kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) kedepan, dibutuhkan saran perbaikan dari Saudara/i dengan mengisi formulir *feedback* yang telah kami sediakan. **Tautan *feedback*** dan ***softcopy* Laporan Kajian Fiskal Regional** dapat diakses melalui ***barcode*** di bawah :

***Feedback* KFR**



***Softcopy* KFR**



Visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia untuk mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan:

"Pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan".

Misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan

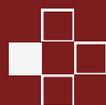
DJPb mendukung misi Kementerian Keuangan nomor tiga (memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif) dan nomor empat (mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum) melalui:

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu;
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan
5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif

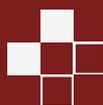
Filosofi Logo KFR Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan



Huruf yang tersambung merepresentasikan proses penyusunan KFR yang melibatkan anggota tim penyusun untuk saling bersinergi hingga tahap akhir. Bentuk bunga songket Palembang pada akhir logo menyerupai simbol plus (+) sebagai simbol harapan bahwa kajian dapat memberikan dampak positif.



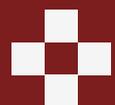
Triwulan I



Semester I



Triwulan III



Tahunan

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugas sehingga dapat menyelesaikan Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 secara tepat waktu. Kanwil DJPb mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut salah satu fungsi yang diselenggarakan adalah penyusunan KFR.

Kanwil DJPb Sumsel melaksanakan reviu atau telaah makro belanja pemerintah dengan menganalisis efektivitas kebijakan fiskal terhadap pencapaian tujuan makroekonomi pada konteks regional melalui penyusunan KFR. Pada KFR ini kami juga menyajikan beberapa kajian yang kami lakukan dan hasil analisisnya sebagai suplemen. Kami berharap kajian ini dapat menjadi sumber informasi, bahan analisis dan evaluasi terkait perkembangan ekonomi di Sumatera Selatan, serta menjadi masukan bagi kebijakan pelaksanaan anggaran bagi para mitra kerja Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi menyediakan data dan informasi serta berpartisipasi dalam penyusunan KFR ini sehingga KFR Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami berharap koordinasi dan kerjasama dalam penyusunan KFR ini dapat terus berlanjut di masa mendatang agar dapat mendukung kesinambungan implementasi kebijakan fiskal di Sumsel sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan di Sumsel dan pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumsel.

Kami menyadari bahwa kajian ini masih belum sempurna, sehingga kami sangat membutuhkan saran dan masukan yang konstruktif dari semua pihak sebagai bahan penyempurnaan dan peningkatan kualitas dari hasil kajian pada KFR di periode berikutnya. Dengan semangat mewujudkan pengelolaan APBN yang kredibel, transparan, dan akuntabel, kami berharap agar KFR ini dapat memberikan kontribusi bagi internal Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Perbendaharaan, dalam pengambilan kebijakan strategis terkait pelaksanaan anggaran, maupun seluruh mitra kerja Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, Februari 2024

**KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Ditandatangani secara elektronik
Rahmadi Murwanto

Daftar Isi

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Grafik	v
Daftar Tabel	vii
Ringkasan Eksekutif	ix
Dashboard	xi

Bab I Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah

I.1 Pendahuluan	3
I.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	3
I.3 Tantangan Pembangunan	3

Bab II Perkembangan Ekonomi Regional

II.1 Perkembangan Indikator Makroekonomi	7
II.2 Perkembangan Indikator Kesejahteraan	9
II.3 Reviu Capaian Kinerja Makro Kesra Regional	11
Boks A: Pengaruh Penyaluran KUR terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sumatera Selatan	12

Bab III Analisis Fiskal Regional

III.1 Pelaksanaan APBN Regional Sumsel	15
III.2 Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi (Konsolidasi Pemda)	36
III.3 Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian	53
Boks B: Pengaruh Transfer ke Daerah terhadap Ketimpangan Fiskal Horizontal	56

Bab IV **Kesimpulan dan Rekomendasi**

IV.1 Kesimpulan

59

IV.2 Rekomendasi

59

Daftar Grafik

Bab I

1.1 Share PDRB Lapangan Usaha	4
1.2 Pendidikan Angkatan Kerja Sumsel (%)	4
1.3 Share PDRB Kab/Kota Sumsel	4

Bab II

2.1 Pertumbuhan Ekonomi Sumsel (%)	7
2.2 Pertumbuhan PDRB Pengeluaran (%)	7
2.3 Neraca Perdagangan Sumsel (USD Miliar)	8
2.4 Leading Sector PDRB Sumsel	8
2.5 Perkembangan Inflasi Sumsel (% ,yoy)	9
2.6 Tingkat Pengangguran	9
2.7 Tingkat Kemiskinan Sumsel	9
2.8 Gini Ratio Sumsel	10
2.9 Sebaran Penduduk Miskin Sumsel	10
2.10 Perkembangan NTP Sumsel	10
2.11 Perkembangan IPM Sumsel	11

Bab III

3.1 Pendapatan Perpajakan 2021-2023	16
3.2 Penerimaan Perpajakan Per Jenis Pajak	16
3.3 Penerimaan Perpajakan per Sektor 2022- 2023	17
3.4 Penerimaan Bea Cukai 2022-2023 per jenis	18
3.5 Realisasi PNBPN 2022-2023	18
3.6 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat 2021- 2023	18
3.7 Realisasi Belanja Pegawai 2021-2023	19
3.8 Realisasi Belanja Barang 2021-2023	19
3.9 Realisasi Belanja Modal 2021-2023	20
3.10 Realisasi Belanja Bansos 2021-2023	20
3.11 Realisasi 15 KL Terbesar 2023	21
3.12 Realisasi per Fungsi 2023	
3.13 Progres Kinerja TKD Lingkup Sumatera Selatan 2018-2022	21
3.14 Perbandingan Pagu DAK Fisik Sumsel per Pemda TA 2023	23
3.15 Realisasi Penyaluran DAK Fisik Sumsel 2022 dan 2023	23

3.16 Tren Realisasi Belanja Satker BLU di Sumsel	27
3.17 Proporsi Sumber Dana Belanja 2023	27
3.18 Nilai Maturity Rating Satker BLU Tahun 2021	28
3.19 Nilai Maturity Rating Satker BLU Tahun 2022	28
3.20 Tren Penyaluran KUR per Triwulan tahun 2021 s.d. 2023	29
3.21 Penyaluran Pembiayaan UMi per Triwulan	32
3.22 Nilai Realisasi Anggaran Ketahanan Pangan Sumsel 2021-2023	35
3.23 Perkembangan Realisasi Per Jenis Pendapatan Daerah	37
3.24 Perkembangan Realisasi Per Jenis PAD	37
3.25 Perkembangan Local Tax Ratio & Bouyancy	38
3.26 Share Realisasi Per Jenis terhadap Total Pajak Daerah Tahun 2023	39
3.27 Perkembangan Realisasi Per Jenis Retribusi Daerah	40
3.28 Perkembangan Realisasi Per Jenis Pendapatan Transfer	41
3.29 Share Realisasi Per Jenis Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023	41
3.30 Share Realisasi Per Jenis DBH Tahun 2023	42
3.31 Realisasi Per Jenis LLPDiS tahun 2023	43
3.32 Perkembangan Realisasi Per Jenis Belanja Daerah	43
3.33 Perkembangan Share Realisasi Per Jenis Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah	44
3.34 Share Per Komponen Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Pegawai 2023	45
3.35 Perkembangan Rasio alokasi Belanja Pegawai dan Rasion DAU	45
3.36 Share Per Komponen Belanja Barang terhadap Total Belanja Pegawai 2023	45
3.37 Perkembangan Realisasi Per Jenis Belanja Modal	46
3.38 Perkembangan Share Belanja Daerah Menurut Fungsi	47
3.39 Share Belanja Menurut Fungsi Tahun 2023	48
3.40 Perkembangan Surplus/Desfisit APBD	48
3.41 Perkembangan Realisasi Per Komponen Penerimaan Pembiayaan	49
3.42 Perkembangan Realisasi Per Komponen Pengeluaran Pembiayaan	49
3.43 Perkembangan Pendapatan Konsolidasian Tahun 2019-2023	54
3.44 Perkembangan Belanja Konsolidasian Tahun 2019-2023	55

Daftar Tabel

Bab I	1.1 Indikator Kinerja Tahun 2023	3
Bab II	2.1 Perkembangan NTP Subsektor Sumsel	10
	2.2 Capaian Kinerja Makro Kesra Sumsel Tahun 2023	12
Bab III	3.1 Realisasi APBN Regional Sumatera Selatan 2021-2023	15
	3.2 Realisasi Penyaluran TKDD Wilayah Sumsel s.d. 2019, 2022-2023	22
	3.3 Realisasi DBH Pajak Bumi dan Bangunan per Pemda TA 2023	22
	3.4 Realisasi DID Tambahan Kinerja per Pemda TA 2023	25
	3.5 Realisasi DD per Pemda TA 2023 Lingkup Sumatera Selatan	26
	3.6 Realisasi PNBPU BLU 2023	27
	3.7 Penyaluran KUR Per Skema Tahun 2021 s.d. 2023	29
	3.8 Penyaluran KUR per Sektor Tahun 2021 s.d. 2023	30
	3.9 Penyaluran KUR berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021 s.d. 2023	31
	3.10 Penyaluran Pembiayaan UMi Per Penyalur Tahun 2021 s.d. 2023	32
	3.11 Pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan Grup Sektor	32
	3.12 Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021 s.d. 2023	33
	3.13 <i>I-Account</i> Realisasi APBD Tahun 2021-2023	36
	3.14 Rekap Profil BLUD Lingkup Sumatera Selatan TA 2023	50
	3.15 Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Provinsi Sumsel Tahun 2022 dan 2023	53
	3.16 Porsi Realisasi Belanja Konsolidasian Tahun 2019 s.d. 2023	55
	3.17 Perkembangan Surplus/Defisit Konsolidasian Tahun 2019 – 2023	55

Tim Penyusun

Pengarah/Penanggung Jawab
Rahmadi Murwanto

Ketua/Reviewer
Setiyo Budi Pramono

Anggota/Penyusun
Yessi Marseilli
Suntari
Riedho Hizwar
Yudho Bintoro Sandi
M. Telly Anggra Syaputra
Nur Rahma Kartika
Nurrahman
Rahman Taufik
Jaka Trisna
Samsu Rizal
Suandi
Rizky Novrianto
Roso Edi Sucipto
A'rsyil A'zim
Nazizo Ramus
Tomi Afriyanto

Desain & Layout
Bisma Satriareswara Wahyuperdana
Zuhrotul Fahmi
Ananda Hearty Davina

Ringkasan Eksekutif

Sebagai kajian yang fokus pada evaluasi dan analisis atas implementasi kebijakan fiskal di daerah, Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2023 ini disusun untuk melihat bagaimana keterkaitan antara implementasi kebijakan fiskal, baik dari APBN maupun APBD, dengan pencapaian outcome yang terwujud dalam capaian perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sumsel. Untuk mengukur kinerja dalam melihat capaian dari prioritas pembangunan tahun 2023, telah ditetapkan sasaran dan target sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumsel Tahun 2023.

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir bagi Pemerintah Provinsi Sumsel dalam melaksanakan RPJMD 2019-2023 yang diselaraskan dengan RPJMN 2020-2024. Sebagai penjabaran arah kebijakan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumsel tahun 2023 ditetapkan RKPD Tahun 2023 bertema “Sumsel Maju untuk Semua” dengan prioritas pembangunan daerah melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan wilayah berbasis lingkungan dan tata ruang, serta reformasi birokrasi dan stabilitas daerah. Sedangkan yang menjadi isu strategis di Provinsi Sumsel tahun 2023 adalah percepatan penurunan angka kemiskinan dan stunting, pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui peningkatan produktivitas pertanian, investasi, industri, perdagangan, UMKM dan pariwisata, peningkatan infrastruktur yang merata, pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana, serta optimalisasi reformasi birokrasi dan stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam).

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan, Provinsi Sumsel menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari faktor ekonomi, sosial, politik, lingkungan, maupun institusional. Hal yang fundamental bagi perumusan kebijakan fiskal yang efektif dan efisien adalah kemampuan daerah dalam memetakan tantangan-tantangan daerah yang dihadapi baik dari sisi ekonomi, sosial-

kependudukan, maupun tantangan lain di wilayahnya agar intervensi kebijakan fiskal melalui program prioritas daerah dapat mengatasi tantangan tersebut.

Tantangan perekonomian Sumsel adalah ketergantungan pada sektor primer yang merupakan kontributor terbesar PDRB. Tantangan lainnya adalah kualitas SDM yang masih rendah, tercermin dari angkatan kerja yang berpendidikan rendah (SD dan SMP). Selain itu aktivitas ekonomi Sumsel masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu yang tercermin dari kondisi ketimpangan antar wilayah yang berada pada kategori tinggi. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal juga menjadi tantangan tersendiri. Merujuk pada hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2022, dari 18 Pemerintah Daerah di wilayah Sumsel, baru 2 Pemda yang mendapatkan predikat baik, yaitu Pemprov. Sumsel dan Pemkab. Muara Enim.

Secara umum, capaian makro kesejahteraan menunjukkan peningkatan pada hampir seluruh indikator, namun masih terdapat target dalam RKPD 2023 yang belum tercapai yaitu angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Sumsel pada tahun 2023 mencapai 5,08%, sudah berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,05% namun masih di bawah target yang ditetapkan pemerintah daerah Sumsel yang sebesar 5,8%-6,5%. Tiga sektor yang menjadi kontributor terbesar PDRB Sumsel Tahun 2023 adalah sektor Pertambangan, sektor Industri Pengolahan, serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Indikator kinerja makro ekonomi yang berhasil dicapai sesuai target adalah tingkat inflasi, angka kemiskinan, dan pengangguran. Sedangkan indikator kinerja yang sudah melampaui target adalah Rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka stunting, serta Nilai Tukar Petani (NTP).

Dari sisi fiskal APBN, Pendapatan Negara tahun 2023 tercapai 111,85% dari target atau tercatat sebesar Rp19,91 triliun atau tumbuh sebesar 12,85% (yoy), dan realisasi Belanja Negara tercatat 100,2% senilai

Rp50,46 triliun, atau tumbuh 9% dari realisasi tahun 2022. Adapun kinerja realisasi TKD Sumsel menunjukkan tren fluktuatif. Realisasi TKD Sumsel Tahun 2023 mencapai 101,36% (Rp 34,32 triliun), dan menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Dari sisi fiskal APBD, realisasi pendapatan APBD tahun 2023 sebesar Rp40,65 triliun atau 99,24% dari target APBD. Realisasi pendapatan APBD tersebut berasal dari PAD sebesar Rp8 triliun, Pendapatan Transfer Rp32,09 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp555 miliar. Sementara itu, belanja APBD tahun 2023 terealisasi Rp41,64 triliun atau 100,38% dari pagu yang terdistribusi dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Kinerja pelaksanaan APBN maupun APBD di wilayah Sumatera Selatan pada tahun 2023 yang positif diharapkan dapat terus berlanjut pada tahun berikutnya. Dengan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, niscaya seluruh sasaran pembangunan Sumsel dapat mencapai target yang ditetapkan dan pada akhirnya pembangunan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Dashboard

Kinerja Fiskal Regional

s.d. 30 Desember 2023

📍 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pendapatan

TA 2022

19.738,02M

122,44%



TA 2023

22.273,95M

111,85%

Belanja

TA 2022

46.368,49M

93,54%



TA 2023

50.548,13M

108,66%

📍 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan

TA 2022

42.960,60M

109,77%



TA 2023

40.657,89M

99,24%

Belanja

TA 2022

41.698,42M

105,02%



TA 2023

41.648,10M

100,38%

Pembiayaan

TA 2022

2.038,88M

360,20%



TA 2023

2.531,68M

88,65%



Indikator Makro Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi %, RHS



Indikator Kesejahteraan

Kemiskinan



Gini Ratio



Tingkat Pengangguran Terbuka



Nilai Tukar Pertani



Indeks Pembangunan Manusia





Bab 1

Lokasi Museum Negeri Balaputra Dewa, Palembang

Foto Rizky Novrianto



BAB I

Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah

BAB I Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah

I.1. Pendahuluan

Pemerintah, selaku penyelenggara negara, mendapatkan mandat oleh konstitusi untuk melaksanakan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menciptakan dan memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam melaksanakan mandat tersebut, pemerintah diberikan kewenangan untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Salah satu instrumen yang dimiliki oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional adalah kebijakan fiskal. Sebuah instrumen yang merupakan alat utama bagi pemerintah untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai negara yang menganut sistem otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, tanggung jawab pelaksanaan pembangunan tidak hanya terletak pada pemerintah pusat, melainkan juga pada pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah menjadi faktor yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta menghasilkan output dan outcome yang optimal.

I.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan tahun terakhir bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023. Arah kebijakan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumsel tahun 2023 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang bertema "Sumsel Maju Untuk Semua", dengan mengusung 4 (empat)

prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi;
3. Pembangunan infrastruktur dan wilayah berbasis lingkungan dan tata ruang;
4. Reformasi birokrasi dan stabilitas daerah.

Adapun yang menjadi isu strategis di Provinsi Sumsel pada tahun 2023 adalah:

1. Percepatan penurunan angka kemiskinan dan stunting;
2. Pengembangan kualitas sumber daya manusia yang madani dan berprestasi;
3. Pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui peningkatan produktivitas pertanian, investasi, industri, perdagangan, UMKM, dan pariwisata;
4. Peningkatan infrastruktur yang merata, pelestarian lingkungan, dan penanggulangan bencana;
5. Optimalisasi reformasi birokrasi dan stabilitas Polhukhankam.

Untuk memberikan ukuran kinerja dalam melihat capaian dari prioritas pembangunan dan respon atas isu strategis, Pemerintah Daerah Provinsi Sumsel menetapkan indikator kinerja tahun 2023, yang diantaranya:

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8 - 6,5
2	Inflasi (%)	2 - 4
3	Rasio Gini (Ratio)	0,350
4	Pendapatan Per Kapita	62.067
5	Kemiskinan (%)	11,59 - 12,66
6	Pengangguran (%)	3,06 - 4,22
7	IPM (Indeks)	73,09
8	Stunting (%)	20,5 - 22,5
9	Nilai Tukar Petani	100,2

Sumber: RKPD Provinsi Sumsel 2023

I.3. Tantangan Pembangunan

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan, Provinsi Sumsel menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang dapat menghambat atau memperlambat pelaksanaan pembangunan. Tantangan-tantangan tersebut dapat berasal dari faktor ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan institusional.

1.3.1. Ketergantungan Terhadap Sektor Primer

Perekonomian Sumsel masih sangat bergantung dengan sektor primer sebagai kontributor terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumsel. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, lebih dari 35% PDRB Sumsel berasal dari sektor Pertanian, Kehutanan, & Perikanan dan Pertambangan & Pengalihan.

Grafik 1.1 Share PDRB Lapangan Usaha (%)



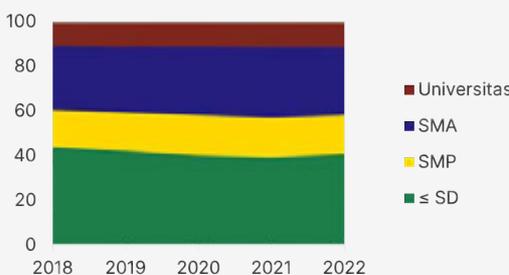
Sumber: BPS Sumsel 2024 (diolah)

Ketergantungan yang cukup tinggi tersebut tentunya menjadi tantangan bagi perekonomian Sumsel karena sektor primer memberikan nilai tambah yang tidak optimal terhadap perekonomian. Selain itu, tantangan juga muncul dari karakteristik dari sektor primer seperti sektor pertambangan yang rentan terhadap gejolak harga dan permintaan global, serta sektor pertanian yang terpengaruh oleh kondisi perubahan iklim yang mengakibatkan terganggunya produktivitas petani.

1.3.2. Angkatan Kerja Berpendidikan Rendah

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam upaya mempercepat proses pembangunan di suatu daerah.

Grafik 1.2 Pendidikan Angkatan Kerja Sumsel (%)



Sumber: BPS Sumsel 2024 (diolah)

Dilihat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, lebih dari 50% angkatan kerja di Sumsel berpendidikan SD dan SMP,

dengan mayoritas berpendidikan SD yang sebesar 41,08% dari total angkatan kerja.

1.3.3. Aktivitas Ekonomi Terkonsetrasi Pada Wilayah Tertentu

Sumsel menjadi provinsi yang memiliki tren pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 5% (yoy). Namun jika dilihat hingga ke level Kab/Kota, terlihat adanya ketimpangan ekonomi antar wilayah tersebut. Merujuk pada hasil kajian Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Willamson Sumsel tahun 2022, yaitu indeks yang menggambarkan kondisi ketimpangan antar wilayah, berada pada kategori tinggi yaitu di angka 0,860. Ditinjau dari angka PDRB tahun 2022, 62,33% dari total PDRB Sumsel hanya disumbang oleh 3 Kab/Kota, yaitu Palembang yang merupakan ibukota provinsi, Muara Enim sebagai penghasil batubara, dan Musi Banyuasin sebagai penghasil minyak bumi dan gas.

Grafik 1.3 Share PDRB Kab/Kota Sumsel (%)



Sumber: BPS Sumsel 2024 (diolah)

1.3.4. Reformasi Birokrasi Belum Optimal

Tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi salah satu faktor penentu baik tidaknya kinerja pembangunan suatu daerah. Oleh karenanya, pemerintah terus melakukan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan melalui program reformasi birokrasi yang berfokus dalam menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN. Merujuk pada hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2022, dari 18 Pemerintah Daerah di wilayah Sumsel, baru 2 Pemda yang mendapatkan predikat baik, yaitu Pemprov. Sumsel dan Pemkab. Muara Enim.



Bab

II



Lokasi Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang

Foto Rizky Novrianto



BAB II

Perkembangan Ekonomi Regional

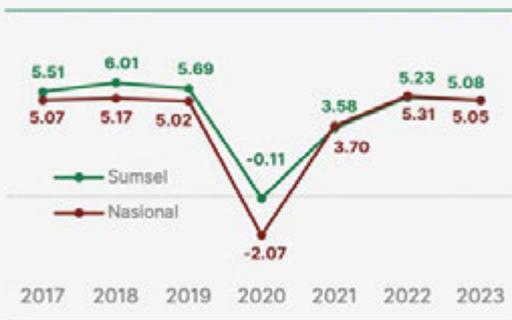
BAB II Perkembangan Ekonomi Regional

II.1 Perkembangan Indikator Makroekonomi

II.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional, perekonomian Sumsel tahun 2023 mampu menunjukkan kinerja yang positif dan kuat ditengah risiko ketidakpastian, baik yang berasal dari global maupun domestik.

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Sumsel (%)



Sumber: BPS Sumsel 2024

Pertumbuhan ekonomi Sumsel tahun 2023 tercatat tumbuh sebesar 5,08% (CtC), sedikit lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2022 yang sebesar 5,23% (CtC). Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Sumsel tersebut lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,05% (CtC) dan tertinggi kedua di kawasan Sumatera setelah Kep. Riau yang tumbuh sebesar 5,20% (CtC).

II.1.1.1. PDRB Pengeluaran

Konsumsi rumah tangga, sebagai pendorong utama perekonomian Sumsel tercatat tumbuh sebesar 5,27% (CtC) di tahun 2023. Beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuhnya konsumsi rumah tangga tersebut adalah kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), laju inflasi yang terkendali, dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Selain itu, baiknya perkembangan konsumsi rumah tangga Sumsel tidak terlepas dari peran pemerintah yang terus menjaga daya beli masyarakat melalui APBN seperti kebijakan pemberian bantuan sosial berupa bantuan beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino untuk merespon kenaikan harga beras yang terjadi akibat dampak El Nino.

prioritas pembangunan daerah, yaitu:

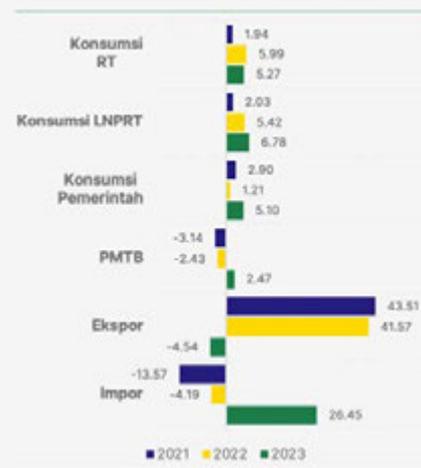
1. Meningkatkan kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi;
3. Pembangunan infrastruktur dan wilayah berbasis lingkungan dan tata ruang;
4. Reformasi birokrasi dan stabilitas daerah.

Adapun yang menjadi isu strategis di Provinsi Sumsel pada tahun 2023 adalah:

1. Percepatan penurunan angka kemiskinan dan stunting;
2. Pengembangan kualitas sumber daya manusia yang madani dan berprestasi;
3. Pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui peningkatan produktivitas pertanian, investasi, industri, perdagangan, UMKM, dan pariwisata;
4. Peningkatan infrastruktur yang merata, pelestarian lingkungan, dan penanggulangan bencana;
5. Optimalisasi reformasi birokrasi dan stabilitas Polhukhankam.

Untuk memberikan ukuran kinerja dalam melihat capaian dari prioritas pembangunan dan respon atas isu strategis, Pemerintah Daerah Provinsi Sumsel menetapkan indikator kinerja tahun 2023, yang diantaranya:

Grafik 2.2 Pertumbuhan PDRB Pengeluaran (%)



Sumber: BPS Sumsel 2024

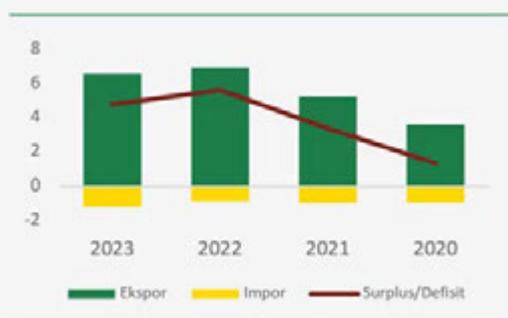
Konsumsi pemerintah Sumsel tahun 2023 tumbuh positif sebesar 5,1% (CtC). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 1,21% (CtC). Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong utama tumbuhnya konsumsi pemerintah di Sumsel tersebut

adalah adanya peningkatan alokasi belanja pemerintah pusat dan daerah yang digunakan untuk peningkatan pelayanan publik dan persiapan pemilihan umum.

Pada tahun 2023 Konsumsi Lembaga Non-Profit (LNPRT) tumbuh positif sebesar 6,78% (CtC). Peningkatan aktivitas partai politik di tahun pemilihan umum menjadi faktor utama yang mempengaruhi Konsumsi LNPRT tersebut.

Setelah mengalami kontraksi di tahun 2022, kinerja investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Sumsel tahun 2023 berhasil mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,47% (CtC). Pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional, seperti pembangunan bendungan tiga dihaji, jalan tol Betung - Bayung Lencir, jaringan irigasi Lematang, dan Lempuing, menjadi faktor pendorong tumbuhnya kegiatan investasi di Sumsel.

Grafik 2.3 Neraca Perdagangan Sumsel (USD miliar)



Sumber: BPS Sumsel 2024

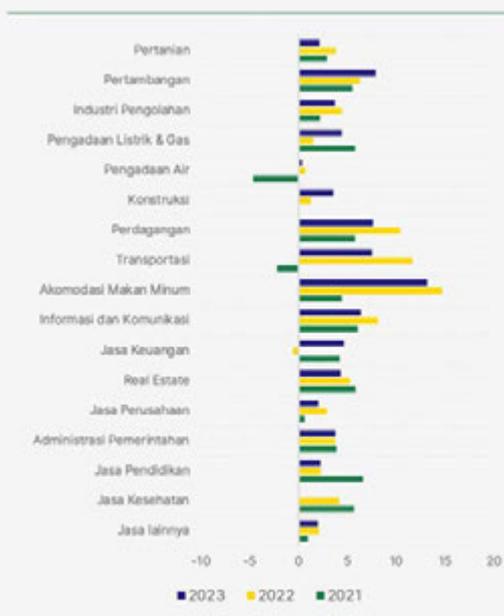
Neraca perdagangan Sumsel pada tahun 2023 mencatatkan surplus sebesar USD5,42 miliar, lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar USD6,08 miliar. Tren pelemahan ekonomi global dan normalisasi harga komoditas unggulan ekspor seperti CPO dan batubara menahan laju pertumbuhan ekspor Sumsel yang pada tahun 2023 mengalami kontraksi sebesar 4,54% (CtC). Sementara impor Sumsel tahun 2023 mengalami pertumbuhandua digit yaitu 26,45% (CtC) didorong oleh impor barang modal yaitu mesin dan peralatan mekanis dan bagiannya yang memiliki porsi 55,96% dari total impor Sumsel.

II.1.1.2. PDRB Lapangan Usaha

Dari sisi lapangan usaha, hampir semua sektor mengalami pertumbuhan yang positif, kecuali sektor jasa kesehatan yang tumbuh negatif sebesar 0,02% (CtC)

dipengaruhi oleh situasi pandemi yang berakhir di pertengahan tahun 2023.

Grafik 2.4 Leading Sector PDRB Sumsel (%)



Sumber: BPS Sumsel 2024

Sektor pertambangan masih menjadi kontributor terbesar dalam PDRB Sumsel. Pada tahun 2023, sektor pertambangan tumbuh sebesar 7,89% (CtC), lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2022 yang sebesar 6,28% (CtC). Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan aktivitas pertambangan batubara dan lignit yang tumbuh 19,30% (CtC), yang menjadi indikasi masih tingginya permintaan komoditas unggulan Sumsel tersebut ditengah normalisasi harga di tahun 2023. Pertumbuhan sektor pertambangan ini juga mendorong pertumbuhan industri pengolahan batubara yang pada tahun 2023 tumbuh sebesar 3,61% (CtC).

Mobilitas penduduk yang meningkat di tahun 2023 setelah mengalami pandemi sampai dengan pertengahan tahun 2022 menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan di beberapa sektor lapangan usaha seperti sektor perdagangan, transportasi, dan penyediaan akomodasi dan makan minum yang masing-masing tumbuh sebesar 7,60% (CtC), 7,48% (CtC) dan 13,14% (CtC). Peningkatan pada sektor tersebut juga mendorong pertumbuhan pada industri pengolahan makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 5,89% (CtC).

Sektor pertanian yang menjadi sektor penyerap terbesar tenaga kerja Sumsel

tumbuh sebesar 2,15% (CtC).

Pertumbuhan tersebut utamanya didorong oleh subsektor tanaman perkebunan yang tercatat tumbuh sebesar 5,04% (CtC).

II.1.2. Inflasi

Inflasi Sumsel pada tahun 2023 terkendali dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi, yaitu 3,17% (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 5,94% (yoy), namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 2,61% (yoy).

Grafik 2.5 Perkembangan inflasi Sumsel (% , yoy)



Sumber: BPS Sumsel 2024

Laju inflasi Sumsel sepanjang tahun 2023 dominan dipengaruhi oleh kenaikan harga pada beberapa komoditas volatile food, seperti beras, cabai merah, dan bawang putih, yang mengalami gangguan pasokan akibat adanya fenomena El Nino. Sementara itu, pada komponen administered price, peningkatan tarif air minum PDAM dan kenaikan harga rokok kretek filter menjadi pendorong utama dari laju inflasi. Di sisi lain, pergerakan inflasi pada komponen inti cenderung stabil, dengan kenaikan harga emas sebagai komoditas pendorong inflasi.

II.2. Perkembangan Indikator Kesejahteraan

II.2.1. Tingkat Pengangguran

Grafik 2.6 Tingkat Pengangguran Sumsel



Sumber: BPS Sumsel 2024

Kondisi ketenagakerjaan di wilayah Sumsel menunjukkan tren yang terus membaik. Per Agustus 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumsel berada di angka 4,11%, turun jika dibandingkan kondisi per Agustus 2022 yang sebesar 4,63%.

Kondisi ketenagakerjaan Sumsel yang membaik tersebut sejalan dengan perkembangan ekonomi Sumsel yang berada dalam tren positif. Selama periode Agustus 2022 – Agustus 2023, sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar terjadi pada sektor pengangkutan & pergudangan yang sebesar 63,28ribu orang. (bisa dilihat perkembangan subsektor), Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar terjadi pada sektor administrasi pemerintahan yang turun sebesar 39,30 ribu orang.

Per Agustus 2023, mayoritas tenaga kerja Sumsel berada di sektor informal yaitu mencapai 62,97% dari total tenaga kerja. Hal tersebut juga tercermin dari distribusi penduduk bekerja Sumsel yang 44,71% berada di Sektor pertanian dan 39,68% merupakan lulusan SD ke bawah. Berdasarkan wilayah, mayoritas pengangguran berada di daerah perkotaan.

II.2.2. Kemiskinan dan Ketimpangan

Tingkat kemiskinan Sumsel mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu berada di angka 11,78% per Maret 2023, turun dari September 2022 yang sebesar 11,95%.

Grafik 2.7 Tingkat Kemiskinan Sumsel



Sumber: BPS Sumsel 2024

Faktor yang mempengaruhi perbaikan kondisi kemiskinan Sumsel tersebut antara lain adalah laju inflasi Sumsel yang mengalami perlambatan terutama pada komponen volatile food yang menjadi komoditas penyumbang terbesar pada garis kemiskinan Sumsel dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang

menjadi program unggulan Sumsel dalam mengendalikan harga maupun pasokan pangan di Sumsel.

Perbaikan kondisi kemiskinan Sumsel juga terlihat dari Indeks Kedalaman (P1), yang pada Maret 2023 berada di indeks 1,724, turun dari September 2022 yang sebesar 1,789. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan penduduk miskin pasca dampak pandemi Covid-19. Namun, Indeks Keparahan (P2) Sumsel mengalami peningkatan dari 0,386 pada September 2022 menjadi 0,393 di Maret 2023. Peningkatan tersebut menjadi indikasi bahwa terdapat pelebaran ketimpangan antar penduduk miskin di Sumsel.

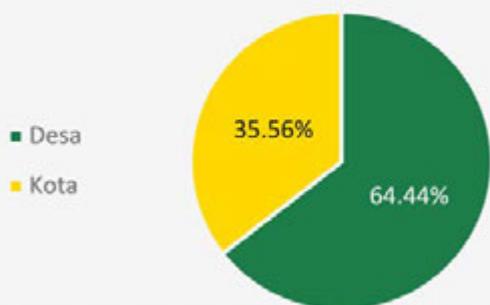
Grafik 2.8 Gini Ratio Sumsel



Sumber: BPS Sumsel 2024

Sementara itu, kondisi ketimpangan Sumsel per Maret 2023 mengalami pelebaran jika dibandingkan kondisi per September 2022. Gini Ratio Sumsel pada Maret 2023 meningkat menjadi 0,338 dari sebelumnya 0,330 pada September 2022. Pelebaran ketimpangan tersebut terjadi di wilayah perkotaan, sementara wilayah pedesaan mengalami penurunan ketimpangan. Jika dilihat sebaran berdasarkan wilayah, jumlah penduduk

Grafik 2.9 Sebaran Penduduk Miskin Sumsel



Sumber: BPS Sumsel 2024

miskin Sumsel lebih banyak berada di daerah pedesaan yaitu sebanyak 673,98 ribu orang atau mencapai 64,44% dari total penduduk miskin yang sebanyak 1,04 juta orang.

II.2.3. Nilai Tukar Petani

Kesejahteraan petani Sumsel mengalami tren peningkatan sejak awal tahun 2023. Nilai Tukar Petani (NTP) Sumsel per Desember 2023 berada di angka 109,62, meningkat 9,29% dibandingkan kondisi akhir tahun 2022. Peningkatan tersebut disebabkan lebih tingginya kenaikan Indeks Terima Petani (It) yang sebesar 14,60% dibandingkan Indeks Bayar Petani yang sebesar 5,29%.

Grafik 2.10 Perkembangan NTP Sumsel



Sumber: BPS Sumsel 2024

Dilihat dari subsektor, peningkatan terbesar terjadi pada subsektor Tanaman Pangan yang tumbuh sebesar 14,96% (yoy). Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh Indeks Terima Petani (It) pada kelompok padi yang meningkat sejalan dengan peningkatan harga gabah kering panen (GKP) Petani Sumsel sebesar 45,56% (yoy) atau Rp4.500/kg menjadi Rp6.550/kg.

Tabel 2.1 Perkembangan NTP Subsektor Sumsel

Subsektor	NTP	NTP	Growth
	Des 2022	Des 2023	
Pangan	88,74	102,02	14,79%
Hortikultura	92,31	102,39	10,92%
Perkebunan	104,14	112,65	8,17%
Peternakan	102,66	98,80	-3,76%
Perikanan	106,83	109,07	2,10%

Sumber: BPS Sumsel 2024

Peningkatan NTP juga terjadi pada tiga subsektor lainnya, yaitu hortikultura yang tumbuh 10,92% (yoy), perkebunan 8,17% (yoy), dan perikanan sebesar 2,10% (yoy). Sementara subsektor peternakan mengalami pertumbuhan negatif -3,76%

(yoy) dan menjadi subsektor yang mengalami defisit diakhir tahun 2023.

Untuk Indeks Bayar Petani, yang menjadi penyebab utama adalah kenaikan pada indeks kelompok konsumsi rumah tangga dan biaya produksi dan penambahan barang modal.

II.2.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel secara gradual terus mengalami peningkatan sejalan dengan positifnya perkembangan kinerja perekonomian Sumsel.

IPM Sumsel tahun 2023 berada diangka 73,18, berada dalam kategori tinggi, meningkat 0,96% dibandingkan tahun 2022. Namun demikian, IPM Sumsel masih lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM Nasional yang sebesar 74,39.

Grafik 2.11 Perkembangan IPM Sumsel



Sumber: BPS Sumsel 2024

Dilihat dari dimensi pembentuk IPM, peningkatan terjadi disemua dimensi. Kenaikan tertinggi terjadi pada dimensi Pengeluaran Perkapita yang meningkat sebesar 3,26% (yoy), diikuti Rata-rata Lama Sekolah sebesar 1,55% (yoy). Selanjutnya Angka Harapan Hidup mengalami peningkatan sebesar 0,38% (yoy) dan Harapan Lama Sekolah meningkat 0,63% (yoy).

II.3. Reviu Capaian Kinerja Makro Kesra Regional

II.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Sumsel pada tahun 2023 yang sebesar 5,08% (CtC) belum mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Sumsel 5,8% - 6,5%. Namun demikian, capaian ini berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,05% (CtC). Faktor dominan yang menahan laju pertumbuhan ekonomi

Sumsel di tahun 2023 adalah kinerja ekspor yang tidak setinggi tahun 2022. Ekspor Sumsel pada tahun 2023 tercatat tumbuh negatif sebesar 4,54% (CtC) yang dipengaruhi oleh normalisasi harga komoditas unggulan Sumsel.

II.3.2. Inflasi

Inflasi Sumsel pada tahun 2023 berada di angka 3,17% (yoy), berada dalam rentang target Pemda Sumsel 2% - 4%. Meskipun masih dalam rentang target, angka inflasi tersebut berada di atas angka inflasi nasional yang sebesar 2,61% (yoy). Kenaikan harga komoditas beras menjadi pendorong utama inflasi Sumsel di tahun 2023. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang terjadi di tahun 2023.

II.3.3. Kemiskinan dan Ketimpangan

Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Sumsel pada tahun 2023 masih berdasarkan data rilis BPS per Maret 2023. Tingkat Kemiskinan Sumsel berada di angka 11,78% berada di rentang target dan rasio gini di angka 0,338, lebih baik dari yang ditargetkan. Kondisi perekonomian yang lebih baik di tahun 2023 pasca pandemi menjadi faktor penyebab membaiknya kondisi kemiskinan dan ketimpangan Sumsel.

II.3.4. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Sumsel per Agustus 2023 berada di angka 4,11%, berada dalam rentang yang ditargetkan oleh Pemda Sumsel. Angka tersebut juga lebih baik jika dibandingkan dengan periode Agustus 2022 yang sebesar 4,63%. Peningkatan aktivitas ekonomi Sumsel pasca berakhirnya pandemi Covid 19 di pertengahan tahun 2022 merupakan faktor penyebab membaiknya kondisi ketenagakerjaan Sumsel.

II.3.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel tahun 2023 berada di angka 73,18, melampaui target Pemda Sumsel yang diangka 73,09. IPM tersebut meningkat 0,97% dibandingkan IPM 2022. Semua dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan di tahun 2023. Namun IPM tersebut masih dibawah IPM nasional yang sebesar 74,39.

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Makro Kesra Sumsel Tahun 2023

No.	Sasaran	Target	Realisasi	Keterangan
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8 – 6,5	5,08	Belum Mencapai Target
2	Inflasi (%)	2 – 4	3,17	Sesuai Target
3	Rasio Gini (Ratio)	0,350	0,338	Melampaui Target
4	Kemiskinan (%)	11,59 – 12,66	11,78%	Sesuai Target
5	Pengangguran (%)	3,06 – 4,22	4,11%	Sesuai Target
6	IPM (Indeks)	73,09	73,18	Melampaui Target
7	Stunting (%)	20,5 – 22,5	18,6%	Melampaui Target
8	Nilai Tukar Petani	100,2	109,52	Melampaui Target

Sumber: RKPD Sumsel 2023 dan BPS Sumsel 2024

III.3.6. Stunting

Angka Prevalansi Stunting Sumsel per tahun 2022 yang dirilis di tahun 2023 berada di angka 18,6%, jauh melampaui target Pemerintah Daerah Sumsel yang diangka 20,5 – 22,5. Dan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, angka stunting Sumsel mengalami penurunan yang signifikan dari angka 24,8%.

II.3.7. Nilai Tukar Petani

NTP Sumsel pada akhir tahun 2023 tercatat di angka 109,52, melampaui target Pemerintah Daerah Sumsel yang di angka 100,2.

Membairnya NTP di mayoritas sektor pertanian menjadi penyebab meningkatnya NTP Sumsel di tahun 2023, terutama didorong NTP dari sektor tanaman pangan yang mengalami kenaikan indeks terima petani akibat kenaikan harga Gabah Kering Panen di level petani.

Boks A

Pengaruh Penyaluran KUR terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil analisis dalam kajian fiskal regional Kanwil DJPb Sumsel tahun 2022, sektor industri pengolahan menjadi sektor potensial tertinggi yang diukur berdasarkan analisis tipologi kelas. Sektor ini dapat berkembang pesat ke depan karena memberikan nilai tambah bagi produk, menyerap tenaga kerja sebanyak 267,85 ribu orang atau sebesar 6,24% dari total tenaga kerja. Sektor industri pengolahan berpotensi besar dalam memberikan ungkitan bagi pertumbuhan ekonomi di Sumsel. Sektor industri pengolahan tidak terlepas dari peran aktivitas ekonomi yang dilakukan UMKM. Dalam menjalankan usahanya, akses terhadap modal/pembiayaan bagi UMKM begitu krusial. Salah satu kebijakan pemerintah dalam memberikan dukungan kepada UMKM dilaksanakan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pada tahun 2023, dilakukan analisis dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh penyaluran KUR terhadap pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan melalui analisis regresi linear sederhana pada lingkup 17 Kabupaten/Kota di wilayah Sumsel dengan tahun observasi dari 2017 s.d. 2021.

Hasil analisis menunjukkan bahwa KUR berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor industri pengolahan di Sumsel. Hal ini terlihat dari nilai $p\text{-value} < \alpha=5\%$, selain itu hasil dari koefisien determinasi menunjukkan bahwa KUR berpengaruh positif dimana setiap penambahan 1 pada KUR akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 97,47.

Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor yang potensial berkembang di wilayah Sumsel ditengah tantangan struktur ekonomi Sumsel yang masih bergantung pada sektor primer khususnya pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian. Melalui dukungan penyaluran KUR yang lebih diprioritaskan kepada pelaku usaha di sektor industri pengolahan, hal ini akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Sumsel ke depan. Pemerintah di lingkup Sumsel dapat memaksimalkan peran Bank Pembangunan Daerah Sumsel untuk melakukan berbagai terobosan dalam penyaluran KUR yang dapat mendukung sektor industri pengolahan di tiap kabupaten/kota.

Bab

III

Lokasi **Monumen Perjuangan Rakyat**

Foto **Bagian Umum Kanwil DJPb Prov. Sumsel**



BAB III

Analisis Fiskal Regional

BAB III Analisis Fiskal Regional

III.1 Pelaksanaan APBN Regional Sumsel

Pada tahun 2023, indikator kesejahteraan dan ekonomi di Sumatera Selatan menunjukkan perbaikan dan arah yang positif. Hal ini selaras dengan kinerja APBN di regional Sumatera Selatan yang mengalami pertumbuhan di sisi pendapatan maupun belanja. Pendapatan negara di tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar 111,85%

(y.o.y), pertumbuhan terjadi pada sisi penerimaan pajak dan PNBPN namun melambat dari penerimaan bea cukai. Secara umum pertumbuhan Pendapatan Negara di Sumatera Selatan dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin pulih. Hal ini terlihat dari peningkatan penerimaan pajak dan PNBPN selama 3 tahun berturut-turut.

Tabel 3.1 Realisasi APBN Regional Sumatera Selatan 2021–2023

Uraian	2021			2022			2023		
	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%
Pendapatan Negara	14,289.32	15,843.45	110.88%	16,432.27	19,738.01	120.12%	19,914.82	22,273.96	111.85%
Perpajakan	12,745.97	13,585.16	106.58%	14,529.54	17,323.88	119.23%	17,827.37	18,802.51	105.47%
Penerimaan Pajak	12,643.94	13,162.95	104.10%	14,066.41	16,727.03	118.91%	17,552.61	18,504.76	105.4%
Bea Cukai	102.03	422.21	413.81%	463.13	596.85	128.87%	274.76	297.75	108.4%
PNBPN	1,543.35	2,258.29	146.32%	1,902.73	2,414.13	126.88%	2,087.45	3,471.45	166.30%
Belanja Negara	44,875.69	44,044.85	98.15%	49,569.79	46,368.50	93.54%	50,464.11	50,558.77	100.2%
Belanja Pemerintah Pusat	15,043.09	14,353.15	95.41%	14,333.36	13,856.50	96.67%	16,972.37	16,232.60	95.64%
Belanja Pegawai	5,056.90	5,056.18	1.00	5,303.92	5,226.19	98.53%	5,240.75	5,197.34	99.17%
Belanja Barang	5,659.41	5,277.86	0.93	5,502.66	5,300.83	96.33%	6,729.27	6,488.74	96.43%
Belanja Modal	4,309.10	4,001.43	0.93	3,506.57	3,309.27	94.37%	4,977.03	4,521.27	90.84%
Belanja Bantuan Sosial	17.68	17.68	1.00	20.21	20.21	100.00%	25.32	25.25	99.72%
Transfer ke Daerah	29,832.60	29,691.70	99.53%	35,236.43	32,512.00	92.27%	33,491.74	34,326.17	102.49%
Dana Bagi Hasil	9,136.29	9,134.95	100.0%	14,769.18	12,533.00	84.86%	12,760.52	13,540.99	106.12%
Dana Alokasi Umum	11,561.95	11,561.95	100.0%	11,569.80	11,569.80	100.00%	12,254.41	12,240.01	99.88%
DAK Fisik	1,907.58	1,811.87	95.0%	1,843.26	1,687.76	91.56%	1,568.36	1,512.26	96.42%
DAK Non Fisik	4,193.34	4,153.39	99.0%	4,211.15	3,882.87	92.20%	4,165.99	4,122.83	98.96%
Dana Insentif Daerah	341.35	341.35	100.0%	288.19	288.19	100.00%	245.68	250.14	101.82%
Dana Desa	2,692.09	2,688.20	99.9%	2,554.85	2,550.38	99.82%	2,496.78	2,569.30	102.90%
Hibah ke Daerah	408.11	262.81	64.4%	-	-	0.00%	85.53	90.64	105.98%
Surplus/defisit	(30,586.37)	(28,201.40)	92.2%	(33,137.52)	(26,630.49)	80.36%	(30,549.29)	(28,284.81)	92.59%

Sumber : OMSPAN (diolah)

Belanja negara di tahun 2023 juga mengalami pertumbuhan sebesar 9,0% (y.o.y) sebagai dampak peningkatan realisasi yang terjadi pada Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Ke Daerah. Salah satu kontributor peningkatan realisasi belanja pemerintah adalah pelaksanaan tahapan persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan pembangunan beberapa proyek infrastruktur yang menjadi bagian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masih akan berlanjut di tahun 2024. Di sisi Transfer ke Daerah (TKD), dengan diterbitkannya Undang-Undang

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), menjadi concern baru pelaksanaan penyaluran Transfer ke Daerah.

Peningkatan kualitas layanan publik dasar dan mengurangi ketimpangan fiskal vertikal dan horizontal di daerah menjadi tujuan utama dalam penyaluran transfer ke daerah. Pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) diharapkan dapat mendorong perbaikan terhadap indikator-indikator pembangunan di

Sumatera Selatan sehingga pemerintah melalui belanja negara sebagai salah satu instrumen di dalam APBN dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

III.1.1. Pendapatan Negara

III.1.1.1. Pendapatan Perpajakan

Pendapatan perpajakan s.d 31 Desember 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar 8,54% (y.o.y). Penerimaan perpajakan mengalami peningkatan realisasi selama 3 tahun terakhir (2021-2023).

Pertumbuhan terjadi pada penerimaan pajak sebesar 10,63% (y.o.y) namun terjadi perlambatan pada penerimaan bea cukai sebesar -50,11% (y.o.y).

Grafik 3.1 Pendapatan Perpajakan 2021-2023 (dalam Triliun Rupiah)



Sumber : Kanwil DJP Sumsel Babel, Kanwil DJBC Sumbagtim (diolah)

III.1.1.1.1. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak di regional Sumatera Selatan s.d 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp18,50 T atau 105,4% dari target. Penerimaan pajak mengalami pertumbuhan 10,63% dari tahun sebelumnya (y.o.y). Jika dilihat dari jenis pajak, kontribusi penerimaan didominasi oleh pajak penghasilan (PPh) sebesar 44,06% dan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 42,20%. Sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan serta pajak lainnya berkontribusi masing-masing sebesar 12,71% dan 1,03%

Untuk realisasi per jenis pajak, pajak penghasilan terealisasi sebesar Rp8,15 T atau 101,19% dari target dan tumbuh sebesar 1,43% (y.o.y). Pajak pertambahan nilai terealisasi sebesar Rp7,81 T atau

108,2% dari target dan tumbuh sebesar 16,32% (y.o.y). Pajak Bumi dan Bangunan terealisasi sebesar Rp2,35 T atau 113,4% dari target dan tumbuh sebesar 30,4% (y.o.y). Pajak lainnya terealisasi sebesar Rp204,6 M atau 92,7% dari target atau tumbuh sebesar 11,7% (y.o.y).

Grafik 3.2 Penerimaan Perpajakan Per Jenis Pajak 2022-2023 (dalam Triliun Rupiah)

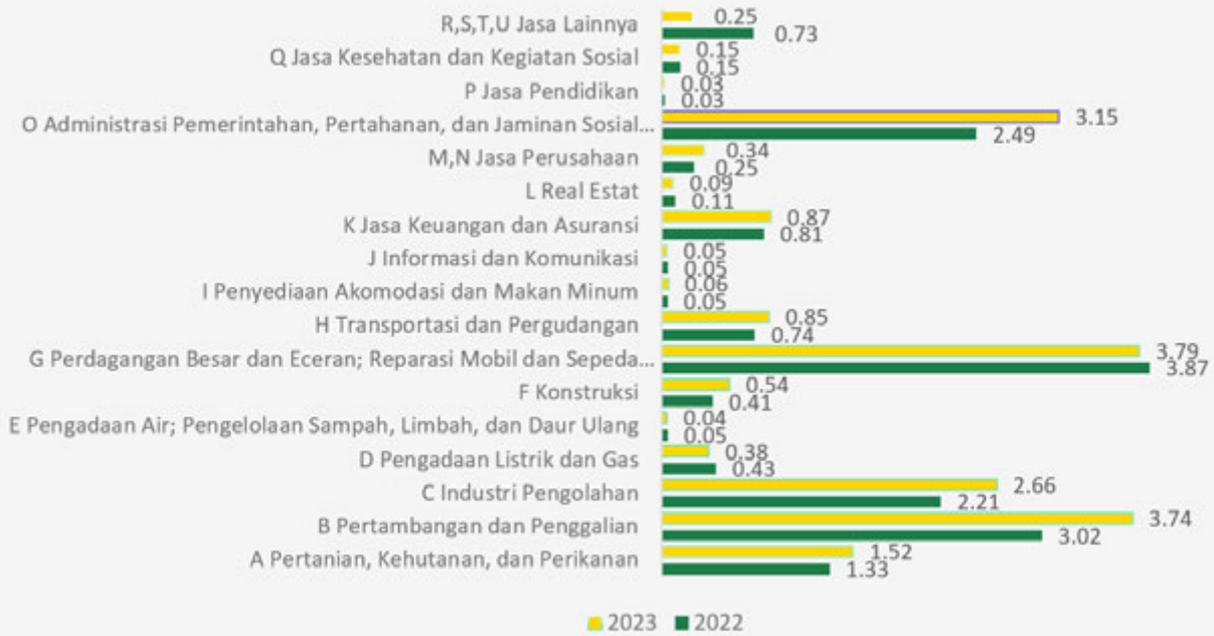


Sumber : Kanwil DJP Sumsel Babel (diolah)

Secara umum setiap jenis pajak mengalami pertumbuhan positif dan melampaui target yang telah ditetapkan. Tiga dari kelompok jenis pajak tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 2 digit (PPh, PPN, dan PBB) Pertumbuhan positif tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumsel yang terus positif, implementasi berbagai kebijakan yang mendorong penerimaan pajak, serta digitalisasi proses bisnis perpajakan.

Dari penerimaan pajak per sektor, tertinggi terdapat pada perdagangan besar dan eceran sebesar Rp3,79 T, sedangkan terendah terdapat pada sektor jasa pendidikan sebesar Rp0,03T Pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor konstruksi sebesar 33,12% (y.o.y) dan terendah terdapat pada jasa lainnya -66,02% (y.o.y).

Grafik 3.3 Penerimaan Perpajakan per Sektor 2022-2023 (dalam Triliun Rupiah)



Sumber : Kanwil DJP Sumsel Babel (diolah)

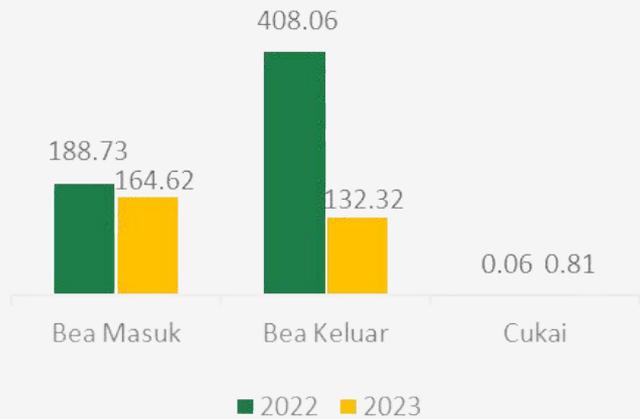
III.1.1.1.2. Penerimaan Bea dan Cukai

Penerimaan bea dan cukai di Sumatera Selatan s.d 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp297,75 M (108,4% dari target) dan mengalami kontraksi sebesar -50,11% (y.o.y).

Dari jenis penerimaan, penerimaan bea masuk terealisasi sebesar Rp164,62M (102,27% dari target) namun terkontraksi sebesar -12,77% (y.o.y). Kontraksi bea masuk dikarenakan semakin meningkatnya impor barang yang menggunakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pada tahun 2023 yaitu pemberian keringanan bea masuk yang diberlakukan untuk barang impor atau barang rakitan yang akan diekspor. Penerimaan bea keluar terealisasi sebesar Rp132,32 M (116,28%) namun terkontraksi sebesar -67,57% (y.o.y).

Kontraksi bea keluar dikarenakan penurunan harga komoditas CPO yang berdampak kepada turunnya tarif bea keluar. Untuk penerimaan cukai terealisasi sebesar Rp0,81 M atau tumbuh sebesar 1.244,48% (y.o.y), dikarenakan adanya penindakan rokok ilegal.

Grafik 3.4 Penerimaan Bea Cukai 2022-2023 Per Jenis (dalam Milyar Rupiah)



Sumber : Kanwil DJBC Sumbagtim (diolah)

III.1.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sumatera Selatan s.d 31 Desember 2023 sebesar Rp 3,47 T (166,30% dari target) atau tumbuh sebesar 43,98% (y.o.y).

Pertumbuhan terjadi pada 2 jenis PNBP yaitu PNBP BLU dan PNBP Lainnya. PNBP BLU terealisasi sebesar Rp1,78 T (112,16% dari target) tumbuh 15,02% (y.o.y) dan PNBP lainnya terealisasi sebesar Rp1,68 T (339,82% dari target) tumbuh 95,57% (y.o.y).

Penerimaan PNBP BLU didorong oleh penerimaan layanan pendidikan dan layanan jasa Kesehatan Rumah Sakit. Peningkatan penerimaan pada layanan pendidikan dikarenakan telah ditetapkannya satker BLU Politeknik Sriwijaya dan Politeknik Kesehatan Palembang. Salah satu kontributor peningkatan penerimaan layanan kesehatan Rumah Sakit dikarenakan penerimaan klaim layanan kesehatan yang berasal dari BPJS.

Penerimaan PNBP lainnya (PNBP KL) didorong oleh meningkatnya layanan jasa kepelabuhanan yang disebabkan kegiatan bongkar muat kapal dan peningkatan pendapatan kepolisian yang berasal dari penerbitan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Grafik 3.5 Realisasi PNBP 2022-2023 (dalam Triliun Rupiah)



Sumber: OMSPAN (diolah)

III.1.2. Belanja Negara

III.1.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi belanja pemerintah pusat pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif dan signifikan dibanding tahun 2022 dengan realisasi s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp16,23T (95,88% dari pagu), tumbuh positif 17,15% (y.o.y). Pertumbuhan belanja pemerintah pusat dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional seperti jalan tol Simpang Betung-Tempino, Bendungan Tiga Dihaji, Jaringan Irigasi Lematang dan Jaringan Irigasi Lempuing. Selain itu, alokasi dana untuk pelaksanaan tahap persiapan Pemilu tahun 2024 memberikan dorongan besar terhadap belanja pemerintah pusat di Sumatera Selatan.

Grafik 3.6 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat 2021-2023 (dalam Triliun Rupiah)



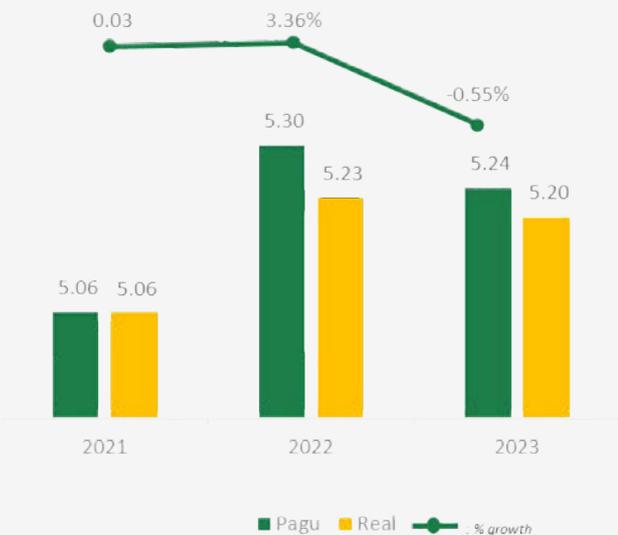
Sumber: OMSPAN (diolah)

III.1.2.2. Belanja Negara Per Jenis Belanja

III.1.2.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai lingkup Sumatera Selatan s.d 31 Desember 2023 sebesar Rp5,19T (99,17% dari pagu), terkontraksi sebanyak -0,55% (y.o.y). Belanja pegawai dipergunakan untuk membayar gaji, tunjangan kinerja, uang makan, dan sebagainya. Kontraksi belanja pegawai disebabkan oleh kebijakan mutasi pada satuan kerja TNI/POLRI, selain hal tersebut kebijakan pembayaran gaji pegawai untuk satuan kerja Kementerian Keuangan dan PUPR secara terpusat juga mempengaruhi realisasi belanja pegawai tersebut.

Grafik 3.7 Realisasi Belanja Pegawai 2021-2023 (dalam Triliun Rupiah)



Sumber: OMSPAN (diolah)

III.1.2.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang lingkup Sumatera Selatan s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp6,48 T (96,43% dari pagu), tumbuh sebesar 22,41% (y.o.y). Belanja barang dipergunakan untuk layanan operasional perkantoran, layanan ke masyarakat untuk satuan kerja BLU, belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, dan sebagainya. Pertumbuhan belanja barang dimaksud dikontribusi oleh belanja pelaksanaan tahap persiapan Pemilu tahun 2024 pada satuan kerja KPU dan Bawaslu, operasional layanan pendidikan dan Kesehatan pada satuan kerja BLU serta realisasi belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat pada satuan kerja PUPR.

Grafik 3.8 Realisasi Belanja Barang 2021-2023 (dalam Triliun Rupiah)



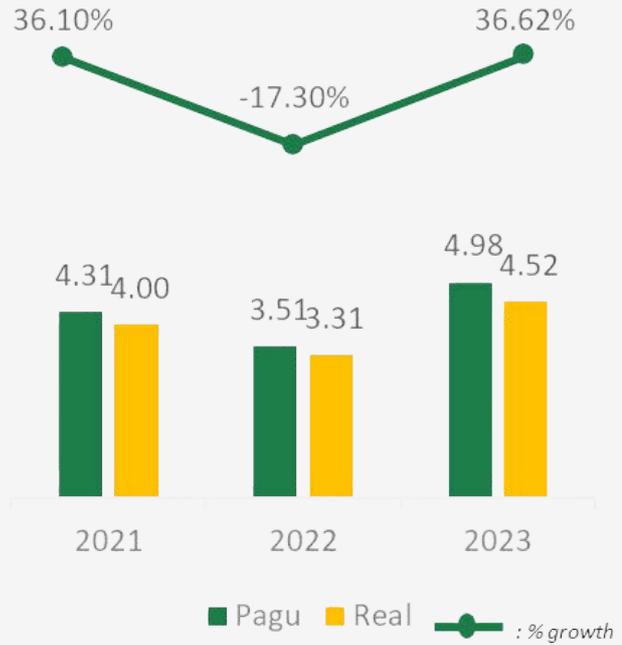
Sumber: OMSPAN (diolah)

III.1.2.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal s.d 31 Desember 2023 sebesar Rp4,52 T (90,84% dari pagu), tumbuh 36,62% (y.o.y). Belanja modal dipergunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi seperti infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air minum dan sebagainya. Selain itu adanya pembangunan Proyek Strategis Nasional yaitu Bendungan Tiga Dihaji, Jalan Tol Sp.Betung-Tempino dan Jaringan Irigasi Lematang menjadi dorongan besar terhadap realisasi belanja modal.

Selain itu, realisasi proyek revitalisasi Danau Teloko, jaringan irigasi di Sumatera Selatan, pembangunan fly over Simpang Sekip dan Gelumbang, pembangunan serta beberapa rehabilitasi jalan dan jembatan turut menjadi pendorong realisasi belanja modal.

Grafik 3.9 Realisasi Belanja Modal 2021-2023 (dalam Triliun Rupiah)



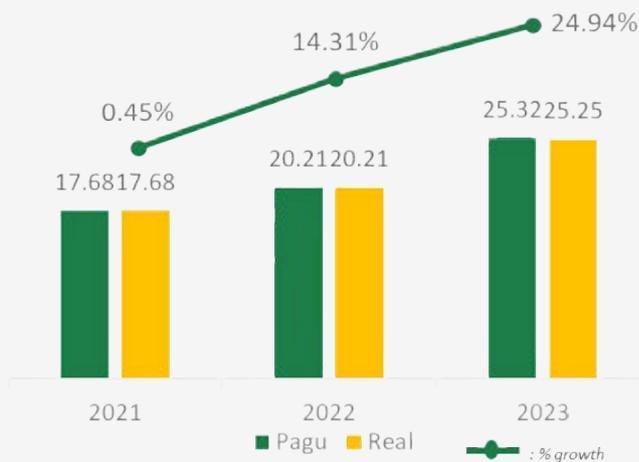
Sumber: OMSPAN (diolah)

III.1.2.2.3. Belanja Bansos

Belanja Bantuan Sosial s.d 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp25,25 M (99,72% dari pagu), tumbuh 24,94% (y.o.y). Di Sumatera Selatan belanja Bantuan Sosial diperuntukkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada UIN Raden Fatah Palembang dan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) pada satuan kerja Sentra Budi Perkasa.

Pertumbuhan belanja dikarenakan percepatan realisasi belanja bansos pada satuan kerja Sentra Budi Perkasa sehingga penerima bantuan lebih cepat diterima. Namun di tahun 2023, realisasi bansos tidak mencapai 100% karena adanya mahasiswa penerima KIP Kuliah yang tidak masuk dalam kategori penerima.

Grafik 3.10 Realisasi Belanja Bansos 2021-2023 (dalam Triliun Rupiah)



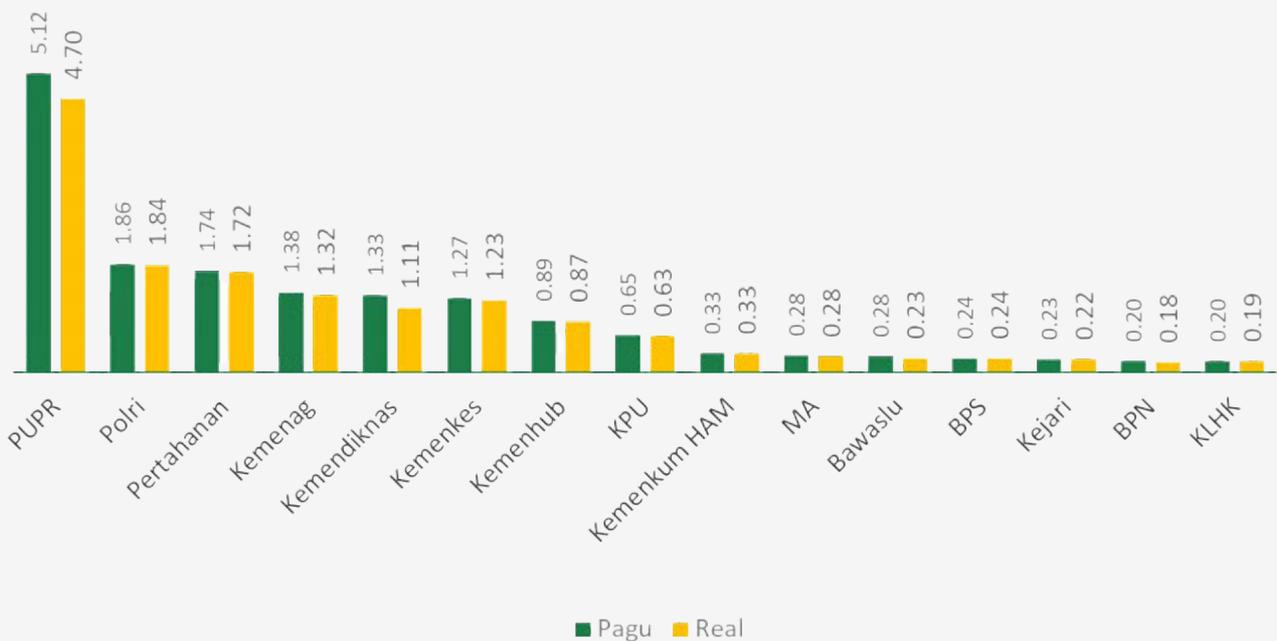
Sumber: OMSPAN (diolah)

III.1.2.3. Belanja Negara per Organisasi

Dari 15 Kementerian/Lembaga yang memiliki pagu besar, alokasi tertinggi berada di Kementerian PUPR. Alokasi terendah terdapat pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2023, KPU, Bawaslu dan PUPR mengalami peningkatan pagu secara signifikan di tahun 2023. Peningkatan pagu untuk Bawaslu dan KPU dikarenakan pelaksanaan tahapan persiapan Pemilu tahun 2024. Sedangkan PUPR dikarenakan adanya alokasi pagu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kinerja realisasi tertinggi terdapat pada Badan Pusat Statistik (99,52%) dan Kementerian Hukum dan HAM (99,48%). Realisasi terendah terdapat pada Kementerian PUPR (91,71%).

Grafik 3.11 Realisasi 15 KL Terbesar 2023 (dalam Triliun Rupiah)



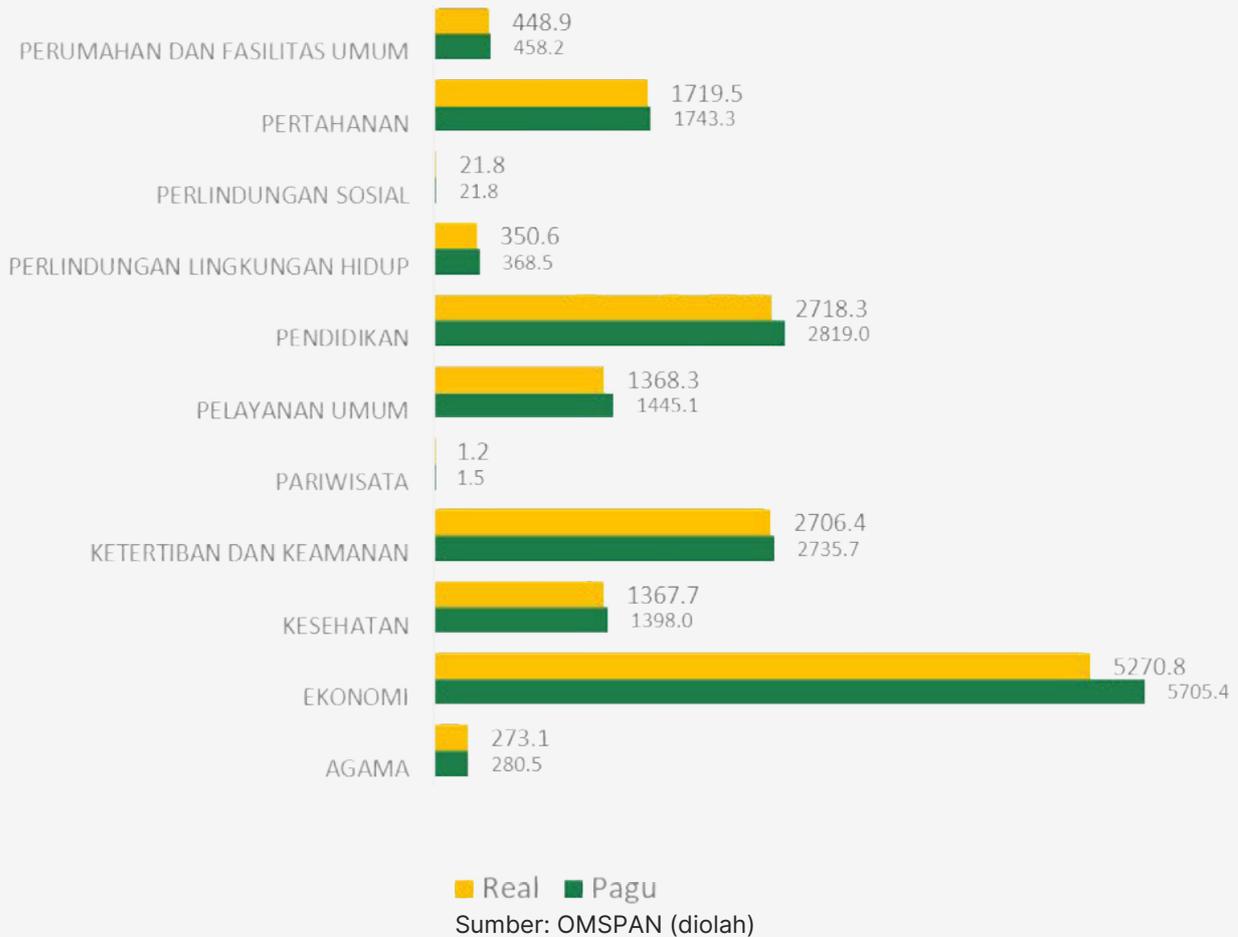
Sumber: OMSPAN (diolah)

III.1.2.4. Belanja Negara per Fungsi

Dari 11 fungsi APBN di Sumatera Selatan, realisasi tertinggi s.d 31 Desember 2023 terdapat pada fungsi ekonomi sebesar Rp5,27 T (92,38% dari pagu). Realisasi terendah terdapat pada fungsi pariwisata sebesar Rp1,19M (80,74% dari pagu).

Pertumbuhan terbesar terdapat pada fungsi ekonomi yaitu sebesar 48,85% (y.o.y) dan kontraksi terbesar terdapat pada fungsi pelayanan umum yaitu sebesar -79,68% (y.o.y). Pertumbuhan pada sektor ekonomi dikarenakan dorongan belanja terbesar pemerintah di Sumatera Selatan yang berasal dari kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan tahap persiapan Pemilu 2024.

Grafik 3.12 Realisasi Per Fungsi 2023 (dalam Triliun Rupiah)



III.1.3. Transfer TKDD

Grafik 3.13 Progres Kinerja TKD Lingkup Sumatera Selatan 2018 – 2022 (Rp miliar)



Sampai dengan 31 Desember 2023 Kinerja Realisasi TKD se-Sumsel mencapai 101,36% (Rp 34,32 triliun), dan menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Realisasi TKD Sumsel menunjukkan tren fluktuatif, dan terendah terjadi pada TA. 2022 yaitu hanya mencapai 92,27%.

Pada tahun 2020 terjadi penurunan alokasi pagu akibat kebijakan refocusing anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Walaupun terdapat pengurangan pagu, namun kinerja realisasi di tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan secara berkesinambungan.

Tabel 3.2 Realisasi Penyaluran TKDD Wilayah Sumsel s.d 2019. 2022-2023 (Rp Triliun)

Jenis TKDD	Per 31 Des 2019 (Pra Pandemi)			Per 31 Des 2022			Per 31 Des 2023			Growth	Growth 2019-2023
	APBN-P	REAL	%	APBN-P	REAL	%	APBN-P	REAL	%		
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	33.20	32.01	96.43	28.57	32.51	113.80	33.78	34.23	101.35	5.30	6.94
A. Dana Transfer Umum	23.70	22.84	96.39	19.67	24.10	122.52	25.30	25.78	101.91	6.96	12.87
- DBH	10.69	9.84	92.03	8.10	12.53	154.67	13.04	13.54	103.81	8.03	37.67
- DAU	13.01	13.00	99.96	11.57	11.57	100.00	12.25	12.24	99.88	5.79	-5.88
B. Dana Transfer Khusus	6.43	6.10	94.93	6.05	5.57	92.01	5.74	5.64	98.17	1.16	-7.66
- Dana Alokasi Khusus Fisik	2.19	2.08	95.11	1.84	1.69	91.56	1.57	1.51	96.42	-10.40	-27.29
- Dana Alokasi Khusus NonFisik	4.24	4.02	94.84	4.21	3.88	92.20	4.17	4.12	98.82	6.18	2.49
C. Dana Insentif Daerah	0.39	0.39	100.00	0.29	0.29	100.00	0.25	0.25	101.82	-13.20	-35.89
D. Dana Desa	2.68	2.68	99.90	2.55	2.55	99.82	2.50	2.57	102.90	0.74	-4.18

Sumber: Simtrada (diolah)

III.1.3.1. Dana Transfer Umum(DTU)

Dalam periode 2022-2023, tren realisasi DBH menunjukkan kinerja nilai yang memuaskan. Realisasi DBH menjadi pendukung tertinggi atas capaian TKD di tahun 2023, yakni mencapai Rp13,54 triliun (103,81%) dan tumbuh 8,03% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan capaian realisasi DBH diakibatkan telah disalurkannya Kurang Bayar DBH TA 2022, terutama pada jenis DBH Pajak Bumi dan Bangunan.

Pemda Musi Banyuasin merupakan pemda dengan nilai nominal realisasi tertinggi pada total DBH Pajak Bumi dan Bangunan yang mencapai Rp933,92 milyar. Sedangkan pada Pemkot Palembang realisasi DBH Pajak Bumi dan Bangunan adalah yang terendah yaitu hanya sebesar Rp.19,50 milyar.

Tabel 3.3 Realisasi DBH Pajak Bumi dan Bangunan per Pemda TA 2023 (Rp miliar)

PEMERINTAH DAERAH	PAGU	REALISASI	%
Kab. Banyuasin	65,613,339,000.00	76,150,508,000.00	116.06%
Kab. Empat Lawang	18,523,885,000.00	21,595,821,000.00	116.58%
Kab. Lahat	213,160,586,000.00	240,479,623,000.00	112.82%
Kab. Muara Enim	476,998,494,000.00	550,369,447,000.00	115.38%
Kab. Musi Banyuasin	823,082,107,000.00	933,923,396,000.00	113.47%
Kab. Musi Rawas	197,369,879,000.00	228,391,190,000.00	115.72%
Kab. Musi Rawas Utara	69,391,449,000.00	78,534,694,000.00	113.18%
Kab. Ogan Ilir	55,022,237,000.00	63,823,022,000.00	115.99%
Kab. Ogan Komering Ilir	54,554,246,000.00	63,372,305,000.00	116.16%
Kab. Ogan Komering Ulu	78,611,908,000.00	91,054,660,000.00	115.83%
Kab. OKU Selatan	19,718,564,000.00	22,993,931,000.00	116.61%
Kab. OKU Timur	21,810,504,000.00	25,366,473,000.00	116.30%
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	434,759,012,000.00	503,675,693,000.00	115.85%
Kota Lubuk Linggau	17,134,778,000.00	19,928,478,000.00	116.30%
Kota Pagar Alam	17,939,886,000.00	20,906,535,000.00	116.54%
Kota Palembang	16,744,170,000.00	19,501,024,000.00	116.46%
Kota Prabumulih	90,874,107,000.00	105,357,319,000.00	115.94%
Provinsi Sumatera Selatan	437,128,971,000.00	543,947,829,000.00	124.44%
TOTAL	3,108,438,122,000	3,609,371,948,000	116.12%

Sumber: Simtrada (diolah)

Penyelenggaraan Sharing Session DBH pada tahun 2023 oleh Kanwil DJPb Sumsel, turut meningkatkan kesadaran atas kepatuhan dalam pemenuhan dokumen penyaluran DBH pada 18 pemda dan mendorong transparansi formulasi alokasi

DBH yang menjadi hak pemerintah daerah sehingga penyaluran DAU di Sumatera Selatan tahun 2023 mengalami peningkatan kinerja dibandingkan TA 2022, yakni sebesar 5,79%.

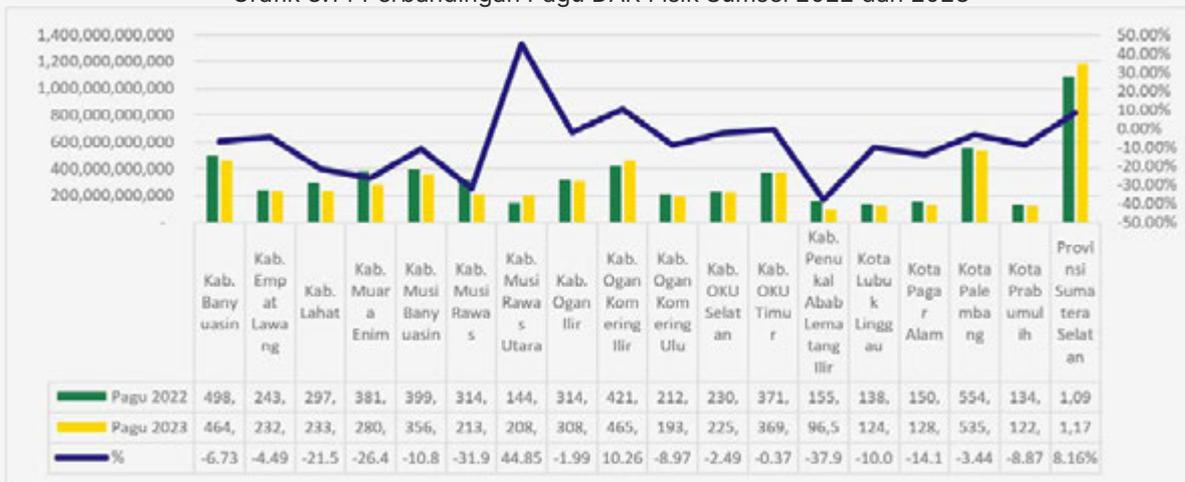
III.1.3.2. Dana Transfer Khusus (DTK)

Kinerja penyaluran DAK Fisik terus mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, secara total alokasi pagu DAK Fisik di Sumatera Selatan mengalami penurunan sebesar 5,19%. Terdapat 15 pemda yang mengalami penurunan alokasi pagu di tahun 2023. Pemkab Muara Enim merupakan pemda dengan penurunan alokasi pagu terbesar sebanyak 26,49% dibandingkan tahun 2022. Namun pada 3 pemda terdapat peningkatan pagu di tahun 2023, dibandingkan tahun 2022. Peningkatan pagu tertinggi terdapat pada Pemkab Musi Rawas Utara sebesar 44,85%.

Penurunan pagu tersebut diakibatkan mekanisme proposal-based yang diajukan pemda belum disetujui DJPK dan K/L Teknis karena:

1. Pemda telah memiliki kapasitas fiskal daerah yang cukup, sehingga dilakukan pemerataan pada daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang belum baik.
2. Alokasi yang diusulkan belum memperhatikan kepentingan daerah dan tidak fokus pada penuntasan permasalahan di daerah.
3. Usulan yang diajukan pemda masih mengacu pada lokus prioritas yang dicantumkan pada tahun lalu.
4. Pemda belum memenuhi persyaratan teknis dalam mengajukan proposal anggaran bidang yang dibiayain oleh DAK Fisik.

Grafik 3.14 Perbandingan Pagu DAK Fisik Sumsel 2022 dan 2023



Sumber: OMSPAN Per 31 Desember 2023 (diolah)

Dari alokasi Dana Transfer ke Daerah DAK Fisik untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan TA 2023 yang sebesar Rp1,59 triliun, sampai akhir TA 2023 terealisasi 96,42% atau sebesar Rp1,51 triliun.

Penyaluran tertinggi dicapai oleh Pemerintah Kab. Panukal Abab Lematang Ilir (PALI) sebesar 99,56%. Sedangkan Kota Ogan Komering Ulu merupakan pemda dengan realisasi terendah, yang hanya mencapai 84,11%.

Grafik 3.15. Realisasi Penyaluran DAK Fisik Provinsi Sumsel Per Pemda TA 2023



Sumber: OMSPAN Per 31 Desember 2023 (diolah)

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021. Realisasi tahun 2023 DAK Fisik jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dan 2021. Di tahun 2023 realisasi penyaluran mencapai 96,42% atau naik 4,86%. Sedangkan di tahun 2022, realisasi mencapai 91,56%.

Beberapa kendala yang mempengaruhi belum maksimalnya penyaluran DAK Fisik TA 2023 antara lain:

1. Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan lelang yang memakan waktu yang cukup panjang;
2. Masih terdapat deviasi antara pagu, rencana kegiatan dan kontrak;
3. Terdapat beberapa ketentuan penundaan kegiatan dari kementerian/lembaga teknis, seperti pengadaan makanan tambahan dari Kementerian Kesehatan dan pengadaan obat sirup yang batal karena berdasarkan BPOM mengandung zat yang menyebabkan gagal ginjal.
4. Terdapat kebijakan baru terkait perubahan PPN 11 %, kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan kenaikan harga bahan material sebagai akibat kenaikan harga BBM yang menyebabkan perlunya penyesuaian dalam harga dan nilai kontrak kegiatan.
5. Harga pada e-katalog lebih tinggi dari rencana kegiatan juga menjadi isu dalam pelaksanaan kegiatan di beberapa sub bidang di bidang Pendidikan di Sumatera Selatan.

Sedangkan untuk penyaluran DAK Non Fisik, mengalami tren kenaikan. Capaian realisasi DAK Non Fisik tahun 2023 mencapai 98,82% atau naik 6,62 % dari capaian di tahun 2022, yakni sebesar 92,20%.

Belum maksimalnya realisasi DAK Non Fisik diakibatkan oleh beberapa hal antara lain:

- Data guru pada info Guru/Tenaga Kependidikan (GTK) di Kemendikbudristek sering tidak valid;
- Jumlah jam mengajar tidak mencukupi jumlah minimum jam mengajar;
- Beberapa guru belum mempunyai Nomor Urut Pendidik dan Tenaga kependidikan (NUPTK) dan belum lulus S1 pendidikan guru.

Selain itu, untuk penyaluran Dana BOS dan PAUD belum berkinerja maksimal diakibatkan oleh:

1. Masih terdapat tidak salur akibat sekolah terlambat menyampaikan laporan penggunaan
2. Dihentikan penyaluran akibat perbedaan penggunaan dana BOS PAUD yang telah disalurkan dengan rencana dalam Aplikasi ARKAS yang berakibat pada temuan Inspektorat daerah.

III.1.3.3. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah (DID) TA 2023 telah tersalur sebesar Rp.250,14 miliar atau 98% dari pagu. Setiap tahun pagu DID daerah terus menurun dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena semakin detail syarat yang ditetapkan DJPK untuk pemda, sehingga pada tahun 2023 beberapa pemda yang di tahun 2022 memperoleh alokasi DID, tidak dapat memperoleh alokasi tersebut di tahun 2023.

Realisasi DID tahun 2023 hampir seluruhnya mencapai 100% hanya saja dari 14 Kab/Kota hanya terdapat satu Pemda yang tidak terelaborasi DID 100% yakni Kabupaten Banyuasin yaitu sebesar 68,77% yang disebabkan tidak menyampaikan persyaratan penyaluran tahap II sampai dengan batas waktu yang ditentukan

Tabel 3.4 Realisasi DID Tambahan Kinerja per Pemda TA 2023 (rupiah)

PEMDA	ALOKASI DID	REALISASI DID	%
KAB. OGAN KOMERING ILIR	5,781,341,000	5,781,341,000	100.00%
KAB. OGAN ILIR	15,450,437,000	15,450,437,000	100.00%
KOTA PALEMBANG	11,929,501,000	11,929,501,000	100.00%
KOTA PRABUMULIH	6,057,097,000	6,057,097,000	100.00%
KAB. MUSI RAWAS	18,344,251,000	18,344,251,000	100.00%
KAB. MUSI RAWAS UTARA	33,341,579,000	33,341,579,000	100.00%
KOTA LUBUK LINGGAU	12,715,141,000	12,715,141,000	100.00%
KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	39,675,813,000	39,675,813,000	100.00%
KAB. LAHAT	6,250,658,000	6,250,658,000	100.00%
KAB. EMPAT LAWANG	5,960,565,000	5,960,565,000	100.00%
KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	17,824,662,000	17,824,662,000	100.00%
KOTA PAGAR ALAM	42,519,633,000	42,519,633,000	100.00%
KAB. MUSI BANYUASIN	23,878,101,000	23,878,101,000	100.00%
KAB. BANYUASIN	15,138,527,000	10,411,510,500	68.77%
Total	254,867,306,000	250,140,289,500	98.15%

sumber: OMSPAN (2023)

Pada tahun 2023 terdapat empat belas pemda yang mendapatkan DID dengan total nilai sebesar Rp254,87 miliar karena berhasil mengendalikan inflasi di daerah,

III.1.3.4. Dana Desa

Alokasi Dana Desa tahun 2023 untuk tingkat Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp2,49 triliun yang dialokasikan kepada 14 kabupaten/kota Penerima Dana Desa untuk 2.853 desa. Terdapat penurunan alokasi dari tahun sebelumnya, akibat dari penyesuaian formulasi alokasi dasar dengan penambahan kriteria kluster jumlah penduduk dan 1% tambahan untuk alokasi kinerja sesuai PMK No. 190/PMK.07/2021.

Sampai dengan akhir tahun 2023, realisasi penyaluran Dana Desa mencapai 99,88%

meningkat 0,06% dari tahun 2022. Pada 7 Pemda berhasil merealisasikan penyaluran Dana Desa sebesar 100%. Pemkab OKI merupakan pemda dengan realisasi DD terendah sebesar 99,48% seperti tampak pada Tabel 3.8.

Untuk tahun 2023, belum optimalnya penyaluran Dana Desa diakibatkan masih terdapat 4 desa yang gagal salur DD di TA 2023, yakni ada 2 desa di Kab. Lahat (Desa Sukadana dan Petanang), 2 Desa di Kab. Ogan Komering Ilir (Desa Menggeris dan Pulau Betung). Gagal salur dana desa pada empat desa tersebut diakibatkan permasalahan hukum dan administrasi oleh pejabat desa serta adanya realisasi dibawah target sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan salur untuk tahap terakhir.

Tabel 3.5 Realisasi DD per Pemda TA 2023 Lingkup Sumatera Selatan (Rupiah)

Nama Pemda	Pagu	Jumlah Desa	Penyaluran		Penyerapan		Kas di RKD	% Kas di RKD	Capaian Output
			Realisasi	%	Realisasi	%			
KAB OGAN KOMERING ILIR	294,931,625,000	314	293,398,688,610	99.48	262,950,066,337	89.62	28,704,778,353	10.92%	89.08
KAB LAHAT	288,962,116,000	360	288,155,980,800	99.72	213,227,876,566	74.00	89,800,456,749	42.11%	57.89
KAB BANYUASIN	274,230,612,000	288	274,230,612,000	100.00	182,364,390,001	66.50	96,242,150,726	52.77%	47.23
KAB OKU TIMUR	264,945,327,000	305	264,660,335,450	99.89	264,363,048,720	99.89	306,102,245	0.12%	99.88
KAB MUSI BANYUASIN	227,506,520,000	227	227,448,129,600	99.97	166,875,360,896	73.37	71,117,700,412	42.62%	57.38
KAB MUARA ENIM	222,280,494,000	245	222,027,045,200	99.89	199,100,974,956	89.67	23,648,887,217	11.88%	88.12
KAB OKU SELATAN	215,750,657,000	252	215,732,217,880	99.99	176,437,429,501	81.79	38,793,367,979	21.99%	78.01
KAB OGAN ILIR	197,126,540,000	227	197,126,540,000	100.00	193,132,590,200	97.97	4,018,024,300	2.08%	97.92
KAB MUSI RAWAS	171,930,467,000	186	171,930,467,000	100.00	116,150,869,324	67.56	53,718,702,861	46.25%	53.75
KAB OGAN KOMERING ULU	130,510,487,000	143	130,350,421,350	99.88	131,823,936,277	101.13	-	0.00%	100.00
KAB EMPAT LAWANG	129,032,263,000	147	129,032,263,000	100.00	89,934,348,127	69.70	39,097,914,873	43.47%	56.53
KAB MUSI RAWAS UTARA	81,841,303,000	82	81,841,303,000	100.00	56,139,724,316	68.60	25,969,370,205	46.26%	53.74
KAB PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	62,903,377,000	65	62,903,377,000	100.00	48,341,484,459	76.85	1,781,154,022	3.68%	96.32
KOTA PRABUMULIH	10,466,952,000	12	10,466,952,000	100.00	8,736,893,500	83.47	2,822,931,710	32.31%	67.69
TOTAL	2,572,418,740,000	2,853	2,569,304,332,890	99.88	2,109,578,993,180	82.11	476,021,541,652	22.56%	77.44

sumber: OMSPAN (2023)

Sampai dengan 31 Desember 2023, penyerapan dana desa lingkup Sumatera Selatan sebesar Rp 2,11 triliun (82,11%) dari realisasi SP2D BUN. Persentase penyerapan tertinggi terdapat pada Kab. Ogan Komering Ulu, yakni sebesar 101,13%. Sedangkan persentase penyerapan terendah terdapat Kab. Banyuasin, yaitu sebesar 66,50%. Dengan penyerapan yang belum maksimal menghasilkan Kas di RKD yang belum dimanfaatkan oleh desa. Untuk wilayah Sumatera Selatan, masih terdapat Rp 476,02 miliar atau 22,56%. Masih kurangnya penyerapan di pemda dikarenakan desa dan pemda belum menginput seluruhnya data penyerapan ke aplikasi OMSPAN.

III.1.4. Surplus/Defisit APBN

Sampai dengan 31 Desember 2023, APBN Regional Sumatera Selatan mengalami defisit sebesar -Rp28,28 T. Nominal defisit tersebut mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 6,21% (y.o.y). Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan belanja pemerintah di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kinerja penerimaan negara mengalami pertumbuhan, namun realisasi belanja turut mengalami pertumbuhan.

III.1.5. Pengelolaan BLU Pusat

Berdasarkan PMK Nomor 202/PMK.05/2022, Badan Layanan Umum (BLU) beroperasi sebagai unit kerja Kementerian/Lembaga untuk tujuan memberikan layanan umum, dengan demikian BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Kementerian Negara/Lembaga. Layanan BLU juga dapat diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang mendukung stabilisasi ekonomi dan fiskal.

Pada tahun 2023 terdapat penambahan dua satker BLU baru yang sebelumnya merupakan satker pengelola PNPB pada tahun sebelumnya yaitu Politeknik Kesehatan dan Politeknik Negeri Sriwijaya sehingga sampai dengan akhir tahun 2023 terdapat 12 BLU yang terdiri dari 5 BLU rumpun kesehatan, 6 BLU rumpun pendidikan, dan 1 BLU rumpun lainnya.

Realisasi pendapatan BLU pada tahun 2023 mencapai 111,21% dari target PNPB yang telah ditetapkan sebagaimana dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Realisasi PNBPN BLU 2023 (dalam milyar Rupiah)

NAMA SATKER	Target PNBPN	Realisasi	%
RSUP DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG	741.56	824.17	111.14%
RSUP DR. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG	37.00	24.48	66.17%
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN PALEMBANG	18.00	24.21	134.49%
RUMKIT TK.II DR.AK GANI KESDAM II/SWJ	77.50	72.43	93.46%
RUMKIT BHAYANGKARA PALEMBANG	51.15	81.00	158.37%
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	27.25	2.56	9.39%
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG	107.58	141.98	131.98%
UNIVERSITAS SRIWIJAYA	402.50	470.50	116.89%
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG	21.30	27.64	129.78%
POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG	14.05	14.15	100.75%
POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG	20.99	29.12	138.72%
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA	110.84	77.20	69.64%
Total	1,629.71	1,789.44	109.80%

Sumber: OMSPAN (diolah)

Dari total alokasi APBN 2023 pada DIPA satker BLU tersebut, 62,74% dibiayai dari pendapatan BLU, yang berarti secara total hanya 37,26% yang bersumber dari rupiah murni. Realisasi belanja tahun 2023 dengan sumber dana BLU mencapai 94,41% dari pagu.

Adapun tren pagu dan realisasi belanja dengan sumber dana BLU dapat dilihat pada tabel/grafik berikut.

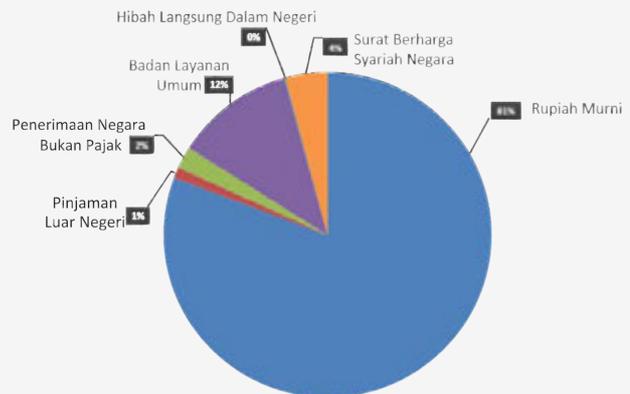
Grafik 3.16 Tren Realisasi Belanja Satker BLU di Sumsel (dalam milyar Rupiah)



Sumber: OMSPAN (diolah)

Kontribusi dari realisasi belanja BLU terhadap total belanja pemerintah pusat tahun 2023 merupakan yang terbesar kedua setelah rupiah murni sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.17 Proporsi Sumber Dana Belanja 2023



Sumber: OMSPAN (diolah)

Pendapatan BLU yang bertransmisi ke belanja BLU tersebut turut berkontribusi mendorong Bergeraknya sektor riil di Sumatera Selatan dan pada akhirnya turut mendorong pertumbuhan ekonomi Sumsel ke angka 5%.

Selanjutnya terkait tingkat kematangan BLU, berdasarkan data pada aplikasi BLU Integrated Online System (BIOS), secara rata-rata terdapat peningkatan nilai maturity rating (matrat) dari tahun 2021 ke tahun 2022 yang menggambarkan peningkatan nilai maturitas/kematangan BLU di Sumatera Selatan

Grafik 3.18 Nilai Maturity Rating satker BLU Tahun 2021.



Sumber: BIOS (diolah)

Grafik 3.19 Nilai Maturity Rating satker BLU Tahun 2022.



Sumber: BIOS (diolah)

Apabila melihat nilai rata-rata setiap aspek matrat tahun 2021 dan 2022, terdapat peningkatan nilai rata-rata pada aspek lingkungan, inovasi, tata kelola dan kepemimpinan, serta kapabilitas internal, namun terjadi penurunan nilai rata-rata pada aspek keuangan dan pelayanan. Tingkat kemandirian yang merupakan salah satu indikator dalam aspek keuangan pada penilaian matrat ini dilihat dari persentase total pendapatan (LRA) terhadap total belanja (LRA). Dari 10 BLU yang sudah mendapat penetapan nilai matrat tahun

2022 didapatkan nilai rata-rata 2,375 untuk tingkat kemandirian BLU yang berarti bahwa BLU di Sumsel masih berada pada level managed (rasio kemandirian 40%-60%). Sedangkan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan salah satu indikator pada aspek pelayanan mendapatkan nilai rata-rata 3,575 dengan rasio IKM 60%-80% (level defined). Peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan BLU ini dapat mendorong kinerja keuangan BLU sehingga pada akhirnya BLU dapat terus meningkatkan kontribusinya terhadap APBN.

III.1.6. Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat

III.1.6.1. Penerusan Pinjaman

Penerusan pinjaman merupakan salah satu instrumen investasi Pemerintah yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan oleh Pemerintah Daerah, BUMN, maupun BUMD.

Dalam periode 2023, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan melakukan penatausahaan penerusan pinjaman sejumlah 12 loan id yang dimiliki oleh dua debitur, yakni Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Outstanding piutang pada Pemerintah Kota Palembang sampai dengan 31 Desember 2023 bernilai Rp0 sehubungan dengan telah dilakukannya proses debt swap oleh Pemerintah Kota Palembang. Implementasi *Debt Swap* telah diverifikasi oleh BPKP dengan diterbitkannya Laporan Hasil Verifikasi *Debt Swap* pada Pemerintah Kota Palembang nomor LHV-035/D4.01/2015 dan LEV-310/PW07/3/2018.

Selain itu, piutang atas penerusan pinjaman pada Pemerintah Kota Palembang telah ditetapkan menjadi Piutang Pemberian Pinjaman yang telah dihapuskan bersyarat sesuai dengan Surat Direktur Sistem Manajemen Investasi Nomor S-102/PB.4/2020 hal Penyampaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKBUN Tahun 2019 BA 999.04 Pengelolaan Pemberian Pinjaman.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim, sebagai salah satu debitur penerusan pinjaman dengan nomor SLA-1225/DSMI/2009, sampai dengan 31 Desember 2023 memiliki outstanding aktif sebesar Rp65,76 miliar. Penerusan Pinjaman ini berasal dari Pinjaman Pemerintah Pusat yang diperoleh dari IBRD (International Bank of Reconstruction and development) dalam rangka pembiayaan Urban Water Supply and Sanitation Project. Pinjaman ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Kepada PDAM Lematang Enim guna membiayai sebagian pekerjaan pada PDAM dalam meningkatkan sistem pelayanan air minum di wilayah Kabupaten Muara Enim.

III.1.6.2 Kredit Usaha Rakyat

Pada tahun 2023, penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Sumatera Selatan mencapai 7,59 triliun rupiah, dengan capaian atas target penyaluran hingga 100,09% dari target sebesar 7,58 triliun. Penyaluran KUR tahun 2023 menjangkau 113.678 debitur.

Grafik 3. 20 Tren Penyaluran KUR Per Triwulan Tahun 2021 s.d. 2023 (triliun rupiah)



Sumber: sikip.kemenkeu.go.id (data diolah)

Meskipun dari sisi capaian atas target penyaluran KUR telah menunjukkan hal yang baik, namun penyaluran KUR pada tahun 2023 menunjukkan kinerja yang menurun cukup dalam jika dibandingkan dengan tahun 2022. Bahkan dari grafik tergambar bahwa penyaluran KUR pada tahun 2023 menjadi penyaluran dengan capaian terendah dalam tiga tahun terakhir baik dari sisi nominal maupun jumlah debitur.

Berdasarkan hasil monev yang telah dilakukan, beberapa faktor yang membuat penyaluran KUR di Sumatera Selatan cenderung melambat antara lain:

- Perubahan peraturan yang fundamental terkait persyaratan pemberian KUR.
- Waktu salur pada tahun 2023 yang sempit yang berkisar sekitar 10 bulan.

Penyaluran KUR di Sumatera Selatan tersalurkan melalui 4 skema yang terdiri dari KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Pekerja Migran Indonesia. Pada tahun 2023, sebagian besar KUR disalurkan melalui skema KUR Mikro dengan nominal penyaluran mencapai 4.458,20 miliar rupiah.

Jika dilihat perbandingan per tahun, penyaluran KUR mengalami penurunan pada setiap skema kecuali pada skema KUR Pekerja Migran Indonesia.

Tabel 3.7 Penyaluran KUR Per Skema Tahun 2021 s.d. 2023 (miliar rupiah)

Skema	2021		2022		2023	
	Penyaluran	Penyaluran	% Growth	Penyaluran	% Growth	
Kecil	3.521,99	4.480,74	27,22%	3.014,16	-32,73%	
Mikro	4.444,36	6.365,78	43,23%	4.458,20	-29,97%	
Super Mikro	157,32	152,05	-3,35%	114,35	-24,79%	
PMI	0,13	0,74	486,48%	1,60	116,74%	

Sumber: sikip.kemenkeu.go.id (data diolah)

Skema KUR kecil mencatatkan tingkat penurunan terbesar hingga 32,73%, diikuti oleh skema mikro yang turun sebesar 29,97%, dan skema super mikro yang turun hingga 24,79%. Disisi lain terjadi kenaikan penyaluran pada skema KUR PMI sebesar 116,74%. Namun karena jumlah penyaluran KUR PMI relatif kecil dibanding dengan total penyaluran, kenaikan tersebut belum mampu mendorong perbaikan kinerja KUR secara keseluruhan.

Beberapa isu yang menjadi faktor menurunnya kinerja penyaluran KUR di tahun 2023 meliputi:

- Adanya pembatasan pengambilan KUR berulang khususnya pada sektor perdagangan besar eceran.
- Adanya kenaikan bertahap tingkat suku bunga terhadap pengambilan KUR berulang.
- Pembebasan kewajiban agunan tambahan pada skema KUR super mikro dan KUR mikro yang memaksa pihak penyalur meningkatkan selektifitas dalam menjaring calon nasabah KUR.

Dalam upaya untuk mendorong laju pertumbuhan penyaluran KUR pada tahun 2023, pihak penyalur mencoba berbagai strategi untuk menguatkan penyaluran yang salah satunya melalui penguatan penyaluran pada skema KUR klaster. Cara ini dinilai dapat memberikan kontribusi mengingat penyaluran KUR pada kelompok usaha masyarakat memiliki ekosistem usaha yang baik, sehingga mampu menjaga kualitas kredit perbankan.

Jika dilihat lebih jauh per sektor, penyaluran KUR di wilayah Sumatera Selatan memang didominasi dari sektor pertanian, perburuan dan kehutanan yang didalamnya banyak terdapat kelompok usaha masyarakat. Penyaluran KUR pada kelompok tani menjadi alternatif target pasar yang menarik bagi para penyalur di wilayah Sumatera Selatan, khususnya pada kelompok tani sawit yang salah satu model pembiayaannya diarahkan untuk kegiatan *re-planting* sawit.

Tabel 3. 8 Penyaluran KUR Per Sektor Tahun 2021 s.d. 2023 (miliar rupiah)

Sektor	2021	2022		2023	
	Penyaluran	Penyaluran	% Growth	Penyaluran	% Growth
Pertanian, Perburuan Dan Kehutanan	3.917,24	5.620,95	43,49%	4.106,82	-26,94%
Perdagangan Besar Dan Eceran	3.055,91	3.914,17	28,09%	2.341,63	-40,18%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan Dan Perorangan Lainnya	330,29	424,69	28,58%	358,33	-15,62%
Industri Pengolahan	257,36	310,98	20,83%	210,07	-32,45%
Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	159,34	193,19	21,25%	183,13	-5,21%
Perikanan	121,92	154,03	26,34%	121,99	-20,81%
Konstruksi	96,53	148,34	53,67%	84,93	-42,75%
Transportasi, Pergudangan Dan Komunikasi	100,68	124,52	23,68%	83,84	-32,67%
Real Estate, Usaha Persewaan, Dan Jasa Perusahaan	49,01	72,14	47,19%	56,62	-21,51%
Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	31,59	28,83	-8,72%	33,25	15,30%
Jasa Pendidikan	3,68	6,14	66,78%	6,95	13,15%
Pertambangan Dan Penggalian	0,26	1,33	409,62%	0,77	-42,26%

Sumber: sikip.kemenkeu.go.id (data diolah)

Jika dilihat kinerja per tahun, sebagian besar penyaluran KUR per sektor mengalami penurunan kecuali pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Pendidikan. Penurunan tertinggi terjadi pada sektor konstruksi yang turun hingga 42,75%.

Meskipun demikian, penyaluran KUR pada sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan tetap menempati urutan tertinggi dalam angka penyaluran KUR dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Tabel 3.9 Penyaluran KUR berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021 s.d. 2023 (dalam miliar rupiah)

Kabupaten/Kota	Penyaluran		% Growth	Penyaluran	% Growth
	2021	2022		2023	
OKI	1.161,89	1.520,84	30,89%	959,57	-36,91%
Palembang	1.067,34	1.261,77	18,22%	897,10	-28,90%
Musi Banyuasin	854,65	1.167,24	36,57%	886,17	-24,08%
OKU	795,08	1.088,52	36,91%	749,26	-31,17%
Musi Rawas	706,90	1.054,74	49,21%	664,90	-36,96%
Banyuasin	835,03	976,48	16,94%	652,72	-33,16%
Muara Enim	679,35	973,95	43,36%	545,79	-43,96%
OKU Timur	291,54	400,44	37,35%	439,64	9,79%
Lahat	452,33	633,84	40,13%	429,06	-32,31%
Pagar Alam	205,83	307,97	49,63%	269,47	-12,50%
Ogan Ilir	285,35	396,62	38,99%	245,70	-38,05%
Lubuk Linggau	270,38	352,27	30,29%	208,11	-40,92%
Empat Lawang	148,26	256,99	73,34%	167,80	-34,71%
OKU Selatan	118,16	205,26	73,71%	154,46	-24,75%
Musirawas Utara	50,24	124,67	148,12%	128,35	2,96%
Prabumulih	150,26	192,92	28,39%	127,39	-33,97%
PALI	51,20	84,80	65,63%	62,84	-25,90%

Sumber: sikip.kemenkeu.go.id (data diolah)

Selanjutnya, Jika dilihat pembagiannya per wilayah, Kabupaten OKI yang menjadi salah satu wilayah dengan luas area perkebunan dan pertanian yang tinggi di Sumatera Selatan, menjadi kabupaten dengan porsi penyaluran tertinggi pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Pada tahun 2023, KUR mampu tersalurkan hingga 959,57 miliar di wilayah OKI. perkebunan kelapa sawit. Penyaluran tertinggi kedua berada di wilayah Kota Palembang yang mencatatkan penyaluran hingga 897,10 miliar pada tahun 2023.

Di sisi lain Kabupaten PALI menjadi wilayah dengan penyaluran KUR terendah pada tiga tahun terakhir. Sebagai wilayah Kabupaten pemerkan dari Muara Enim, masih dibutuhkan perluasan jaringan Lembaga Jasa Keuangan untuk dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Jika dilihat kinerjanya per tahun, kinerja penyaluran per wilayah sebagian besar mengalami penurunan penyaluran kecuali pada wilayah Kabupaten OKU Timur dan Musi Rawas Utara. Penurunan penyaluran KUR tertinggi berada di wilayah Muara Enim yang turun hingga 43,96%.

III.1.6.3 Kredit Ultra Mikro

Pembiayaan Ultra Mikro merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyediakan dukungan permodalan khususnya kepada para pelaku usaha yang berada di level terbawah atau yang biasa disebut pelaku usaha ultra mikro. Pelaku usaha ultra mikro merupakan kelompok pelaku usaha yang secara fundamental bisnis dan keuangannya belum stabil, sehingga sulit menerima akses permodalan dari Lembaga Jasa Keuangan formal.

Grafik 3.21 Penyaluran Pembiayaan UMi Per Triwulan



Sumber: sikip.kemenkeu.go.id (data diolah)

Pada tahun 2023, realisasi Pembiayaan Ultra Mikro di wilayah Sumatera Selatan mencapai 380,26 miliar rupiah yang disalurkan kepada 78.416 debitur. Kinerja penyaluran UMi mampu tumbuh sebesar 37,44% dari tahun 2022 yang mencatatkan angka 356,36 miliar. Penyaluran UMi pada tahun 2023 menjadi penyaluran dengan kinerja tertinggi dalam tiga tahun terakhir baik dari sisi nominal maupun jumlah debitur.

Penyaluran Pembiayaan UMi di Sumatera Selatan dilakukan oleh beberapa penyalur meliputi PT PNM, PT Pegadaian, PT REFI, BAV, dan KSPPS Raya Banda Madani.

Tabel 3.10 Penyaluran Pembiayaan UMi Per Penyalur Tahun 2021 s.d. 2023 (juta rupiah)

Penyalur	2021	2022	2023
PNM	285.062,58	354.549,79	359.752,91
PEGADAIAN	6.181,69	1.728,49	20.385,85
PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCE INDONESIA (REFI)	-	58,34	112,05
KSPPS RAYA BANDA MADANI	-	-	9,00
BAV	187,00	20,50	3,00

Sumber: sikip.kemenkeu.go.id (data diolah)

PT PNM secara konsisten mampu menyalurkan pembiayaan UMi tertinggi. Luasnya jaringan yang dimiliki serta penetrasi pasar yang kuat menjadi faktor pendorong keberhasilan PT PNM menyalurkan Pembiayaan UMi.

PT Pegadaian menjadi penyalur dengan kinerja penyaluran tertinggi kedua yang berhasil mencatatkan angka penyaluran pada 20,38 miliar. Selanjutnya, meskipun belum memiliki market share yang tinggi dalam porsi pembiayaan UMi, PT Refi mampu menunjukkan perkembangan yang sangat baik dengan mencatatkan pertumbuhan penyaluran.

Sampai dengan periode 2023, belum terdapat koperasi yang didirikan di Sumsel mampu menjadi penyalur UMi. Mengingat koperasi merupakan lembaga jasa keuangan yang keberadaannya sangat dekat dengan masyarakat, diharapkan dorongan pembinaan kepada koperasi untuk menjadi penyalur UMi akan semakin menguat.

Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro Sumatera Selatan di tahun 2023 hanya tersebar pada 2 grup sektor yaitu Perdagangan Besar dan Eceran dan Perikanan.

Tabel 3.11 Pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan Grup Sektor (dalam juta rupiah)

Grup Sektor	2021	2022	2023
Industri Pengolahan	4,00		
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,00		
Perdagangan Besar dan Eceran	291.247,27	356.279,78	380.150,75
Perikanan		58,34	12,05
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	156,00	0,00	

Sumber: SIKP UMi (data diolah)

Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro didominasi oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Dominasi tersebut mencapai 99,97% dari total penyaluran. Untuk ke depan diharapkan pembiayaan Ultra Mikro mampu mendorong pergerakan ekonomi di

masyarakat dan menjadi trigger bagi sektor lain untuk terus berkembang. Selanjutnya jika dilihat penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro berhasil menjangkau 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

Tabel 3.12 Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021 s.d. 2023 (dalam miliar Rupiah)

Wilayah	2021	2022	Growth	2023	Growth
Banyuasin	34,40	41,65	21,09%	37,27	-10,50%
Empat Lawang	3,25	1,94	-40,28%	12,67	552,67%
Lahat	11,02	12,70	15,25%	16,41	29,19%
Muaraenim	25,62	24,06	-6,08%	36,57	51,96%
Musi Banyuasin	23,16	37,13	60,35%	31,98	-13,89%
Musi Rawas	17,16	23,92	39,46%	24,40	2,01%
Musirawas Utara	2,41	4,42	83,82%	3,94	-10,95%
Ogan Ilir	21,45	22,60	5,39%	23,42	3,60%
Ogan Komering Ilir	22,08	26,29	19,06%	28,38	7,96%
Ogan Komering Ulu	8,05	10,89	35,33%	14,65	34,45%
Ogan Komering Ulu Selatan	5,90	10,01	69,63%	12,94	29,26%
Ogan Komering Ulu Timur	2,46	2,56	3,71%	4,38	71,52%
Penukal Abab Lematang Ilir	9,81	18,26	86,21%	24,38	33,49%
Lubuk Linggau	2,58	4,45	72,28%	6,27	41,12%
Pagar Alam	9,92	9,80	-1,27%	11,49	17,26%
Palembang	90,70	102,39	12,89%	89,48	-12,61%
Prabumulih	1,45	3,24	123,25%	1,63	-49,85%

Sumber: SIKP UMI (data diolah)

Dalam 3 tahun terakhir Kota Palembang menjadi wilayah yang paling tinggi menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro. Pada tahun 2023, Kota Palembang mampu menyalurkan sebanyak Rp89,48 miliar kepada 18.774 debitur atau sebesar 23,53% dari total penyaluran. Kemudian wilayah dengan peningkatan penyaluran tertinggi yaitu pada Kabupaten Empat Lawang dengan pertumbuhan mencapai 552,67% dibandingkan dengan penyaluran tahun lalu. Di sisi lain wilayah dengan penyaluran terendah ditempati oleh Kabupaten Prabumulih dengan jumlah penyaluran sebesar Rp1,63 miliar atau sebesar 0,43% dari total penyaluran. Kota Prabumulih juga menjadi wilayah yang mengalami penurunan penyaluran dibandingkan tahun 2022 dengan penurunan mencapai 49,85%.

Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh keragaman geografis, kemudahan mobilitas masyarakat, tingkat keamanan suatu daerah dan tingkat literasi keuangan yang dimiliki masyarakat.

Pembiayaan Ultra Mikro yang menyentuh akar rumput masyarakat mampu memberikan stimulus kepada pelaku usaha ultra mikro dalam menjaga stabilitas usaha. Pembiayaan yang diberikan dapat memperkuat fondasi finansial usaha dalam mengembangkan usaha.

III.1.7. Isu Strategis Pelaksanaan di Daerah

III.1.7.1. Kinerja Belanja Negara di Sumatera Selatan.

Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat lima arahan Presiden yaitu Pembangunan SDM, Penyederhanaan Regulasi, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Hal tersebut selaras dengan RKPD Sumatera Selatan 2302 yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi.

Untuk mewujudkan amanah rencana tersebut, APBN Regional Sumatera Selatan difokuskan untuk pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur. Hal tersebut terlihat dari penggunaan belanja negara untuk bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, perlindungan sosial dan infrastruktur di Sumatera Selatan. Peran belanja negara diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada indikator pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan.

III.1.7.1.1. Belanja Sektor Pendidikan

Belanja Sektor Pendidikan di Sumatera Selatan s.d 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp5,90 triliun, tumbuh sebesar 35,89% (y.o.y). Belanja tersebut diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas dan sarana pendidikan di Sumatera Selatan.

Belanja Pemerintah Pusat di bidang pendidikan terealisasi sebesar Rp298,58M, terdiri dari :

1. Penyaluran Bidikmisi dan KIP Kuliah sebesar Rp20,72 miliar untuk 2.022 Mahasiswa di UIN Raden Fatah Palembang;
2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Kementerian Agama (MI, MTs dan MA) sebesar Rp50,93 miliar untuk 44.243 siswa;
3. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp60,54 miliar untuk 3 Perguruan Tinggi;
4. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Non PNS sebesar Rp62,56 miliar untuk 2.732 guru;
5. Pembayaran Tunjangan Dosen Non PNS

5. Pembayaran Tunjangan Dosen Non PNS sebesar Rp103,83 miliar untuk 669 dosen.

Dari penyaluran TKD untuk bidang pendidikan telah direalisasikan sebesar Rp5,60 triliun, terdiri dari:

- DAK Fisik bidang Pendidikan salur sebesar Rp604,67 miliar untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
- Penyaluran BOS Pendidikan sebesar Rp1,74 triliun untuk 1,55 juta siswa;
- Penyaluran BOP PAUD sebesar Rp106,24 miliar untuk 175.545 siswa;
- Penyaluran BOP Kesetaraan sebesar Rp28,03 miliar untuk 19.264 siswa;
- Penyaluran DAU Bidang Pendidikan sebesar Rp1,48 triliun untuk peningkatan layanan dasar pendidikan.

III.1.7.1.2. Belanja Sektor Kesehatan

Untuk realisasi belanja negara sektor Kesehatan, s.d. 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp2,03 triliun tumbuh sebesar 86,17% (y.o.y). Belanja tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang bermutu kepada masyarakat di Sumatera Selatan.

Belanja Pemerintah Pusat untuk kesehatan terealisasi sebesar Rp214,74 miliar, terdiri dari:

- Pelatihan tenaga Kesehatan sebesar Rp1,86 miliar untuk 337 peserta;
- Penyediaan alat kontrasepsi pada 655 lembaga sebesar Rp18,79 miliar;
- Pemeriksaan sampel makanan sebanyak 699 produk sebesar Rp0,48 miliar;
- Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Pemerintah sebesar Rp186,87 miliar;
- Pelatihan penanganan stunting dan dukungan terhadap faskes KB sebesar Rp6,72 miliar.

Penyaluran TKD untuk bidang kesehatan di Sumatera Selatan telah terealisasi sebesar Rp1,81 triliun terdiri dari:

- Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan sebesar Rp0,26 triliun;
- Realisasi DAK Non Fisik untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK Puskesmas dan BOKB) sebesar Rp0,53 triliun yang disalurkan kepada 346 Puskesmas di Sumatera Selatan;
- DAU Bidang Kesehatan yang dipergunakan untuk peningkatan layanan dasar kesehatan sebesar Rp0,93 triliun.

III.1.7.1.3. Belanja Sektor Ketahanan Pangan

Untuk meningkatkan ketersediaan, akses dan kualitas pangan di Sumatera Selatan, belanja negara di Sumatera Selatan untuk ketahanan pangan s.d 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp435,48 miliar, tumbuh sebesar 15,27% (y.o.y). Realisasi anggaran ketahanan pangan selama tiga tahun terakhir terus mengalami tren peningkatan.

Grafik 3.22 Nilai Realisasi Anggaran Ketahanan Pangan Sumsel 2021-2023 (dalam Milyar Rupiah)



Sumber : OMSPAN dan SIMTRADA (diolah)

Dari belanja pemerintah pusat untuk sektor ketahanan pangan, terealisasi sebesar Rp303,55 miliar dengan peruntukan antara lain:

- Penyediaan benih berkualitas sebesar Rp2,04 miliar untuk 1,28 juta unit;
- Penyediaan bibit unggul sebesar Rp10,76 miliar untuk 1,53 juta unit;
- Penyediaan sarana dan prasarana pasca panen sebanyak 26 unit sebesar Rp5,43 miliar;
- Pembangunan jaringan irigasi sepanjang 16,24Km sebesar Rp137,58 miliar;
- Rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 5.340,83 Km sebesar Rp147,73 miliar;

Penyaluran TKD sektor ketahanan pangan terealisasi sebesar Rp131,92 miliar, dengan peruntukan antara lain:

- Penyaluran DAK Fisik Pertanian sebesar Rp80,79 miliar;
- Penyaluran DAK Fisik Irigasi sebesar Rp45,73 miliar;
- Penyaluran DAK Non Fisik bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp5,39 miliar.

III.1.7.1.4. Belanja Perlindungan Sosial

Belanja perlindungan sosial dipergunakan untuk melindungi daya beli masyarakat dengan karakteristik tertentu. Selain itu, anggaran perlindungan sosial dipergunakan untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan ekonomi masyarakat.

Realisasi anggaran perlindungan sosial di Sumatera Selatan s.d 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp367,59 miliar, yang antara lain diperuntukan untuk:

- Belanja pemerintah pusat berupa penyaluran bantuan sosial (Asistensi Rehabilitasi Sosial) berupa uang dan barang sebesar Rp9,71 miliar untuk 2.314 penerima;
- Penyaluran TKD berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada 2.852 desa sebesar Rp357,88 miliar.

III.1.7.1.5. Belanja Infrastruktur

Anggaran infrastruktur di Sumatera Selatan s.d 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp4,55 triliun. Realisasi anggaran infrastruktur antara lain terdiri dari pembangunan konektivitas infrastruktur, pengairan dan proyek strategis nasional.

Belanja pemerintah pusat untuk infrastruktur terealisasi sebesar Rp3,64 triliun, dengan peruntukan antara lain:

- Preservasi jembatan sepanjang 16.03 km sebesar Rp98,33 miliar;
- Pembangunan jembatan sepanjang 1,34 km sebesar Rp162,14 miliar;
- Preservasi jalan sepanjang 1.448,15 km sebesar Rp346,83 miliar;
- Pembangunan jalan sepanjang 105,04 km sebesar Rp282,38 miliar;
- Dukungan penanganan jalan daerah sepanjang 64,2 km sebesar Rp424,51 miliar;
- Pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 10.355 km sebesar Rp1,56 triliun;
- Rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 5.209,53 km sebesar Rp285,35 miliar;
- Pembangunan jaringan irigasi sepanjang 16,24 km sebesar Rp 137,58 miliar;

Penyaluran TKD untuk infrastruktur sebesar Rp526,59 miliar antara lain terdiri dari:

- Penyaluran DAK Fisik bidang Jalan sebesar Rp441,90 miliar;
- Penyaluran DAK Fisik bidang Irigasi sebesar Rp38,96 miliar;
- Penyaluran DAK Fisik bidang Transportasi sebesar Rp 45,73 miliar; dan
- Penyaluran DAU Bidang Pekerjaan Umum untuk peningkatan layanan dasar infrastruktur daerah sebesar Rp388,53 miliar.

III.2. Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi (Konsolidasi Pemda)

Ketercapaian target berbagai indikator makro ekonomi pada RKPD Sumsel 2023, tidak terlepas dari bagaimana fiskal APBD berperan sebagai alat untuk memastikan tujuan dan sasaran pembangunan Sumsel tercapai. Kinerja pelaksanaan APBD di Sumsel mencatatkan capaian realisasi yang tinggi dari sisi pendapatan maupun belanja. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp40,65 triliun atau 99,24% dari target.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp41,64 triliun atau 100,38% dari pagu. Namun demikian, dibandingkan tahun sebelumnya, kinerja pendapatan dan belanja daerah sedikit mengalami penurunan. Kinerja realisasi pendapatan daerah berkontraksi 5,36% (yoy) karena penurunan kinerja seluruh jenis pendapatan daerah (PAD, Transfer, dan LLPDiS). Sementara itu, kinerja realisasi belanja daerah berkontraksi 0,12% (yoy) karena penurunan kinerja belanja modal, belanja tidak terduga (BTT), dan juga belanja transfer.

Tabel 3.13 I-Account Realisasi APBD Tahun 2021-2023

I-Account (dalam Miliar Rp)	2021 (Audited)			2022 (Audited)			2023 (Unaudited)			% Growth 2022-2023
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Pendapatan Daerah	39,921.60	40,703.32	101.96%	39,137.10	42,960.60	109.77%	40,968.55	40,657.89	99.24%	-5.36%
PAD	8,412.76	7,160.09	85.11%	9,172.48	8,548.00	93.19%	9,701.62	8,004.76	82.51%	-6.36%
Pajak daerah	5,468.61	5,099.44	93.25%	5,873.33	6,485.77	110.43%	6,527.93	5,967.18	91.41%	-8.00%
Retribusi daerah	178.82	112.59	62.96%	177.84	114.45	64.35%	227.56	109.62	48.17%	-4.22%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	268.57	262.91	97.90%	271.80	312.96	115.14%	370.40	448.27	121.02%	43.24%
Lain-lain PAD yang sah	2,496.76	1,685.14	67.49%	2,849.51	1,634.83	57.37%	2,575.73	1,479.69	57.45%	-9.49%
Pendapatan Transfer	30,013.61	32,177.68	107.21%	28,916.60	33,296.80	115.15%	30,522.34	32,097.85	105.16%	-3.60%
Transfer Pemerintah Pusat	28,273.30	29,339.87	103.77%	27,285.86	29,693.92	108.83%	28,631.67	28,917.55	101.00%	-2.61%
Transfer Antar Daerah	1,740.31	2,837.81	163.06%	1,630.74	3,602.87	220.94%	1,890.67	3,180.30	168.21%	-11.73%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS)	1,495.23	1,365.55	91.33%	1,048.02	1,115.80	106.47%	744.58	555.28	74.58%	-50.23%
Pendapatan Hibah	536.02	375.28	70.01%	486.76	683.00	140.32%	84.74	74.43	87.84%	-89.10%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	959.22	990.27	103.24%	561.26	432.80	77.11%	659.85	480.84	72.87%	11.10%
Belanja Daerah	41,991.95	40,436.38	96.30%	39,703.43	41,698.42	105.02%	41,491.35	41,648.10	100.38%	-0.12%
Belanja Operasi	25,870.73	24,450.23	94.51%	25,155.56	24,295.77	96.58%	26,824.06	24,962.28	93.06%	2.74%
Belanja Pegawai	12,727.72	11,926.02	93.70%	13,606.06	12,223.23	89.84%	14,401.81	12,347.92	85.74%	1.02%
Belanja Barang dan Jasa	10,458.23	10,153.21	97.08%	10,394.78	11,043.40	106.24%	11,272.76	11,110.82	98.56%	0.61%
Belanja Bunga	67.17	59.16	88.08%	98.68	75.24	76.25%	80.33	54.47	67.81%	-27.60%
Belanja Subsidi	30.03	16.71	55.62%	4.21	7.75	184.31%	14.58	13.72	94.07%	76.90%
Belanja Hibah	2,567.67	2,272.85	88.52%	1,022.10	903.98	88.44%	1,019.58	1,399.66	137.28%	54.83%
Belanja Bantuan sosial	19.90	22.28	111.99%	29.73	42.17	141.86%	35.01	35.69	101.95%	-15.37%
Belanja Modal	8,931.22	9,045.29	101.28%	6,813.75	9,616.34	141.13%	6,863.53	9,399.81	136.95%	-2.25%
Belanja Tidak Terduga (BTT)	304.75	59.76	19.61%	559.67	35.64	6.37%	123.08	9.31	7.56%	-73.89%
Belanja Transfer	6,885.25	6,881.11	99.94%	7,174.44	7,750.67	108.03%	7,680.67	7,276.71	94.74%	-6.12%
Belanja Bagi Hasil	1,862.28	1,754.72	94.22%	2,026.88	2,201.04	108.59%	2,034.24	2,232.90	109.77%	1.45%
Belanja Bantuan Keuangan	5,022.98	5,126.40	102.06%	5,147.56	5,549.64	107.81%	5,646.43	5,043.81	89.33%	-9.11%
SURPLUS / DEFISIT	-2,070.35	266.94	-12.89%	-566.32	1,262.18	-222.87%	-522.79	-990.21	189.41%	-178.45%
Pembiayaan	2,070.35	2,346.26	113.33%	566.32	2,346.98	414.43%	522.79	2,531.68	484.26%	7.87%
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		2,613.19			3,609.16			1,541.47		-57.29%

Keterangan: Realisasi 2023 merupakan angka unaudited dan bersifat sementara

Sumber: Dit. APK DJPb (diolah)

III. 2. 1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Sumsel telah mencatatkan kinerja yang cukup tinggi meskipun sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Ditinjau per jenisnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 mencapai Rp8,04 triliun (82,51% dari target) turun -6,36% (yoy). Selanjutnya diikuti oleh Pendapatan Transfer yang mencatatkan realisasi sebesar Rp32,09 triliun (105,61% dari target) turun -3,60% (yoy) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS) dengan realisasi mencapai Rp555,28 miliar (74,58% dari target) turun -50,23% (yoy).



Sumber: Dit. APK DJPb (diolah)

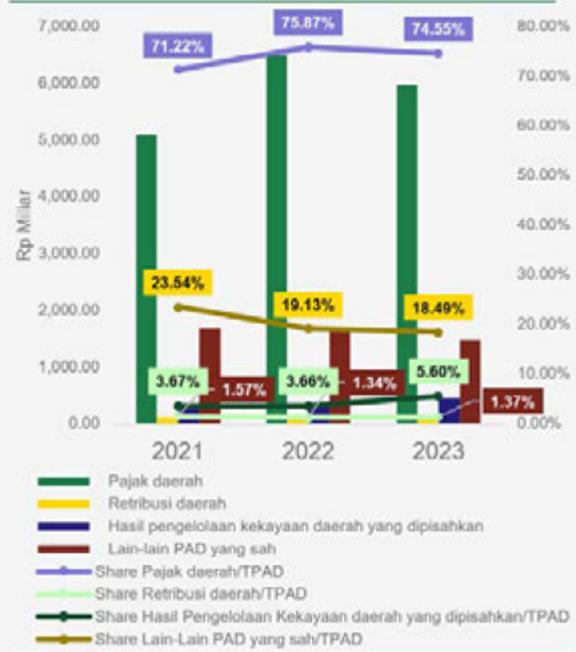
Secara struktur, pendapatan daerah Sumsel masih bergantung dan didominasi oleh pendapatan transfer. Tahun 2023 mencatatkan bahwa 78,95% realisasi pendapatan daerah Sumsel berasal dari pendapatan transfer. Share (kontribusi) tersebut sedikit meningkat dibandingkan tahun 2022 yang berada di angka 77,51%. Namun demikian, pergerakannya cenderung semakin menurun jika dilihat dalam 3 tahun terakhir sejak 2021 seiring dengan peningkatan PAD.

Kontribusi PAD pada tahun 2023 (19,69%) sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 (19,90%), namun jauh lebih baik dibandingkan tahun 2021 (17,51%). Kontribusi PAD Sumsel yang meningkat dalam perkembangannya selama 3 tahun terakhir mengindikasikan bahwa terdapat upaya daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat melalui peningkatan PAD untuk menuju kemandirian fiskal.

III. 2. 1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi PAD Sumsel meningkat dalam 3 tahun terakhir menjadi satu ukuran bahwa kondisi kemampuan keuangan daerah Sumsel semakin baik. Menurut Halim (2001), kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah (derajat desentralisasi fiskal) menjadi salah satu alat ukur untuk menilai kemampuan keuangan daerah. Semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal menunjukkan semakin besar pula porsi belanja daerah yang didanai dari sumber penerimaan yang dihasilkan sendiri oleh daerah (Halim, 2004).

Grafik 3.24 Perkembangan Realisasi Per Jenis PAD



Sumber: Dit. APK DJPb (diolah)

Meskipun secara kontribusinya mengalami peningkatan, realisasi PAD di Sumsel pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan. Ditinjau per jenis realisasi PAD di tahun 2023, pajak daerah mencatatkan Rp5,96 triliun (91,41% dari target) turun -8% (yoy); retribusi daerah mencatatkan Rp109,62 miliar (48,17% dari target) turun -4,22% (yoy); hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencatatkan Rp448,27 miliar (121,02% dari target) naik 43,24% (yoy); Lain-lain PAD yang Sah mencatatkan Rp1,47 triliun (57,45% dari target) turun -9,49% (yoy).

Secara struktur, PAD Sumsel utamanya disumbangkan oleh pajak daerah dengan share rata-rata 73,88% dalam 3 tahun terakhir. Sementara itu, sisanya disumbangkan oleh retribusi daerah, hasil pengeolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah dengan *share* rata-rata masing-masing sebesar 1,43%, 4,31%, dan 20,38%.

Pajak daerah sebagai penyumbang dominan PAD di Sumsel cenderung meningkat selama 3 tahun terakhir meskipun mengalami sedikit penurunan pada 2023. *Share* pajak daerah pada tahun 2023 (74,55%) sedikit menurun dibandingkan tahun 2022 (75,87%), diikuti dengan penurunan realisasi pajak daerah -8% (yoy). Penurunan tersebut terindikasi karena pemda di Sumsel menetapkan target penerimaan terlalu tinggi di atas potensi penerimaan yang ada (Pj. Gubernur Sumsel, 2024).

Keterbatasan pemerintah daerah dalam menghitung potensi sumber penerimaan riil memang menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi dalam upaya optimalisasi PAD (Mardiasmo, 2002). Hal tersebut dipandang sangat relevan sebagai pemicu permasalahan penetapan target penerimaan yang terlalu tinggi di Sumsel. Menurut Mardiasmo (2002), keterbatasan pemda dalam menghitung potensi sumber penerimaan riil antara lain disebabkan oleh kurangnya jumlah SDM, kurangnya kompetensi SDM, dan belum dimilikinya alat untuk menghitung potensi PAD.

Kendala keterbatasan dalam menghitung potensi penerimaan riil, akan berdampak pada kegagalan pajak daerah menjalankan fungsi *budgetary* (pajak berfungsi sebagai sumber dana yang ditujukan untuk membiayai pengeluaran/belanja). Hal ini berpotensi terhambatnya program pembangunan jika belanja terkait dibiayai dari PAD. Oleh karena itu, menghitung potensi pajak daerah secara kredibel sangat diperlukan untuk dapat mengoptimalkan penerimaan PAD sebagai sumber pembiayaan bagi belanja daerah.

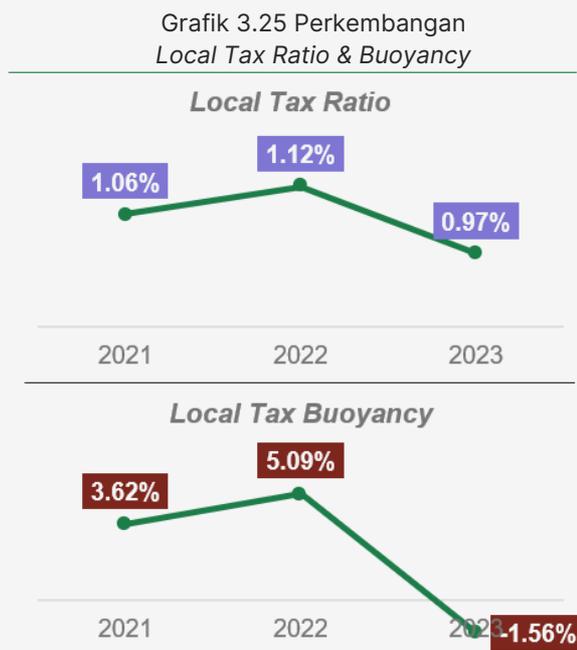
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengukur potensi pajak daerah adalah dengan menghitung *local tax ratio* (LTR). LTR mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) terhadap potensi perekonomian (PDRB).

Selain itu, untuk mengukur respons dan elastisitas penerimaan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, indikator

local tax buoyancy (LTB) dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan pajak daerah meningkat atau menurun sebagai hasil dari perubahan dalam pertumbuhan ekonomi. LTB dapat memberikan indikasi seberapa efektif sistem pajak daerah dalam mengikuti perubahan dalam aktivitas ekonomi.

LTR Sumsel pada tahun 2023 berada di angka 0,97%, terendah dalam 3 tahun terakhir. Angka tersebut dianggap relatif rendah karena masih dibawah angka ideal LTR 3% menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan.

Selain itu, LTB Sumsel pada tahun 2023 juga berada di angka -1,56%, terendah dalam 3 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan elastisitas negatif atau fiscal drag yang berarti penerimaan pajak daerah tumbuh lebih lambat daripada pertumbuhan ekonomi.



Sumber: Dit. APK DJPb dan BPS (diolah)

LTR yang relatif rendah di Sumsel dapat diinterpretasikan bahwa penerimaan pajak daerah masih rendah salah satunya dipengaruhi oleh struktur ekonomi di regional Sumsel. Pada Bab I, dijelaskan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi Sumsel adalah ketergantungan terhadap sektor primer, dimana lebih dari 35% PDRB Sumsel berasal dari sektor pertanian, kehutanan & perikanan, serta pertambangan dan penggalan. Secara sifatnya, sektor-sektor tersebut lebih banyak diserap oleh pajak pusat seperti

PBB Pertambangan, PPN, dan PPh, sementara sektor-sektor lainnya yang berpotensi menjadi sumber penerimaan pajak daerah seperti, jasa, perdagangan, industri pengolahan, ataupun pariwisata belum mendominasi di wilayah Sumsel. Oleh karena itu, rendahnya LTR terindikasi dipengaruhi oleh struktur ekonomi Sumsel yang belum mengoptimalkan sektor-sektor lainnya untuk menyerap penerimaan pajak daerah.

Menurut OECD (2020), salah satu faktor yang dapat mempengaruhi besaran *tax ratio*, adalah struktur ekonomi. Pentingnya keterbukaan perekonomian dan proporsi sektor informal menjadi komponen kunci dalam peningkatan besaran *tax ratio*. Untuk dapat meningkatkan LTR Sumsel di masa depan, diperlukan upaya shifting struktur ekonomi Sumsel saat ini untuk dapat lebih terbuka dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak daerah.

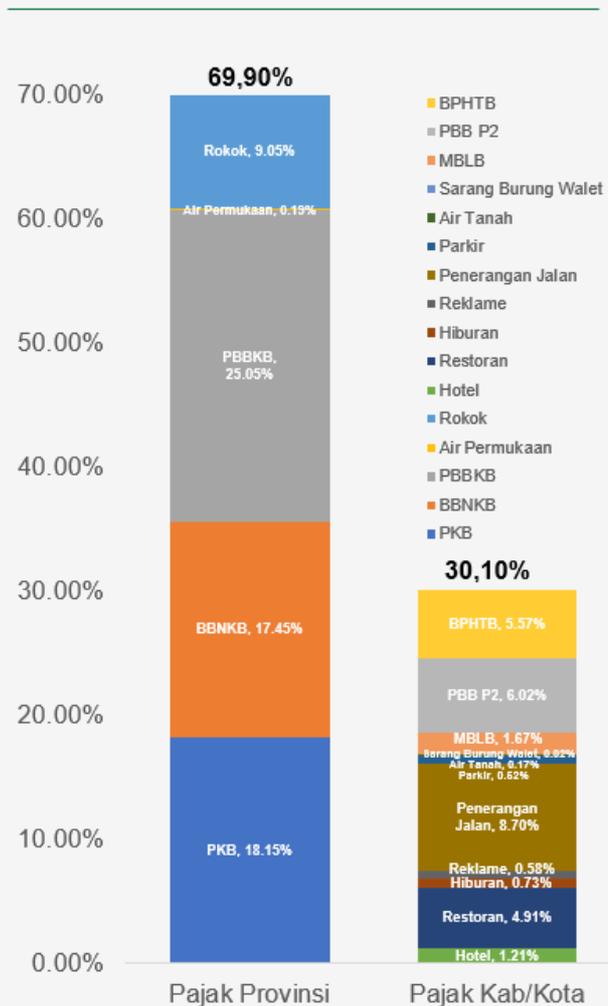
Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi besaran *tax ratio* adalah kebijakan dan administrasi pajak (OECD, 2020). LTB yang menunjukkan *fiscal drag* dapat diinterpretasikan bahwa tingkat penerimaan pajak daerah rendah salah satunya dipengaruhi efisiensi pengumpulan pajak yang kurang optimal.

Berdasarkan hasil diskusi dengan pihak terkait, isu tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah masih menjadi tantangan utama. Selain itu, kualitas dan kuantitas SDM juga menjadi tantangan, terutama terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang pemeriksa dan juru sita. Dengan demikian, faktor kebijakan dan administrasi pajak menjadi tantangan yang juga dihadapi oleh Sumsel, sebab faktor tersebut dapat mempengaruhi *willingness to pay* dari wajib pajak untuk membayar pajaknya (OECD, 2020).

Ditinjau lebih detail, pada faktanya penerimaan pajak daerah di Sumsel lebih berkontribusi oleh pemerintah provinsi (69,90%) dengan Pajak atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagai kontributor terbesar. Sementara pemerintah kab/kota hanya berkontribusi sebesar 30,10% dengan Pajak Penerangan Jalan sebagai kontributor terbesar. Selain itu, jika dilihat secara spasial pajak

kab/kota utamanya berkontribusi oleh 3 daerah yaitu Palembang, Muara Enim, dan Musi Banyuasin. Kota Palembang yang merupakan ibukota provinsi Sumsel memiliki share mencapai 54,26% dari total pajak kab/kota dengan PBB P2, pajak penerangan jalan, dan pajak restoran sebagai 3 kontributor terbesar. Kabupaten Muara Enim sebagai penghasil batubara, berkontribusi sebesar 6,22% dari total pajak kab/kota dengan pajak MBLB, pajak penerangan jalan, dan BPHTB sebagai 3 kontributor terbesar. Kabupaten Musi Banyuasin sebagai penghasil minyak dan gas bumi, berkontribusi sebesar 4,82% dengan pajak penerangan jalan, PBB P2, dan pajak restoran sebagai kontributor terbesar.

Grafik 3.26 Share Realisasi Per Jenis terhadap Total Pajak Daerah Tahun 2023



Sumber: Dit. APK DJPb dan BPS (diolah)

Tingginya kontribusi pajak daerah pada wilayah tertentu mengindikasikan bahwa terdapat ketimpangan penerimaan pajak daerah antar wilayah di Sumsel terutama pada kab/kota.

Isu tersebut diindikasikan memiliki hubungan dengan tantangan pembangunan yang dihadapi Sumsel bahwa aktivitas ekonomi terkonsentrasi pada wilayah tertentu, dimana 62,33% PDRB Sumsel hanya disumbang oleh 3 kab/kota yaitu Palembang yang merupakan ibukota Provinsi, Muara Enim sebagai penghasil batubara, dan Musi Banyuasin sebagai penghasil minyak dan gas bumi.

Aktivitas ekonomi yang terkonsentrasi di wilayah tertentu memicu ketimpangan ekonomi antar wilayah sehingga memiliki pengaruh terhadap ketimpangan penerimaan pajak daerah antar wilayah di Sumsel.

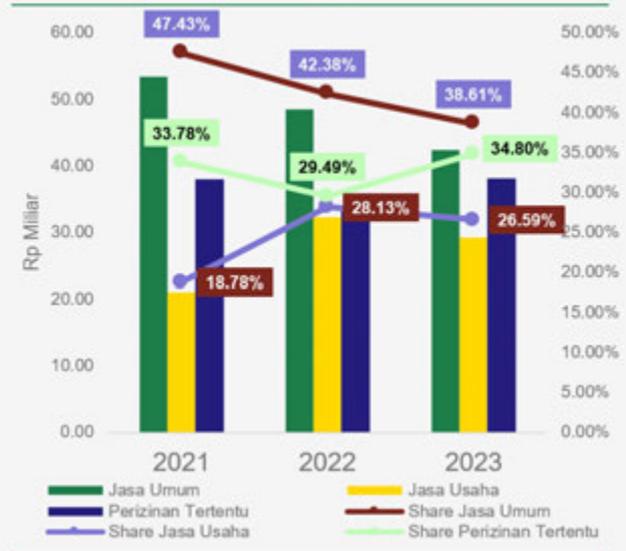
Selanjutnya dari komponen retribusi daerah, sebagaimana tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, ditetapkan sebanyak 30 jenis retribusi daerah yang dikelompokkan dalam 3 golongan (jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu).

Dalam 3 tahun terakhir, retribusi daerah Sumsel utamanya dikontribusikan dari retribusi jasa umum dengan share rata-rata berada di angka 48,08% dari total retribusi daerah. Sementara golongan retribusi lainnya seperti jasa usaha dan perizinan tertentu rata-rata menyumbangkan share terhadap total retribusi daerah sebesar 27,50% dan 36,64%.

Berdasarkan tren dalam tiga tahun terakhir, share retribusi jasa umum terus menurun hingga berada di angka 38,61% pada 2023. Retribusi jasa umum mencatatkan penerimaan sebesar Rp42,32 Miliar pada 2023, turun -12,75% (yoy) dan turun -20,76% dibandingkan 2021.

Hal ini terjadi disebabkan retribusi pelayanan kesehatan yang mengalami penurunan drastis -76,62% pada tahun 2023 dibandingkan 2021 karena penurunan kasus pasien Covid-19 dan semakin terkendalinya pandemi tersebut.

Grafik 3.27 Perkembangan Realisasi Per Jenis Retribusi Daerah



Sumber: Dit. APK DJPb (diolah)

Tren share retribusi jasa usaha cenderung fluktuatif dengan angka pada tahun 2023 yang mencapai 26,59%. Menurut Halim (2011), pemungutan retribusi memang lebih bergantung pada aktivitas ekonomi dan permintaan pelayanan dari masyarakat, sehingga memiliki kecenderungan berfluktuasi. Retribusi jasa usaha mencatatkan penerimaan sebesar Rp29,15 miliar turun -9,46% (yoy). Hal ini terjadi disebabkan karena kontributor terbesar retribusi jasa usaha mengalami penurunan. Retribusi pemakaian kekayaan daerah (mencakup penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor/alat berat) turun -19,06% (yoy) dan berkontribusi 68,17% dari total penurunan penerimaan retribusi jasa usaha.

Tren share retribusi perizinan tertentu juga berfluktuasi dengan angka pada tahun 2023 yang berada di 34,80%. Retribusi perizinan tertentu mencatatkan penerimaan sebesar Rp38,15 miliar, naik 13,05% (yoy). Hal ini terjadi karena retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai kontributor terbesar mengalami peningkatan 6,29%. Kenaikan retribusi IMB dapat memberikan indikasi bahwa ada aktivitas pembangunan yang meningkat di Sumsel. Hal ini juga dapat memberikan signal positif pada pertumbuhan sektor konstruksi yang berefek multiplier pada peningkatan aktivitas ekonomi karena banyaknya proyek pembangunan.

Jika dilihat dari perkembangan realisasi komponen PAD selain PDRD, terlihat pada *I-Account* bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terus mencatatkan tren yang positif dalam 3 tahun terakhir.

Pada tahun 2023, komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tumbuh positif 43,24% yang utamanya dikontribusikan oleh deviden atas penyertaan modal pada BUMD.

Dari sisi lain-lain PAD yang sah, tren dalam 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa utamanya penerimaan pada komponen ini dikontribusikan oleh Pendapatan BLUD khususnya yang berasal dari jasa layanan pada BLUD kesehatan.

Pendapatan BLUD yang menjadi kontributor terbesar dapat mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan dan ekspansi layanan publik yang disediakan oleh BLUD di Sumsel sehingga utamanya masyarakat menggunakan jasa layanan tersebut.

III. 2. 1.2. Pendapatan Transfer

Dalam penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa pendapatan daerah Sumsel bergantung dan didominasi oleh pendapatan transfer. Secara spesifik, pendapatan tersebut utamanya dikontribusi dari transfer pemerintah pusat yang dalam tiga tahun terakhir rata-rata memiliki *share* 90,15%.

Sementara itu, sisanya disumbangkan dari transfer antar daerah yang rata-rata memiliki *share* di angka 9,85% dalam tiga tahun terakhir.

Pada tahun 2023, pendapatan transfer pemerintah pusat berkinerja tinggi dengan capaian 101% dari pagu dan mencatatkan nilai sebesar Rp28,91 triliun meskipun secara realisasi turun -2,61% (yoy).

Pendapatan transfer antar daerah juga mencatatkan kinerja yang tinggi dengan capaian 168,21% dari pagu dan mencatatkan nilai sebesar Rp3,18 triliun meskipun secara realisasi turun -11,73% (yoy).

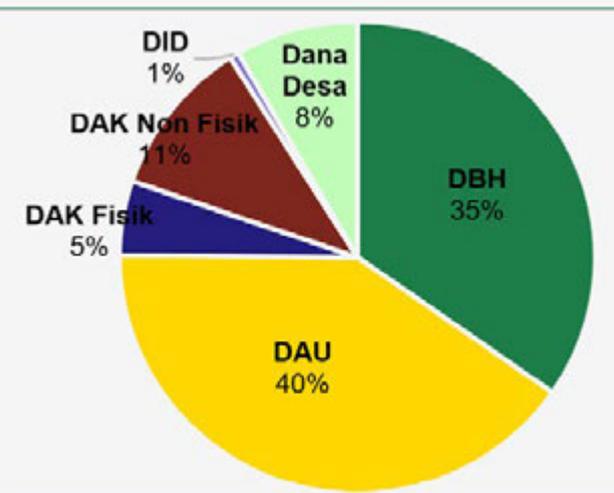
Grifik 3.28 Perkembangan Realisasi Per Jenis Pendapatan Transfer



Sumber: Dit. APK DJPb (diolah)

Secara struktur, transfer pemerintah pusat di Sumsel didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dengan *share* mencapai 40%, tertinggi dibandingkan jenis transfer yang lain. Hal ini mengindikasikan ketergantungan pemda-pemda di Sumsel terhadap DAU untuk membiayai belanja daerahnya. Kajian yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal (2021), menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara DAU dan kapasitas fiskal, yang berarti DAU lebih memihak pada daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Hal ini sangat relevan melihat kapasitas fiskal pemda di Sumsel pada tahun 2023 mayoritas berada pada kategori rendah (PMK Nomor 84 tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah).

Grifik 3.29 Share Realisasi Per Jenis Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023

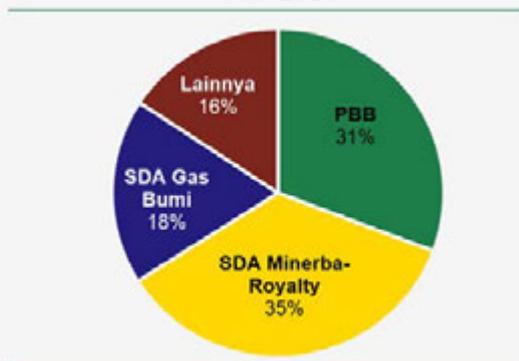


Sumber: Dit. APK DJPb (diolah)

Secara teori, DAU memang berfungsi sebagai *equalization grant* yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan dan mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah (*horizontal imbalance*). Namun di sisi lain, DAU justru mendorong dominasi belanja pegawai, sementara kondisi ketimpangan kinerja layanan publik antar daerah masih terjadi (DJPK, 2023). Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan DAU pada tahun 2023 diarahkan penggunaannya untuk mendorong pemerataan kinerja layanan publik. Daerah dengan kinerja layanan yang masih kurang, mendapatkan porsi DAU *specific grant* lebih besar dimana diperuntukkannya untuk bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penggajian formasi PPPK, dan untuk pendanaan kelurahan.

Sebagai kontributor kedua terbesar di Sumsel, DBH utamanya disumbangkan dari jenis DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara (Minerba)-*Royalty*, Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, serta SDA Gas Bumi. Hal ini sudah sewajarnya mengingatkan Sumsel adalah salah satu daerah yang kaya akan hasil SDA. Namun demikian, ini perlu menjadi perhatian karena akan kembali pada isu yang dihadapi Sumsel dimana sangat bergantung dengan sektor primer. Tingginya penerimaan DBH dari hasil SDA memang akan berdampak pada pendapatan daerah Sumsel, tetapi belum tentu ini akan menyebabkan perekonomian daerah berkembang lebih cepat. Hal ini sesuai dengan teori "*natural resource curse*" dimana potensi SDA dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan terbalik. SDA yang berlimpah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi disebabkan salah satunya karena volatilitas harga komoditas (Badeeb dkk., 2017).

Grafik 3.30 *Share Realisasi Per Jenis DBH Tahun 2023*



Sumber: Dit. APK DJPb (diolah)

Fenomena yang terjadi di Sumsel sangat erat dengan gejala "*the Dutch Disease*", dimana Sumsel mempunyai ketergantungan tinggi terhadap hasil SDA yang tak terbarukan sebagai sumber pendapatan daerah. Tingginya ketergantungan tersebut dapat mempengaruhi keberlanjutan fiskal daerah dalam jangka panjang jika tidak diimbangi dengan optimalisasi pada penerimaan sumber lain khususnya PAD. Menurut BKF (2021), hal tersebut juga akan menyebabkan meredupnya sektor ekonomi yang tahan fluktuasi harga bahan mentah, seperti industri manufaktur, jasa, dan konsumsi.

Selain transfer dari pemerintah, pendapatan transfer juga berasal dari transfer antar daerah baik berupa pendapatan bagi hasil maupun bantuan keuangan. Tahun 2023 mencatatkan bahwa komponen pendapatan ini utamanya dikontribusikan dari pendapatan bagi hasil pajak khususnya dari PBBKB, PKB, dan pajak rokok. Sementara yang berasal dari bantuan keuangan, utamanya dikontribusikan dari bantuan keuangan khusus dari pemda provinsi kepada pemda kab/kota di Sumsel.

III. 2. 1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS)

Secara umum, pendapatan ini sangat bergantung pada kondisi dan faktor ketidakpastiannya cukup tinggi karena bersumber dari hibah maupun lainnya. Oleh karena itu, dalam tren 3 tahun terakhir, LLPDyS menunjukkan tren yang berfluktuasi dari komponen pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2023, pendapatan hibah mencatatkan nilai sebesar Rp74,43 miliar atau turun -89,10% (yoy).

Pendapatan hibah utamanya berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp65,92 miliar, sementara sisanya berasal dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri, luar negeri, serta lembaga/organisasi swasta dalam maupun luar negeri.

Grafik 3.31 Realisasi Per Jenis LLPDyS Tahun 2023



Sumber: Dit. APK DJPb (diolah)

Pada tahun 2023, lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mencatatkan nilai sebesar Rp480,84 miliar atau naik 11,10% (yoy). Jenis pendapatan ini utamanya dikontribusikan dari pendapatan hibah dana bos sebesar Rp345,87 miliar, sementara sisanya berasal dari pendapatan atas pengembalian hibah pada pemerintah, BUMN, badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia, serta pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Faskes Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

III. 2. 2. Belanja Daerah

Tingginya tingkat desentralisasi fiskal suatu wilayah mengimplikasikan potensi peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah pada masyarakatnya melalui belanja daerah (Boetti dkk., 2010). Belanja daerah dapat dikatakan sebagai aktualisasi rencana pembangunan di daerah, oleh karenanya pengelolaan belanja daerah secara baik diharapkan dapat berdampak positif pada pembangunan daerah (BKF, 2021).

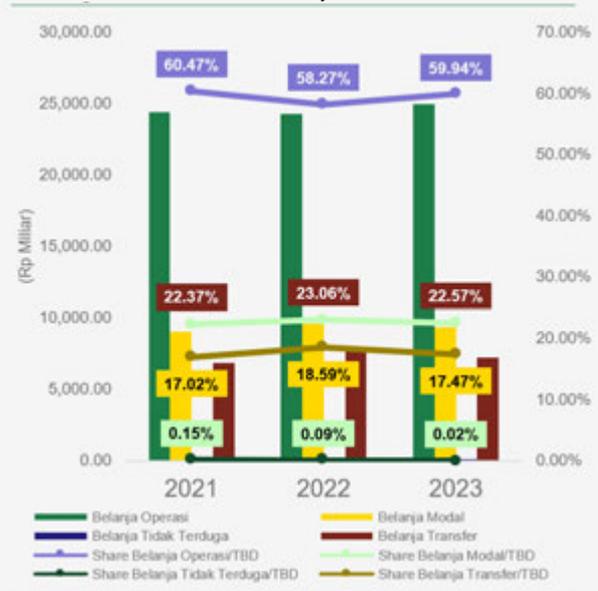
Pengelolaan belanja daerah dalam APBD Sumsel 2023 menunjukkan kinerja yang resilien. Belanja daerah mencatatkan kinerja yang tinggi mencapai Rp41,64 triliun atau 100,38% dari alokasi sebesar Rp41,49 triliun. Peran APBD sebagai alat untuk mencapai pembangunan terlihat dari berbagai kebijakan dan alokasi APBD yang ditujukan untuk meningkatkan

kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan wilayah berbasis lingkungan dan tata ruang, serta reformasi dan stabilitas daerah.

III. 2. 2.1. Berdasarkan Jenis Belanja

Pada tahun 2023, realisasi belanja operasi mencapai Rp24,96 triliun (93,06% dari pagu) tumbuh 2,74% (yoy). Sementara itu, belanja modal mencatatkan realisasi mencapai Rp9,39 triliun (136,95% dari pagu) turun -2,25% (yoy). Belanja tidak terduga mencatatkan realisasi pada tahun 2023 mencapai Rp9,31 miliar (7,56% dari pagu) turun -73,89% (yoy). Belanja transfer mencatatkan realisasi pada tahun 2023 mencapai Rp7,27 triliun (94,74% dari pagu) turun -6,12% (yoy).

Grafik 3.32 Perkembangan Realisasi Per Jenis Belanja Daerah



Sumber: Dit. APK DJPb (diolah)

Secara struktur, belanja daerah Sumsel didominasi oleh belanja operasi dengan share rata-rata 59,56%. Tahun 2023 mencatatkan bahwa 59,94% realisasi belanja daerah Sumsel berasal dari belanja operasi. Share tersebut sedikit meningkat dibandingkan tahun 2022 yang berada di angka 58,27%. Namun demikian, pergerakannya cenderung menurun jika dibandingkan tahun 2021. Sementara itu, untuk belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer masing-masing memiliki share rata-rata sebesar 22,67%, 0,09%, dan 17,69%.

Kontribusi yang tinggi pada belanja operasi akan berdampak pada berkurangnya porsi belanja pembangunan daerah yang tercermin dari pemanfaatan belanja modal. Proporsi belanja modal yang tidak besar akan mengakibatkan ketiadaan investasi pemerintah yang dapat memicu sektor swasta untuk meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini akan menyebabkan dampak belanja daerah terhadap perekonomian tidak begitu signifikan karena kurangnya multiplier effect dari belanja modal.

III. 2. 2.1. 1. Belanja Operasi

Secara struktur, tren dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa realisasi belanja operasi utamanya didominasi oleh belanja pegawai yang share rata-ratanya berada di angka 29,48%. Kontributor kedua terbesar disumbangkan oleh belanja barang yang memiliki share rata-rata 26,09%. Sementara itu sisanya dikontribusikan oleh belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial yang masing-masing memiliki share rata-rata 0,15%, 0,03%, 3,72%, dan 0,08%.

Grafik 3.33 Perkembangan Share Realisasi Per Jenis Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah



Sumber: Dit. APK DJPb (diolah)

Belanja pegawai menjadi salah satu komponen belanja daerah yang mendukung peningkatan produktivitas ASN pemda dan pelaksanaan tugas pelayanan publik. Realisasi belanja pegawai mencapai Rp12,37 triliun (85,74% dari pagu) atau naik 1,02% (yoy). Pertumbuhan realisasi belanja

pegawai terutama didorong oleh kenaikan belanja gaji dan tunjangan ASN, serta tambahan penghasilan ASN. Hal tersebut dipengaruhi oleh pembayaran THR dan Gaji ke-13 yang memasukkan komponen tunjangan kinerja sebesar 50% pada tahun 2023.

Secara lebih detail, belanja pegawai di tahun 2023 memang didominasi oleh belanja gaji dan tunjangan ASN yang berada di angka 61,39%. Kontribusi utamanya berasal dari belanja gaji pokok PNS yang mencapai Rp5,71 triliun. Kontribusi sebagiannya berasal dari tambahan penghasilan ASN (17,68%), tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN (13,82%). Sementara itu, sisanya berasal dari komponen yang lain sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.34 Share Per Komponen Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Pegawai 2023

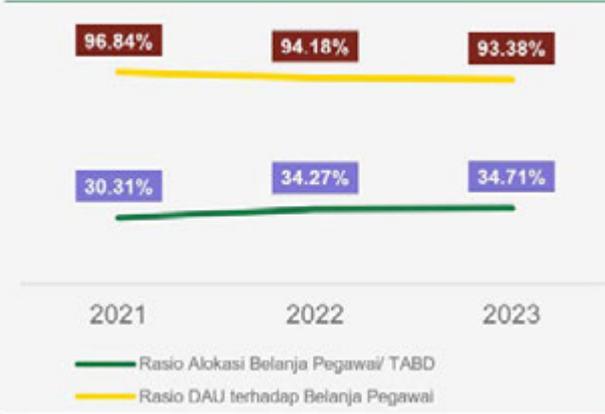


Sumber: Dit. APK DJPb (diolah)

Tingginya porsi belanja pegawai perlu menjadi perhatian bagi pemda di wilayah Sumsel. Jika dilihat berdasarkan tren dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, terlihat bahwa alokasi belanja pegawai terhadap alokasi total belanja daerah terus meningkat. Pada tahun 2023, porsinya mencapai yang tertinggi yaitu 34,71%. Padahal, UU HKPD (2022) mengamanatkan bahwa daerah diwajibkan untuk mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% dari APBD yang paling lambat porsinya disesuaikan hingga tahun 2027.

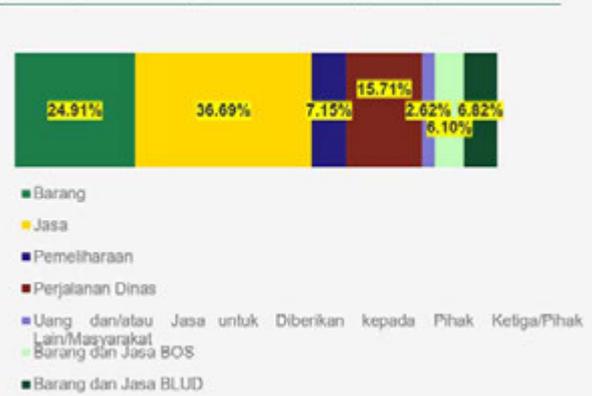
Di sisi lain, Pemda Sumsel juga perlu mewaspadaai ketergantungan penggunaan DAU untuk pemenuhan belanja pegawai. Kajian yang dilakukan BKF (2021) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan kuat antara DAU dan belanja pegawai sehingga menyimpulkan bahwa penggunaan DAU masih didominasi untuk pemenuhan belanja pegawai.

Grafik 3.35 Perkembangan Rasio Alokasi Belanja Pegawai dan Rasio DAU



Sumber: Dit. APK DJPb (diolah)

Grafik 3.36 Share Per Komponen Belanja Barang terhadap Total Belanja Pegawai 2023



Sumber: Dit. APK DJPb (diolah)

Jika diasumsikan bahwa seluruh realisasi DAU di Sumsel digunakan untuk memenuhi realisasi belanja pegawai, maka rasionya menunjukkan tren yang semakin menurun. Pada tahun 2023, angkanya mencapai 93,38% atau terendah dalam tiga tahun terakhir. Hal ini diharapkan memberikan warning bagi Pemda Sumsel untuk memiliki exit strategy dalam pemenuhan belanja pegawai melalui sumber pendapatan lain terutama PAD.

Sebagai kontributor kedua terbesar, belanja barang dan jasa mencatatkan Rp11,11 triliun pada tahun 2023 (98,56% dari pagu) atau naik 0,61% (yoy). Pertumbuhan realisasi belanja barang dan jasa didorong oleh meningkatnya belanja barang, jasa, pemeliharaan, perjalanan dinas, serta uang dan jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Secara struktur, belanja barang dan jasa di Sumsel utamanya dikontribusikan tiga komponen terbesar yaitu barang, jasa, dan perjalanan dinas. Jika dilihat dari perspektif proporsi komponen perjalanan dinas yang mencapai 15,71% dari total belanja barang, maka hal ini dipandang relatif tinggi jika dikaitkan dengan penggunaan untuk belanja yang sifatnya bukan untuk investasi/pembangunan.

Belanja bunga mencatatkan Rp54,47 miliar pada tahun 2023 (67,81% dari pagu) atau turun -27,60%. Penurunan realisasi tersebut disebabkan penurunan belanja bunga utang pinjaman dibandingkan tahun lalu. Secara detail, komponen belanja bunga mencatatkan masing-masing utang pinjaman kepada pemerintah pusat dari penerusan pinjaman sebesar Rp2,6 miliar, utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebesar Rp24,29 miliar, dan utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp27,57 miliar.

Belanja subsidi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, belanja ini mencatatkan Rp13,72 miliar (94,07% dari pagu) atau naik 76,09% (yoy). Belanja subsidi diberikan kepada BUMN, BUMD, maupun swasta selama tahun 2023 untuk berbagai program seperti penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayanan izin usaha simpan pinjam bagi koperasi, pengembangan UMKM, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, serta perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana industri.

Belanja bantuan sosial adalah instrumen penting yang menjadi bantalan bagi masyarakat miskin dan rentan di Sumsel. Pada tahun 2023, belanja ini mencatatkan nilai sebesar Rp35,69 miliar (101,95% dari pagu) atau turun -15,37% (yoy). Selama tahun 2023, berbagai program untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dilakukan pemda di wilayah Sumsel. Beberapa program dan kegiatan yang berkontribusi besar diantaranya terkait perbaikan rumah tidak layak huni untuk

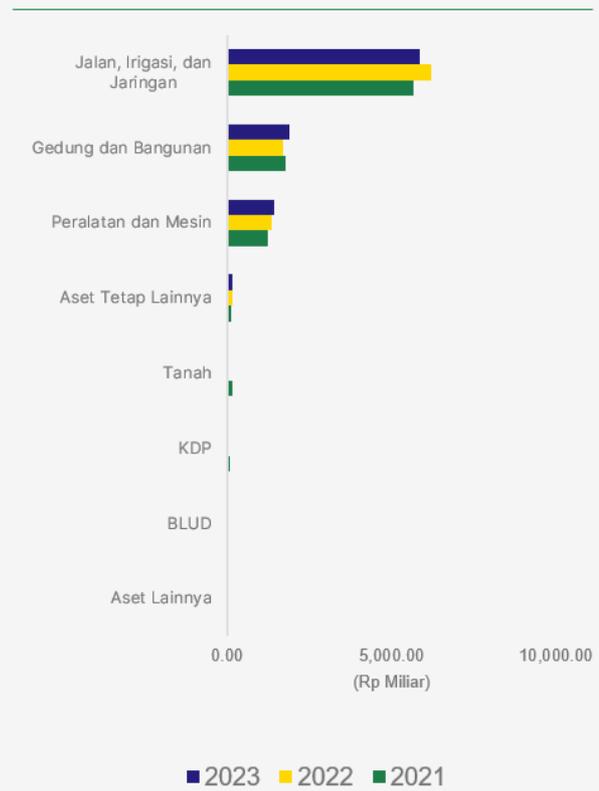
pengecangan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh yang mencapai Rp15,63 miliar serta fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga yang mencapai Rp6,17 miliar. Belanja bantuan sosial juga turut berkontribusi dalam program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penanggulangan dan penanganan bencana, pengelolaan pendidikan, ketahanan pangan, serta kesejahteraan rakyat.

Belanja hibah di Sumsel mencatatkan nilai sebesar Rp1,39 triliun (137,28% dari pagu) atau naik 54,83%. Pertumbuhan belanja ini utamanya dikontribusikan dari peningkatan realisasi pada belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yang mencapai Rp1,16 triliun. Hal tersebut terutama didorong karena proses tahapan persiapan pemilu 2024 yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Belanja hibah uang untuk program perumusan kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemeritahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik mencapai Rp361,23 miliar pada tahun 2023. Selain itu, terdapat juga realisasi belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp31,97 miliar.

III. 2. 2.1. 2. Belanja Modal

Belanja modal tahun 2023 di Sumsel difokuskan mendukung pembangunan infrastruktur konektivitas dan rehabilitasi sarana dan prasarana. Belanja modal berkinerja tinggi dimana mencatatkan Rp9,39 triliun (136,95% dari pagu) meskipun sedikit turun -2,25% dibandingkan tahun lalu. Belanja modal utamanya didominasi oleh belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan dalam tren tiga tahun terakhir. Selama tahun 2023, belanja modal di Sumsel digunakan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, SPAM, jalan, dan jembatan. Belanja modal mendukung pembangunan infrastruktur konektivitas terutama pada penyelenggaraan jalan untuk kabupaten/kota yang banyak dilakukan pembangunan dan rekonstruksi.

Grafik 3.37 Perkembangan Realisasi Per Jenis Belanja Modal



Sumber: Dit. APK DJPb (diolah)

Meskipun belanja modal di Sumsel mencatatkan kinerja yang tinggi dalam 3 tahun terakhir (capaian realisasi >100%), kontribusi realisasi belanja modal di Sumsel masih relatif rendah, yaitu berada di rata-rata 22,67%. Padahal belanja modal diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemda wilayah Sumsel, sebab untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah, peningkatan belanja modal masih sangat perlu dilakukan. Bahkan ke depannya, UU HKPD (2022) mengamanatkan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan transfer kepada daerah atau desa yang paling lambat porsinya disesuaikan pada tahun 2027.

III. 2. 2.1. 3. Belanja Tidak Terduga (BTT)

Realisasi belanja tidak terduga mencatatkan nilai sebesar Rp9,31 miliar (7,56% dari pagu) atau turun -73,89%. Penurunan realisasi mengikuti penurunan

alokasi belanja tidak terduga yang turun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan high base effect pada tahun 2022 dimana penanganan Covid-19 masih dilakukan, sementara pada tahun 2023 pandemi sudah semakin terkendali sehingga alokasinya dapat diturunkan.

BTT di Sumsel pada tahun 2023 utamanya digunakan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selama tahun 2023, Sumsel menghadapi karhutla lahan karena musim kemarau yang lebih panjang dan juga fenomena el nino. Sebesar Rp4,9 miliar BTT digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk penanganan karhutla. Imbas dari karhutla dan el nino juga berimplikasi pada kenaikan inflasi karena pengaruh ketersediaan stok komoditas pangan. Kondisi ini juga direspon melalui belanja tidak terduga yang digunakan untuk pengendalian inflasi. Selain itu, belanja tidak terduga di 2023 juga digunakan untuk kegiatan dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.

III. 2. 2.1. 4. Belanja Transfer

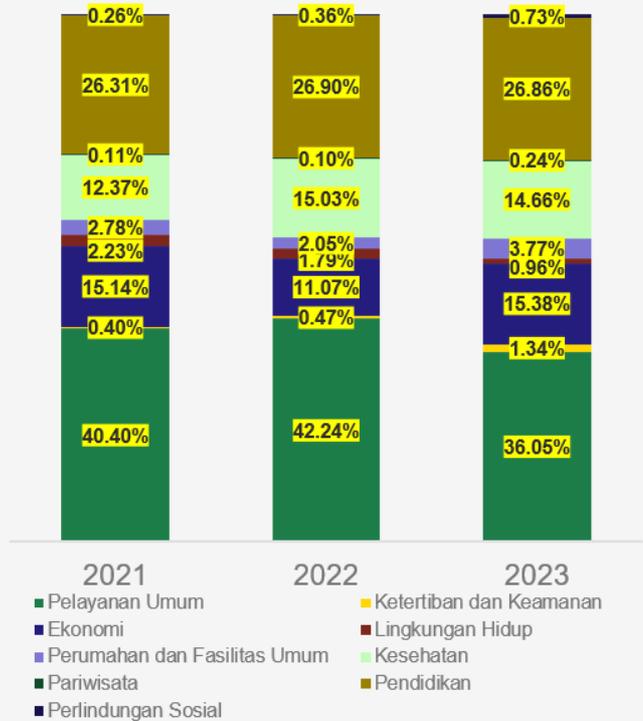
Belanja transfer mencatatkan nilai sebesar Rp7,27 triliun (94,74% dari pagu) atau turun -6,12% (yoy). Penurunan tersebut disebabkan belanja bantuan keuangan yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, belanja bagi hasil mencatatkan Rp2,23 triliun yang berasal dari bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten Rp2,18 triliun, bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa Rp48,16 miliar, serta bagi hasil retribusi kabupaten/kota kepada pemerintah desa Rp4,57 miliar. Sementara itu, belanja bantuan keuangan terealisasi sebesar Rp5,04 triliun, yang berasal dari bantuan keuangan khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota Rp1,32 triliun dan belanja bantuan keuangan umum dan khusus provinsi atau kabupaten/kota kepada Desa sebesar Rp3,72 triliun.

III. 2. 2.2. Berdasarkan Fungsi

Kebijakan alokasi belanja per fungsi Sumsel selaras dan mendukung apa yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2023.

Hal ini tercermin dari proporsi alokasi belanja fungsi tertentu yang meningkat mengikuti prioritas pembangunan dan isu strategis di Sumsel sesuai RKPD 2023.

Grafik 3.38 Perkembangan Share Belanja Daerah Menurut Fungsi



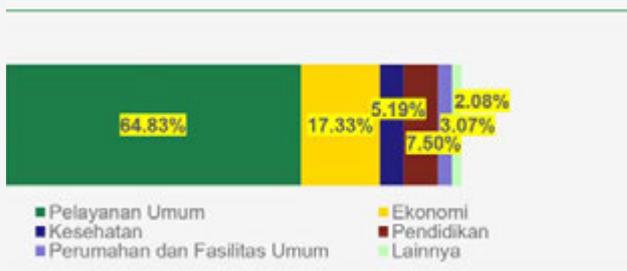
Sumber: DJPK (diolah)

Proporsi alokasi belanja perlindungan sosial (0,73%) dan ekonomi (15,38%) pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh prioritas pembangunan daerah Sumsel untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta isu strategis yang menitikberatkan pada pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui peningkatan produktivitas pertanian, investasi, industri, perdagangan, UMKM, dan pariwisata.

Dalam merespon isu pengembangan kualitas sumber daya manusia yang madani dan berprestasi, proporsi belanja prioritas pendidikan dipertahankan di kisaran 26% dalam tiga tahun terakhir (diatas amanat mandatory spending sesuai UUD 1945 dan UU 20/2003, minimal 20% dari APBD). Hal yang selaras juga dilakukan dalam merespon percepatan penurunan angka stunting dimana proporsi belanja prioritas kesehatan berada di rata-rata 14,02% dalam tiga tahun terakhir (diatas amanat mandatory spending sesuai UU 36/2009, minimal 10% dari APBD).

Belanja daerah Sumsel pada tahun 2023 mencapai Rp41,49 triliun dengan kontribusi terbesarnya berada di fungsi pelayanan umum (64,83%). Kontribusi dari belanja fungsi ekonomi (17,33% dari total belanja daerah) terutama mendorong capaian ekonomi makro di Sumsel dimana inflasi terjaga selama tahun 2023 serta mencatatkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif. Kontribusi dari belanja kesehatan serta perumahan dan fasilitas umum juga diharapkan dapat menurunkan angka stunting di tahun 2023, dimana dalam tren dua tahun terakhir berkinerja sangat baik (angka prevalensi tahun 2022 adalah 18,6% semakin baik dibandingkan 2021 yang sebesar 24,8%). Sumsel juga masuk dalam tiga besar provinsi dengan angka prevalensi stunting terendah pada tahun 2022. Selain itu, belanja pendidikan (7,50%) juga turut berkontribusi dalam mendorong tren IPM yang positif di 2023 khususnya pada dimensi pengetahuan.

Grafik 3.39 Share Belanja Menurut Fungsi Tahun 2023

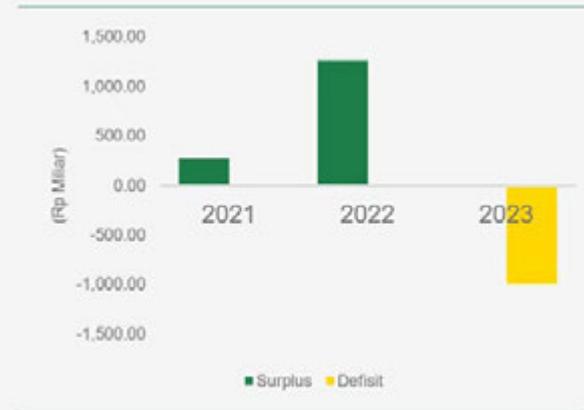


Sumber: Dit. APK DJPb (diolah)

III. 2. 3. Surplus/Defisit APBD

Dalam 3 tahun terakhir, untuk pertama kalinya APBD Sumsel mengalami defisit. Defisit tercatat sebesar Rp990,21, berbanding terbalik dengan kondisi 2 tahun terakhir yang mengalami surplus. Mayoritas pemda di Sumsel mengalami defisit APBD pada tahun 2023. Sebanyak 12 dari 18 pemda atau 66,67% mengalami defisit. Menurut Pj. Gubernur Sumsel (2024), kondisi defisit tersebut dipicu karena target pendapatan ditetapkan tanpa melihat potensi penerimaan yang ada, sehingga pendapatan tidak tercapai dan tidak mampu membiayai seluruh realisasi belanja daerah.

Grafik 3.40 Perkembangan Surplus/Defisit APBD



Sumber: Dit. APK DJPb (diolah)

Secara umum, kondisi APBD Sumsel yang defisit bukan mengindikasikan sebagai suatu hal yang buruk karena belanja daerah masih dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah. Justru, secara praktiknya APBD disusun dengan kebijakan anggaran defisit dengan harapan dapat memberikan stimulus ekonomi, pembangunan infrastruktur, investasi, serta mengatasi kesenjangan ekonomi. Namun, secara tren historis memang kondisi realisasi APBD selalu mencatatkan surplus, sehingga dipandang sebagai suatu anomali. Dalam perspektif yang berbeda, kondisi defisit ini dapat diinterpretasikan sebagai suatu yang positif dimana belanja daerah bekerja baik dalam memacu pertumbuhan ekonomi di Sumsel.

Poin terpenting yang perlu dicermati pada dasarnya lebih dititikberatkan kepada defisit dapat terjaga aman, namun berdampak masif bagi sumsel melalui realisasi belanja daerah yang efektif dan efisien. Secara persentase, defisit APBD sumsel berada di angka 0,0047% dari PDB, dimana masih jauh dari batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2023 yang ditetapkan sebesar 0,14% (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/2022). Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa rasio defisit APBD Sumsel terhadap PDB pada tahun 2023 masih terkendali dalam batas yang aman.

III. 2. 4. Pembiayaan Daerah

Dalam perkembangannya, pembiayaan di Sumsel mencatatkan tren positif dalam 3 tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dari realisasi pembiayaan yang terus meningkat, sebesar Rp2,53 triliun dicatatkan pada tahun 2023 dimana tumbuh 7,87% (yoy). Peningkatan tersebut disebabkan oleh penerimaan pembiayaan yang terus mengalami peningkatan dan lebih tinggi dari pengeluaran pembiayaan.

Secara struktur, penerimaan pembiayaan di Sumsel utamanya didominasi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dengan share rata-rata menyentuh 84,51% dalam 3 tahun terakhir. Tren SiLPA terus meningkat disebabkan Sumsel yang selalu mengalami surplus APBD dari tahun-tahun sebelumnya sehingga terus terakumulasi. Sementara itu, pinjaman daerah terlihat masih belum menjadi instrumen menarik bagi sumsel memenuhi fiscal gap jika terjadi konsekuensi peningkatan fiscal needs untuk pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan dari tren kontribusi pinjaman daerah yang semakin menurun dalam 3 tahun terakhir. Padahal, pinjaman daerah bermanfaat untuk membiayai infrastruktur dan investasi sarana dan prasarana daerah dalam rangka pelayanan publik.

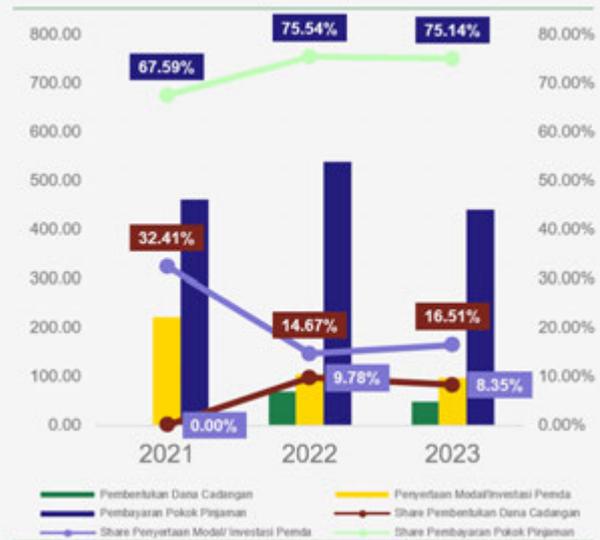
sisanya dikontribusi dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. investasi pemda yang masing-masing berada di rata-rata 6,05% dan 21,20%. Kontribusi dari penyertaan modal/investasi pemda Sumsel kepada BUMD dinilai relatif rendah. Pada tahun 2023, kontribusinya berada di angka 16,51% dimana jauh lebih rendah dibandingkan pengeluaran pembayaran pokok pinjaman yang berada di 75,14%. Padahal, penyertaan modal dapat menjadi tools dalam upaya bantuan keuangan dari pemerintah dan juga sebagai investasi kepada BUMD, yang diharapkan menciptakan impact bagi pembangunan daerah. Masih minimnya yang dilakukan Sumsel dalam kebijakan pengeluaran pembiayaan menunjukkan bahwa masih belum dapat dimanfaatkannya surplus APBD tahun-tahun sebelumnya dengan baik. Sehingga, hal ini selanjutnya tentu akan berdampak pada SiLPA yang akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Menurut BKF (2021), SiLPA yang semakin tinggi dari waktu ke waktu yang tidak disertai dengan kemampuan merencanakan sekaligus merealisasikan belanja dapat menyebabkan jumlah simpanan daerah di perbankan semakin tinggi.

Grafik 3.41 Perkembangan Realisasi Per Komponen Penerimaan Pembiayaan



Sumber: Dit. APK DJPb (diolah)

Grafik 3.42 Perkembangan Realisasi Per Komponen Pengeluaran Pembiayaan



Sumber: Dit. APK DJPb (diolah)

Dari sisi pengeluaran pembiayaan, realisasi komponennya dikontribusi dari pembayaran pokok pinjaman sebagai kontributor terbesar dengan rata-rata 72,76% dalam 3 tahun terakhir. Sementara

III. 2. 5 Perkembangan BLU Daerah

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan institusi pemerintah daerah yang dibentuk untuk menyediakan layanan publik tanpa mengutamakan/mencari keuntungan. Dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, BLUD diharapkan dapat berkontribusi untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Biro Perekonomian Setda Pemprov Sumsel dan Dinas

Kesehatan Prov. Sumsel per 1 Januari 2023, di Sumatera Selatan memiliki 262 unit pelaksana teknis / unit organisasi bersifat khusus yang berstatus BLUD. Dari jumlah tersebut, 258 BLUD berada pada rumpun kesehatan, 2 BLUD rumpun pendidikan, dan 2 BLUD rumpun lainnya. Jika dilihat secara kelembagaan, mayoritas BLUD berada pada rumpun Kesehatan yang terdiri dari 30 RSUD dan 228 Puskesmas. Sebaran BLUD di wilayah Sumsel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Rekap Profil BLUD Lingkup Sumatera Selatan TA 2023

Pemda	Rumpun					Total
	Kesehatan		Pendidikan		Kawasan & Lingkungan	
	RSUD	Puskesmas	SMK	Diklat / Pengembangan SDM		
Kab. Banyuasin	2	33				35
Kab. Empat Lawang	1	0				1
Kab. Lahat	1	0				1
Kab. Muara Enim	1	22				23
Kab. Musi Banyuasin	3	28				31
Kab. Musi Rawas	2	19			1	22
Kab. Musi Rawas Utara	1	8				9
Kab. Ogan Ilir	1	25				26
Kab. Ogan Komering Ilir	2	33				35
Kab. Ogan Komering Ulu	1	0				1
Kab. OKU Selatan	1	0				1
Kab. OKU Timur	2	0				2
Kab. Pagar Alam	1	0				1
Kab. Pali	1	0				1
Kota Lubuk Linggau	2	10		1		13
Kota Palembang	2	41				43
Kota Prabumulih	1	9				10
Provinsi Sumatera Selatan	5	0		1	1	7
Total	30	228	0	2	2	262

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Sumsel dan Biro Ekonomi Setda Prov. Sumsel

Berdasarkan hasil asistensi dan survei yang dilakukan selama TA 2023, masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam pengelolaan dan optimalisasi peningkatan layanan BLUD, diantaranya:

- Belum adanya Perda yang mengatur kegiatan pembinaan BLUD pada beberapa pemda (Contoh: Pemerintahan Kab. OKU Selatan);

- Belum adanya turunan Perda yang mengatur persyaratan administratif untuk BLUD (Tata Kelola, Rencana Strategis 5 tahun, Standar Pelayanan Minimal) atau sudah memiliki Perda namun belum diupdate sesuai ketentuan dalam Permendagri No79/2018;
- Pemda dalam proses penyusunan Perda Tarif sebagai amanat dalam UU HKPD Terkait masuknya Jasa Pelayanan Kesehatan sebagai Retribusi Daerah;

- Beberapa BLUD masih belum fleksibel secara pengelolaan keuangan karena masih berstatus UPTD dari Dinas Kesehatan dan belum menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- Kurangnya dukungan dari APBD karena dianggap sudah mandiri dengan status BLUD;
- Masih membutuhkan bimbingan dalam pengadaan barang dan jasa BLUD karena pada beberapa daerah belum mengatur secara khusus perkara PBJ untuk BLUD;
- Masih adanya gap hubungan antara OPD Pemda dengan BLUD yang dapat menghambat upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat (contoh: sengketa kewenangan parkir di lahan RSUD dengan Dinas Perhubungan);
- Kebutuhan untuk peningkatan tata kelola organisasi BLUD, SDM, proses bisnis, dan inovasi layanan untuk mencapai standar pelayanan minimal;
- Untuk BLUD rumpun kesehatan, permasalahan terkait perhitungan klaim PBI BPJS yang secara besaran tarif layanan pada beberapa jasa pelayanan masih sangat rendah dan merugikan RSUD dan Puskesmas. Selain itu periode pengakuan pembayaran klaim yang berbeda;
- Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman terkait pola pengelolaan keuangan BLUD.
- Pendapatan BLUD kesehatan sangat bergantung pada alokasi TKD dan Klaim jaspel BPJS sehingga tingkat kemandirian BLUD masih relatif rendah;
- Belum adanya SOP pengelolaan aset menyebabkan pengelolaan aset menjadi tidak optimal.

III. 2. 6. Isu Strategis Pelaksanaan APBD

III. 2. 6. 1. Tantangan Optimalisasi PAD

Untuk dapat mengoptimalisasikan PAD khususnya melalui penguatan PDRD, Sumsel dihadapkan pada tantangan struktur ekonomi. LTR yang dibawah angka ideal bahkan pada tahun 2023 mencapai angka terendah dalam 3 tahun terakhir dipengaruhi struktur ekonomi Sumsel yang masih bergantung pada sektor primer, yang secara sifatnya sektor tersebut lebih diserap oleh pajak pusat (PBB Pertambangan, PPN, dan PPh). Namun, sektor-sektor lainnya seperti jasa, perdagangan, industri pengolahan, ataupun pariwisata belum dioptimalkan untuk menyerap penerimaan pajak daerah.

Selain itu, Ketimpangan penerimaan pajak antar wilayah juga terjadi karena masih terkonsentrasinya aktivitas ekonomi pada daerah tertentu. Total penerimaan pajak daerah kab/kota utamanya dikontribusi oleh 3 daerah yaitu Palembang sebagai Ibukota Provinsi Sumsel, Muara Enim sebagai penghasil Batubara, dan Musi Banyuasin sebagai penghasil minyak dan gas bumi.

Sumsel juga dihadapkan pada tantangan faktor kebijakan dan administrasi pajak. LTB Sumsel yang menunjukkan fiscal drag di tahun 2023 mengindikasikan efisiensi pengumpulan pajak yang kurang optimal. Sumsel masih menghadapi isu tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang relatif rendah, serta keterbatasan SDM terutama terkait kompetensi di bidang pemeriksa dan juru sita.

III. 2. 6. 2. Tantangan Peningkatan Pengelolaan Belanja Daerah

Dalam perkembangan 3 tahun terakhir, realisasi belanja pegawai memiliki proporsi terbesar dibandingkan jenis belanja yang lain dengan rata-rata 29,48%. Dari sisi kebijakan alokasinya pun memiliki proporsi terbesar dibandingkan alokasi jenis belanja yang lain dengan rata-rata 34,71%. Hal ini mencerminkan bahwa komposisi alokasi dan belanja daerah masih diperuntukkan untuk belanja operasional yang tidak secara langsung berpengaruh terhadap pembangunan daerah.

Untuk dapat meningkatkan pengelolaan belanja daerah yang dapat memberikan impact bagi perekonomian daerah, Sumsel dihadapkan pada tantangan dukungan belanja modal yang masih relatif rendah. Kontribusi realisasi belanja modal berada di rata-rata 22,67%. Padahal, sesuai amanat UU HKPD (2022), daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan transfer kepada daerah atau desa yang paling lambat porsinya disesuaikan pada tahun 2027. Belanja modal yang produktif diharapkan perlu terus ditingkatkan karena memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah, mendorong akselerasi investasi dan pembangunan, serta hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

III. 2. 6. 3. Tantangan Pemanfaatan Pembiayaan Kreatif

Semakin banyaknya kebutuhan perbaikan dan pembangunan layanan publik, maka semakin besar dana yang dibutuhkan untuk pembiayaannya. Dengan kapasitas fiskal Sumsel yang mayoritas masih rendah, ini berarti kemampuan pemda untuk menghimpun pendapatan dari sumber yang dimilikinya untuk memenuh kebutuhan belanjanya masih relatif rendah pula. Oleh karena itu, pemanfaatan pembiayaan kreatif menjadi urgensi untuk dapat memenuhi pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Namun demikian, pemanfaatan pembiayaan kreatif belum menjadi opsi utama bagi Sumsel. Pinjaman daerah terlihat masih belum menjadi instrumen menarik bagi sumsel memenuhi *fiscal gap* jika terjadi konsekuensi peningkatan *fiscal needs* untuk pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan dari tren kontribusi pinjaman daerah yang semakin menurun dalam 3 tahun terakhir hingga menyentuh 1,09% pada 2023, diikuti dengan semakin meningkatnya kontribusi SiLPA dalam 3 tahun terakhir hingga menyentuh 98,91% pada 2023. Padahal, pinjaman daerah dapat memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan penyediaan layanan infrastruktur seperti infrastruktur kesehatan, sekolah, perumahan, jalan, dan air. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat pembiayaan infrastruktur di Sumsel yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU).

Padahal, skema KPDBU adalah salah satu pembiayaan kreatif yang menawarkan banyak benefit dimana melibatkan badan usaha sumber dana pembiayaan, penanggung risiko, dan penanggung jawab proyek infrastruktur hingga pemeliharannya sampai batas waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Mayoritas pemda di Sumsel memiliki kapasitas fiskal rendah, sehingga KPDBU dapat menjadi solusi alternatif pembiayaan kreatif bagi Sumsel. KPDBU dapat menarik lebih banyak investasi badan usaha termasuk dari mitra internasional untuk proyek infrastruktur di Sumsel. KPDBU dapat mengatasi isu terkait sustainability dan resilience untuk penyediaan layanan yang lebih baik. Terdapat banyak dukungan fiskal pemerintah pusat terhadap proyek infrastruktur dengan skema KPDBU, seperti: Project Development Facility (PDF), pendampingan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dalam persiapan dan transaksi proyek KPDBU; Viability Gap Fund (VGF), dukungan sebagian biaya konstruksi untuk proyek yang layak secara ekonomi namun belum layak secara finansial; serta Availability Payment (AP), skema pembayaran ketersediaan layanan secara berkala untuk proyek infrastruktur sosial.

III. 3. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Konsolidasian mencakup konsolidasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan baik untuk LRA Pemerintah Pusat maupun untuk LRA Pemerintah Daerah.

LRA Pemerintah Konsolidasian ini mencakup konsolidasi terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dilakukan eliminasi akun-akun resiprokal. Realisasi anggaran pemerintah konsolidasian tingkat wilayah Provinsi Sumatera Selatan periode 2019 sampai dengan 2023 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Provinsi Sumsel Tahun 2022 dan 2023 (dalam miliar)

Uraian	2022					2023					Growth
	Konsolidasian	Pusat	Daerah	Kontribusi		Konsolidasian	Pusat	Daerah	Kontribusi		
				Pusat	Daerah				Pusat	Daerah	
A. PENDAPATAN	27.520,22	18.301,27	9.218,95	66,50%	33,50%	28.408,37	20.276,73	8.131,64	71,38%	28,62%	3,23%
I. Perpajakan	22.372,90	15.887,13	6.485,77	71,01%	28,99%	22.772,11	16.804,93	5.967,18	73,80%	26,20%	1,78%
II. PNPB	4.464,32	2.414,13	2.050,18	54,08%	45,92%	5.561,83	3.471,80	2.090,03	62,42%	37,58%	24,58%
III. Hibah	683	-	683	0%	100,00%	74,43	-	74,43	0%	100,00%	-89,10%
B. BELANJA	54.386,60	16.296,56	38.090,04	29,96%	70,04%	59.686,24	21.538,45	38.147,79	36,09%	63,91%	9,74%
I. Belanja Pemerintah	47.865,25	13.917,50	33.947,75	29,08%	70,92%	50.700,25	16.328,86	34.371,39	32,21%	67,79%	5,92%
II. Transfer	6.521,36	2.379,06	4.142,30	36,48%	63,52%	8.985,99	5.209,59	3.776,40	57,97%	42,03%	37,79%
C. SURPLUS/DEFISIT	-26.866,39	2.004,71	-	-7,46%	107,46%	-31.277,87	-1.261,72	30.016,15	4,03%	95,97%	16,42%
D. PEMBIAYAAN	2.346,98	-	2.346,98	0%	100%	2.531,68	-	2.531,68	0%	100,00%	7,87%
I. Penerimaan	3.062,43	-	3.062,43	0%	100%	3.118,38	-	3.118,38	0%	100,00%	1,83%
II. Pengeluaran	715,45	-	715,45	0%	100%	586,7	-	586,7	0%	100,00%	-18,00%
E. SILPA (SIKPA)	-24.519,40	2.004,71	-	-8,18%	108,18%	-28.746,19	-1.261,72	27.484,47	4,39%	95,61%	17,24%

Sumber: Dit. APK DJPb diolah)

III. 3. 1. Pendapatan Konsolidasian

Pendapatan konsolidasian wilayah Sumsel sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 tercapai Rp28,41 triliun, tumbuh positif sebesar 3,23% (yoy). Pendapatan tersebut masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp20,27 triliun atau 71,38% dari total pendapatan konsolidasian. Hal ini dapat dilihat baik dari sisi pendapatan pajak maupun dari sisi PNPB sebagai kontributor terbesar yang bersumber dari pemerintah pusat.

Kontribusi pendapatan pemerintah daerah terhadap pendapatan konsolidasian wilayah Sumsel hanya sebesar 28,62%. Capaian ini mengindikasikan masih perlunya pengoptimalan potensi-potensi daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara lebih lengkap, perkembangan pendapatan konsolidasian untuk Tingkat wilayah Provinsi Sumatera Selatan selama lima tahun terakhir mulai dari tahun 2019 s.d. 2023 dapat dilihat pada grafik berikut,

Grafik 3.43 Perkembangan Pendapatan Konsolidasian Tahun 2019–2023 (Rp miliar)



Sumber: Dit. APK DJPb (diolah)

Pada periode 5 tahun terakhir, terlihat tren pendapatan konsolidasian yang cenderung menunjukkan pertumbuhan positif, kecuali pada tahun 2020 yang terdapat penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Namun secara keseluruhan, untuk periode lima tahun terakhir, pendapatan konsolidasian menunjukkan tren yang meningkat. Pada setiap periodenya, Pendapatan Perpajakan masih menjadi mayoritas yang menopang aspek pendapatan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Hal yang masih perlu mendapatkan perhatian Pemda di lingkup Provinsi Sumatera Selatan adalah terkait dengan upaya peningkatan PAD melalui implementasi Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Pengaturan lebih lanjut terkait dengan pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Sejalan dengan kebijakan Pajak dan Retribusi yang diatur dalam UU HKPD maupun PP PDRD ini, pemerintah daerah diharapkan akan dapat mengimplementasikannya melalui kebijakan-kebijakan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi, di antaranya mengenai mekanisme pemberian dukungan insentif, sampai dengan penyesuaian tarif,

terutama di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, pemerintah daerah tetap didorong agar terus mengedepankan penggalan potensi pajak secara optimal, salah satunya melalui kerja sama optimalisasi pemungutan pajak dan pemanfaatan data dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, maupun pihak ketiga dengan tetap mengedepankan pengambilan keputusan yang berdasarkan kajian yang memadai.

III. 3. 2. Belanja Konsolidasian

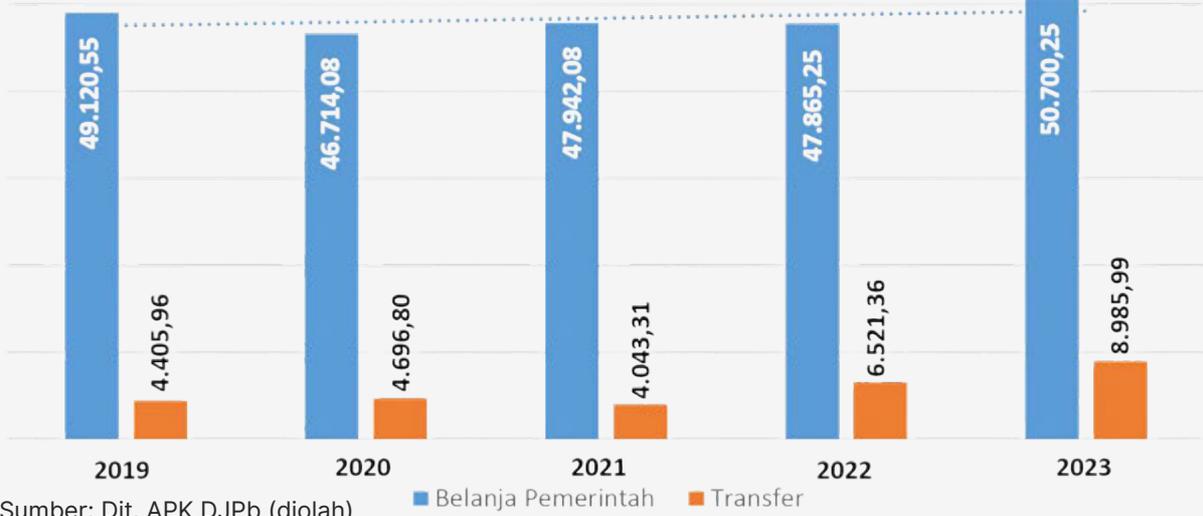
Belanja konsolidasian wilayah Sumsel hingga tahun 2023 tercatat sebesar Rp59,68 triliun yang menunjukkan angka pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 9,74% (yoy). Dari sisi belanja, pemerintah daerah memiliki kontribusi yang lebih dominan, yaitu sebesar 63,91%, sementara pemerintah pusat sebesar 36,09%, secara konsolidasi. Apabila dilihat dari sisi Belanja Pemerintah, peran daerah masih tetap terlihat lebih dominan dengan kontribusi secara konsolidasian sebesar 67,79% dibandingkan Pemerintah Pusat sebesar 32,21%.

Jika diamati lebih lanjut dari sisi belanja transfer, Pemerintah Pusat masih mendominasi sisi belanja sebesar 57,97% secara konsolidasian. Persentase peningkatan belanja konsolidasian didukung dengan meningkatnya porsi belanja transfer pemerintah pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Belanja Transfer mengalami peningkatan

sebesar 37,79%, meningkat dari sebesar Rp6.521,36 pada tahun 2022 menjadi Rp8.985,99 di tahun 2023 lalu.

Secara umum, porsi Belanja Konsolidasian menunjukkan tren peningkatan yang positif selama lima tahun terakhir tahun 2019 s.d 2023 yang tersaji pada grafik berikut:

Grafik 3.44 Perkembangan Belanja Konsolidasian Tahun 2019-2023 (Rp miliar)



Sumber: Dit. APK DJPb (diolah)

Jika dilihat dari perbandingan porsi antara Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Tingkat wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada lima tahun terakhir, dapat dilihat bahwa porsi belanja untuk Pemerintah Daerah masih mendominasi.

Hal ini menandakan bahwa Belanja Daerah memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perekonomian secara makro di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Porsi realisasi belanja konsolidasian selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16 Porsi Realisasi Belanja Konsolidasian Tahun 2019 s.d. 2023

Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
	Porsi Pusat	Porsi Daerah	Porsi Pusat	Porsi Daerah	Porsi Pusat	Porsi Daerah	Porsi Pusat	Porsi Daerah	Porsi Pusat	Porsi Daerah
I. Belanja Pemerintah Pusat/Daerah	29,34%	70,66%	28,34%	71,66%	30,01%	69,99%	29,08%	70,92%	32,21%	67,79%
1. Belanja Pegawai	29,56%	70,44%	29,58%	70,42%	29,77%	70,23%	29,95%	70,05%	29,63%	70,37%
2. Belanja Barang	39,27%	60,73%	35,31%	64,69%	34,21%	65,79%	32,43%	67,57%	36,91%	63,09%
3. Belanja Modal	21,36%	78,64%	26,28%	73,72%	30,84%	69,16%	25,95%	74,05%	32,87%	67,13%
4. Pembayaran Bunga Utang	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
5. Subsidi	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
6. Hibah	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
7. Bantuan Sosial	39,04%	60,96%	52,58%	47,42%	44,24%	55,76%	32,40%	67,60%	41,43%	58,57%
8. Belanja Tak Terduga	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
9. Belanja Lain-lain	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
II. Transfer	4,78%	95,22%	12,12%	87,88%	0,00%	100,00%	36,48%	63,52%	57,97%	42,03%
Total	27,32%	72,68%	26,85%	73,15%	27,67%	72,33%	29,96%	70,04%	36,09%	63,91%

Sumber: Dit. APK DJPb (diolah)

III. 3. 3. Defisit dan Pembiayaan Konsolidasian

Tabel 3.17 Perkembangan Surplus/Defisit Konsolidasian Tahun 2019 – 2023 (Rp miliar)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Growth (2022-2023)
Pendapatan Konsolidasi	20.054,77	19.805,11	22.583,64	22.372,90	28.403,37	3,23%
Belanja Konsolidasi	53.526,52	51.410,88	51.985,39	54.386,60	59.686,24	9,74%
Surplus/Defisit	-33.471,74	-31.605,77	-29.401,75	-26.866,39	-31.277,87	16,42%

Sumber: Dit. APK DJPb (diolah)

Untuk periode tahun 2023, defisit konsolidasian tercatat sebesar Rp31,28 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan negatif yang berarti celah defisit di lingkup konsolidasian Tingkat wilayah Provinsi Sumatera Selatan meningkat sebesar 16,42% (yoy). Defisit di Tingkat wilayah Provinsi Sumatera Selatan sangat didominasi oleh kontribusi pemerintah daerah yang mencapai 95,97%.

Untuk menutup angka defisit tersebut, Pembiayaan Konsolidasian sampai dengan 2023 mencatatkan angka sebesar Rp2,53 triliun yang dalam hal ini menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 7,87% (yoy). Kenaikan tersebut dipengaruhi naiknya penerimaan pembiayaan dari pemerintah daerah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,83% (yoy) seiring dengan penurunan pengeluaran pembiayaan di angka -18,00% (yoy).

Boks B

Pengaruh Transfer ke Daerah terhadap Ketimpangan Fiskal Horizontal

Dana Transfer ke Daerah (TKD) merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Salah satu bentuk ketimpangan yang terjadi di daerah adalah ketimpangan fiskal horizontal, yang menunjukkan perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengumpulkan dana terutama dari pajak yang diperuntukkan untuk menyediakan pelayanan publik.

Untuk melihat bagaimana pengaruh TKD terhadap Ketimpangan Fiskal Horizontal di Sumsel, Kanwil DJPb Sumsel melakukan analisis regresi data panel menggunakan variabel dependent (Indeks Theil Entropy) dan variabel independent (DAK, DAK, DAK Non Fisik, Dana Desa, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan IPM) pada tahun 2018 s.d. 2022 di 17 Kab/Kota, dengan model persamaan sebagai berikut:

$$1. ITit = \beta_0 + \beta_1 RealDAUit + \beta_2 RealDAKFit + \beta_3 RealDAKNFit + \beta_4 Pendudukit + \beta_5 Wilayahit + \beta_6 IPMit + \mu it$$

$$2. ITit = \beta_7 + \beta_8 RealDDit + \beta_9 RealDAUit + \beta_{10} RealDAKFit + \beta_{11} RealDAKNFit + \beta_{12} Pendudukit + \beta_{13} Wilayahit + \beta_{14} IPMit + \mu it$$

Keterangan:

$ITit$ = Indeks Theil Entropy Kabupaten/Kota ke- i pada tahun ke- t

$\beta_0 = \beta_7 =$ konstanta

β_1 s.d. β_6 dan β_8 s.d. β_{14} = parameter/koeffisien variabel

$RealDAUit$ = realisasi DAU Kabupaten/Kota ke- i pada tahun ke- t (miliar rupiah)

$RealDAKFit$ = realisasi DAK Fisik Kabupaten/Kota ke- i pada tahun ke- t (miliar rupiah)

$RealDAKNFit$ = realisasi DAK Nonfisik Kabupaten/Kota ke- i pada tahun ke- t (miliar rupiah)

$RealDDit$ = realisasi Dana Desa Kabupaten/Kota ke- i pada tahun ke- t (miliar rupiah)

$Pendudukit$ = Jumlah penduduk Kabupaten/Kota ke- i pada tahun ke- t (jiwa)

$Wilayahit$ = Luas wilayah Kabupaten/Kota ke- i pada tahun ke- t (km²)

$IPMit$ = Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota ke- i pada tahun ke- t

μit = error term

Berdasarkan hasil analisis, didapatkan kesimpulan bahwa DAU dan DAK Nonfisik berpengaruh signifikan menurunkan ketimpangan fiskal horizontal. Dimana setiap peningkatan DAU sebesar 1 miliar rupiah, dapat menurunkan ketimpangan (indeks Theil Entropy) sebesar 0,03. Setiap DAK Nonfisik meningkat sebesar 1 miliar rupiah, dapat menurunkan ketimpangan (indeks Theil Entropy) sebesar 0,03.

Sementara itu, Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan fiskal horizontal dapat disebabkan oleh komposisi Dana Desa yang belum berkontribusi optimal terhadap peningkatan PDRB Kabupaten/Kota sehingga belum berperan secara langsung menurunkan ketimpangan fiskal horizontal. DAK Fisik berpengaruh positif terhadap ketimpangan horizontal yang dapat disebabkan oleh adanya lag (jeda) waktu dari realisasi terhadap dampak yang diberikan terhadap ketimpangan horizontal.

Bab IV



Lokasi Pulau Kemaro, Palembang,

Foto Rizky Novrianto



BAB IV

Kesimpulan dan Rekomendasi



BAB IV Kesimpulan dan Rekomendasi

IV.1. Kesimpulan

- Arah kebijakan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumsel tahun 2023 mengusung tema “Sumsel Maju Untuk Semua”, dengan empat prioritas yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan wilayah berbasis lingkungan dan tata ruang, reformasi birokrasi dan stabilitas daerah.
- Dalam mencapai tujuan pembangunan, Sumsel menghadapi beberapa tantangan yaitu, perekonomian yang bergantung dengan sektor primer, mayoritas angkatan kerja berpendidikan \leq SD, aktivitas ekonomi yang terkonsentrasi pada wilayah tertentu, dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang belum optimal.
- Perekonomian Sumsel menunjukkan kinerja yang positif ditengah risiko ketidakpastian, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Normalisasi harga komoditas unggulan dan inflasi yang lebih tinggi dari nasional menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja ekonomi Sumsel di tahun 2023.
- Kinerja pelaksanaan APBN wilayah Sumsel menunjukkan kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut didorong oleh peningkatan penerimaan pajak dan PNBPN serta kinerja belanja pemerintah yang diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional.
- Kinerja penyaluran TKD juga mengalami pertumbuhan di berbagai jenis TKD, kecuali untuk penyaluran DAK Fisik mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- APBD Sumsel berkinerja efektif mendukung ketercapaian pembangunan di tahun 2023, dengan pendapatan dan belanja daerah yang mencatatkan kinerja tinggi meskipun sedikit mengalami penurunan. Namun demikian, untuk menuju pelaksanaan APBD yang lebih efektif, Sumsel dihadapkan pada isu strategis diantaranya tantangan optimalisasi PAD, peningkatan pengelolaan belanja, serta pemanfaatan pembiayaan kreatif.

IV.2. Rekomendasi

- Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Pusat untuk segera melakukan transformasi ekonomi dan menciptakan sumber pertumbuhan yang baru untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor primer.
- Perlu dilakukan penguatan koordinasi dengan Pemda untuk peningkatan kinerja Penyaluran DAK Fisik agar penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan standar Kementerian/Lembaga.
- Penyelarasan antara belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi untuk ketercapaian indikator strategis pembangunan di Sumatera Selatan di sektor pendidikan, Kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial.
- Transformasi struktur ekonomi Sumsel perlu ditempuh untuk mulai shifting dari sektor primer ke sektor lainnya seperti jasa, perdagangan, dan industri pengolahan, serta sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti sektor pariwisata, untuk dapat menjadi potensi penerimaan PDRD sehingga mendorong optimalisasi PAD.
- Keberadaan MoU Pemda Sumsel, DJPK, dan DJP didorong untuk dapat terus dioptimalkan dalam mendorong efisiensi pengumpulan pajak daerah melalui perbaikan kebijakan dan administrasi pajak di pemda wilayah Sumsel. Dukungan peningkatan kapasitas SDM di daerah terkait kompetensi di bidang pemeriksa dan juru sita, dapat ditempuh melalui fasilitasi Kementerian Keuangan Provinsi Sumsel untuk bekerja sama dengan PKN STAN sebagai pihak yang dapat memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang tersebut.

A tall, red clock tower stands on a bridge, featuring a white clock face and a sign that reads "AMPERA". The tower is surrounded by yellow decorative patterns, including stylized flowers and geometric shapes. The year "2023" is overlaid in large white text on the left side of the image. A rainbow is visible in the sky to the left of the tower.

2023

Lantai 2
Gedung Keuangan Negara Palembang
Jl. Kapten A. Rivai No.2
Palembang, Sumatera Selatan
30129